



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ARIANTO, S.Sos.,M.Si.**

Jabatan : **KEPALA DINAS**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **dr. AULIA RAHMAN BASRI, M. Kes**

Jabatan : **BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin.
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan

yang berbasis data.

5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 2 Januari 2026

Pihak Kedua,

BUPATI KUTAI KARTANEGARA



dr. AULIA RAHMAN BASRI, M. Kes

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS



ARIANTO, S.Sos., M.Si.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 197805022005021003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa	Presentase Desa Berkembang dan Maju Menuju Mandiri	Persen	8,08
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai	4,01
3	Terwujudnya organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Nilai	45
4	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan	Persen	100
5	Terwujudnya pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan	Tingkat keterisian Data Prioritas Tahunan	Persen	100
6	Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp18.525.100.499,00	APBD
2	PROGRAM PENATAAN DESA	Rp14.395.160.000,00	APBD
3	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Rp14.407.162.890,00	APBD
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Rp15.179.474.200,00	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp62.506.897.589,00	

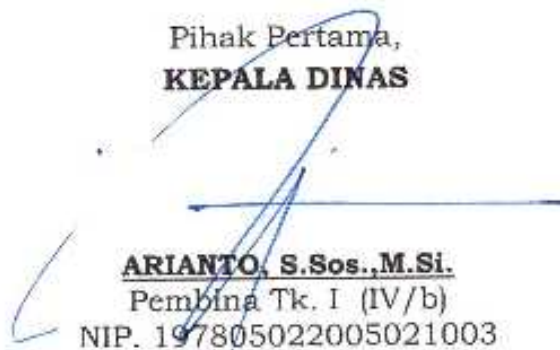
Kutai Kartanegara, 2 Januari 2026

Pihak Kedua,
BUPATI KUTAI KARTANEGARA



dr. AULIA RAHMAN BASRI, M. Kes

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS



ARIANTO, S.Sos., M.Si.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 197805022005021003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MOHAMMAD YUSRAN DARMA, S.Sos, M.Si**

Jabatan : **SEKRETARIS**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ARIANTO, S.Sos, M.Si**

Jabatan : **KEPALA DINAS**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Bidang Sekretariat yang saya pimpin
2. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
3. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

4. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
5. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
6. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
7. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
8. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
9. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

**Pihak Kedua,
KEPALA DINAS**

**Pihak Pertama,
SEKRETARIS**

ARIANTO, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19780502 200502 1 003

MOHAMMAD YUSRAN DARMA, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19711201 199101 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Nilai	80
2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100
3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang Akuntabel	Laporan	12
4	Terkelolanya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	2
5	Meningkatnya Kapasitas ASN Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100
6	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100
7	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Persen	82.25
8	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100
9	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	17

10	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai	4,35
11	Terwujudnya organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Nilai	45
12	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan	Persen	100
13	Terwujudnya pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan	Tingkat keterisian Data Prioritas Tahunan	Persen	100
14	Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100
15	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% setiap bulan dan SKP Final tahunan	Persen	100
16	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	12

**KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

No	KEGIATAN	Anggaran	Ket
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 18.525.100.499,-	apbd
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 100.000.000.-	APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 16.525.692.199.-	APBD
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 9.000.000.-	APBD
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 1.272.430.800.-	APBD
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 300.000.000.-	APBD
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 17.977.500.-	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp. 18.525.100.499,-	

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
**KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA**

ARIANTO, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19780502 200502 1 003

Pihak Pertama,
**SEKRETARIS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA**

MOHAMMAD YUSRAN DARMA, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19711201 199101 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **POINO,S.IP.,M.Si**

Jabatan : **KEPALA BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ARIANTO,S.Sos,M.Si**

Jabatan : **KEPALA DINAS**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Bidang Administrasi Pemerintahan Desa yang saya pimpin;
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.

4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.


Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).


Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS



ARIANTO, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19780502 200502 1 003

Pihak Pertama,
**KEPALA BIDANG ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN DESA**



POINO, S.IP., M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19690503 199101 1 001

**KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 14.407.162.890	APBD
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Rp. 255 000 000,-	APBD
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Rp. 7,085.635.910,-	APBD
	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Rp. 6.766.526.980,-	APBD
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Rp. 300.000.000,-	APBD
	JUMLAH ANGGARAN	Rp. 14.407.162.890	

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS

ARIANTO, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19780502 200502 1 003

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Pertama,
**KEPALA BIDANG ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN DESA**

POINO, S.IP., M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19690503 199101 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Tertib Administrasi Pemerintahan Desa dan Pertumbuhan Pendapatan BUMDesa	Prosentase Desa Tertib Administrasi Pemerintahan Dalam Kategori Baik	Persen	95
		Pertumbuhan Pendapatan BUMDesa	Persen	10
2	Terfasilitasinya Desa dalam Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Dokumen	1
	Terfasilitasinya Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen	24
3	Tersusunnya Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Dokumen	1
4	Meningkatnya Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	200
5	Terwujudnya organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Nilai	45
6	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan	Persen	100

7	Terwujudnya pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan	Tingkat keterisian Data Prioritas Tahunan	Persen	100
8	Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100
10	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% setiap bulan dan SKP Final tahunan	Persen	100
11	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	12



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DEDY SURIANTO, SE**
Jabatan : **KEPALA BIDANG KERJA SAMA DESA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ARIANTO, S.Sos, M.Si**
Jabatan : **KEPALA DINAS**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Bidang Kerjasama Desa yang saya pimpin;
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan

pengambilan kebijakan yang berbasis data.

5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 05 Januari 2026

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG KERJA SAMA DESA


ARIANTO, S. Sos, M. Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19780502 200502 1 003


DEDY SURIANTO, SE
Pembina (IV/A)
NIP. 19711112 199703 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Prosentase Realisasi Kesepakatan Kerjasama Desa	Persen	100
2	Terfasilitasinya Kerjasama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	8
3	Terfasilitasinya kerjasama antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	4
4	Terfasilitasinya Pembentukan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen	5
5	Terwujudnya organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Nilai	45
6	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan	Persen	100
7	Terwujudnya pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan	Tingkat keterisian Data Prioritas Tahunan	Persen	100

8	Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100
9	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% setiap bulan dan SKP Final tahunan	Persen	100
10	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	12

KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Rp. -	APBD
1	Fasilitasi Kerja sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Rp. -	APBD
2	Fasilitasi Kerja sama antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Rp. -	APBD
3	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Rp. -	APBD
	JUMLAH ANGGARAN	Rp. -	APBD

Kutai Kartanegara, 05 Januari 2026

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS



ARIANTO, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19780502 200502 1 003

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG KERJA SAMA DESA



DEDY SURYANTO, SE
Pembina (IV/A)
NIP. 19711112 199703 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AHMAD IRJI'I,SE.,M.Si**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PENATAAN DESA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ARIANTO,S.Sos,M.Si**
Jabatan : **KEPALA DINAS**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan Program Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa;
2. Melaksanakan Fasilitasi Tata Wilayah Desa;
3. Melaksanakan Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa;
4. Melaksanakan Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa;
5. Melaksanakan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa
6. Melaksanakan Penginputan Pada Aplikasi E. Pantau
7. Melaksanakan Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
8. Melaksanakan Gerakan EtamMengaji (Gema) di Bidang Penataan Desa
9. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS

ARIANTO, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19780502 200502 1 003

Kutai Kartanegara, 9 Februari 2026

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PENATAAN DESA

AHMAD IRJI'I, SE., M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19681202 200601 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Terfasilitasinya Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Desa	8
2	Terfasilitasinya Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	Desa	193
3	Terfasilitasinya Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	Desa	193
4	Terfasilitasinya Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Desa	193
5	Terpenuhinya kebutuhan Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	unit	14
6	Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100
7	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% setiap bulan dan SKP Final tahunan	Persen	100
8	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di Bidang Penataan Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	12

**KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penataan Desa	Rp. 14.395.160.000.-	APBD
2	Penyelenggaraan Penataan Desa	Rp. 14.395.160.000.-	APBD
JUMLAH ANGGARAN			

Kutai Kartanegara, 9 Februari 2026

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS

ARIANTO, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19780502 200502 1 003

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PENATAAN DESA

AHMAD IRJI', SE., M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19681202 200601 1 008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DEDDY SETYO UTOMO.S.IP,M.Si**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN EKONOMI DESA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ARIANTO,S.Sos,M.Si**

Jabatan : **KEPALA DINAS**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa yang saya pimpin;
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.

4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 9 Pebruari 2026

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS



ARIANTO, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19780502 200502 1 003

Pihak Pertama,
**KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN
EKONOMI DESA**



DEDDY SETYO UTOMO.S.IP,M.Si
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 198808062007011003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (LKD/K) (%)	Persen	70.35
		Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa/Kelurahan (LAD/K) dan Masyarakat Hukum Adat (%)	Persen	100
2	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	3.252
3	Terlaksananya Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Unit)	Unit	1.757

4	Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	1
5	Terwujudnya organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Nilai	45
6	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan	Persen	100
7	Terwujudnya pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan	Tingkat keterisian Data Prioritas Tahunan	Persen	100
8	Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100
9	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% setiap bulan dan SKP Final tahunan	Persen	100
10	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	12

**KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Rp. 15.179.474.200.-	APBD
1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 1.864.677.200.-	APBD
2	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 11.314.797.000.-	APBD
3	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Rp. 2.000.000.000.-	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp. 15.179.474.200.-	

Kutai Kartanegara, 9 Pebruari 2026

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS

ARIANTO, S. Sos, M. Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19780502 200502 1 003

Pihak Pertama,
**KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN
EKONOMI DESA**

DEDDY SETYO UTOMO, S. IP, M. Si
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 198808062007011003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **LILIS SURIANI, S.Sos. M.Si.**
Jabatan : **JF. PERENNCANA AHLI MUDA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **MOHAMMAD YUSRAN DARMA, S.Sos, M.Si**
Jabatan : **SEKRETARIS**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Sub Bagian Keuangan dan Aset yang saya pimpin;
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.

4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 05 Januari 2026

Pihak Kedua
Sekretaris

Pihak Pertama
JF. PERENCANA AHLI MUDA

MOHAMMAD YUSRAN DARMA, S.Sos.,M.Si.

LILIS SURIANI, S.Sos.M.Si.

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197112011991011001

Pembina (IV/a)
NIP. 197705102000122005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2
2	Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	Data	1
3	Terlaksananya penyusunan Laporan Penyelenggaraan SPIP serta laporan kinerja lainnya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan SPIP	Laporan	1
4	Terlaksananya Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	AA (90,89)
5	Terwujudnya organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Nilai	45
6	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan	Persen	100
7	Terwujudnya pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir,	Tingkat keterisian Data Prioritas Tahunan	Persen	100

	terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan			
8	Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100
9	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	12
10	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Kinerja Pelaksana (Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Individu, dan Sasaran Kinerja Pegawai dan Penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bawahan	Jumlah PK dan IKI	Dokumen	2

**SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.50.000.000	APBD
2	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Rp.50.000.000	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp 100.000.000	

Kutai Kartanegara, 05 Januari 2026

Pihak Kedua
Sekretaris

Pihak Pertama
JF. Perencana Ahli Muda

MOHAMMAD YUSRAN DARMA, S.Sos., M.Si

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197112011991011001

LILIS SURIANI, S.Sos.M.Si

Pembina (IV/a)
NIP. 197705102000122005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **JULPIANSYAH, S.Sos.M.Si.**

Jabatan : **KEPALA SUB.BAGIAN KUANGAN DAN ASET**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **MOHAMMAD YUSRAN DARMA, S.Sos, M.Si**

Jabatan : **SEKRETARIS**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Sub Bagian Keuangan dan Aset yang saya pimpin;
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.

4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua
Sekretaris

MOHAMMAD YUSRAN DARMA, S.Sos., M.Si.

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197112011991011001

Pihak Pertama
Kasubbag Keuangan dan Aset

JULFIANSYAH, S.Sos.M.Si.

Pembina (IV/a)
NIP. 19740901 200701 1 015

**SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.16.395.172.199.	APBD
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 5.000.000.-	APBD
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp. 125.520.000.-	APBD
5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp. --	APBD
6	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp. --	APBD
7	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Rp. --	APBD
8	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. 9.000.0000.-	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp 16.534.692.199,-	

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua
Sekretaris

MOHAMMAD YUSRAN DARMA, S.Sos.,M.Si.

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197112011991011001

Pihak Pertama
Kasubbag Keuangan dan Aset

JULPIANSYAH, S.Sos.M.Si.

Pembina (IV/a)
NIP. 19740901 200701 1 015

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	2142
2	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1
3	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	12
4	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	Dokumen	1
5	Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1
6	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	Laporan	2
7	Terlaksananya penyusunan Laporan Penyelenggaraan SPIP serta laporan kinerja lainnya yang	Jumlah laporan penyelenggaraan SPIP	Laporan	3

	telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah			
8	Terlaksananya Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	AA (90,89)
9	Terwujudnya organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Nilai	45
10	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan	Persen	100
11	Terwujudnya pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan	Tingkat keterisian Data Prioritas Tahunan	Persen	100
12	Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100
13	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	12
14	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Kinerja Pelaksana (Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Individu, dan Sasaran Kinerja Pegawai dan Penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bawahan	Jumlah PK, IKI dan SKP Bawahan	Dokumen	3



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **KARTIKA SARI.A.Ma.Pd**

Jabatan : **KEPALA SUB.BAGIAN UMUM KETATALAKSANAAN
DAN KEPEGAWAIAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **MOHAMMAD YUSRAN DARMA, S.Sos, M.Si**

Jabatan : **SEKRETARIS**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;

4. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
5. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
6. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
7. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
8. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, Januari 2026

Pihak Kedua
**Sekretaris Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa**

MOHAMMAD YUSRAN DARMA, S.Sos.,M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197112011991011001

Pihak Pertama
**Kasubbag Umum Ketatalaksanaan
dan Kepegawaian**

KARTIKA SARI, A.Ma.Pd
PENATA TK. I (III/d)
NIP.197205191993062001

**SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000,00	APBD
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	150.746.250,00	APBD
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	38.033.550,00	APBD
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	148.651.000,00	APBD
6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	500.000.000,00	APBD
7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	420.000.000,00	APBD
8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	300.000.000,00	APBD
9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.000.000,00	APBD
10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	92.977.500,00	APBD
11	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75.000.000,00	APBD

12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000,00	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp 1.890.408.300,-	

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua
**Sekretaris Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa**

MOHAMMAD YUSRAN DARMA, S.Sos., M.Si.

Pembina / Tingkat I (IV/b)
NIP. 197112011991011001

Pihak Pertama
**Kasubbag Umum Ketatalaksanaan
dan Kepegawaian**

KARTIKA SARI, A.Ma.Pd

PENATA TK. I (III/d)
NIP.197205191993062001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian	Laporan	7
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12
6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1000
7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4
8	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	33
9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1
10	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	98
11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir rehabilitasi	Unit	1

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12
12	Meningkatnya Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Persen	100
13	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai	4,35
14	Terwujudnya organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Nilai	45
15	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan	Persen	100
16	Terwujudnya pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan	Tingkat keterisian Data Prioritas Tahunan	Persen	100
17	Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100
18	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	12
19	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Kinerja Pelaksana (Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Individu, dan Sasaran Kinerja Pegawai dan Penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bawahan	Jumlah PK, IKI dan SKP Bawahan	Dokumen	69



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAMSUL DAFIK.S.Sos
Jabatan : Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : DEDDY SETYO UTOMO.S.IP. M.Si
Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PENGEMBANGAN EKONOMI DESA

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.

5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data
6. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara
7. Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, menjadi tanggung jawab saya.

Pihak kedua

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 9 Februari 2026

PIHAK KEDUA,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN
EKONOMI DESA


DEDDY SETYO UTOMO, S.P.M.Si
PENATA TK. I (III/d)
NIP. 198808062007011003

PIHAK PERTAMA,
PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT
AHLI MUDA


SAMSUL DAFIK, S.Sos.
PENATA TK. I (III/d)
NIP. 197312311998031017

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Terlaksananya Fasilitas Manajemen Pemerintahan Desa	Dokumen Hasil Fasilitas Manajemen Pemerintahan Desa	Dokumen	10
2	Terlaksananya Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan	11
3	Terlaksananya Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Dokumen	1
4	Terlaksananya kematangan Organisasi (Pelaksanaan Gerakan Mengaji) GEMA	Jumlah laporan Pelaksanaan GEMA	Laporan	12
5	Melakukan input data pelaksanaan sub kegiatan pada aplikasi E-Pantau	Jumlah data terinput pada Aplikasi E-Pantau	Data	12
6	Terwujudnya pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.	Jumlah Surat Naskah Dinas yang terselesaikan pada aplikasi SRIKANDI	Surat	25
7	Membuat Kertas Kerja Manajemen Resiko Sub Kegiatan per triwulan	Jumlah Kertas Kerja Manajemen Resiko yang terselesaikan	Kerta Kerja Dan Laporan	1 Kertas Kerja dan 4 Laporan
8	Melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan baik lisan maupun tertulis.	Jumlah laporan Ekinerja (SKP) Bulanan Dan Final	Laporan	13
9	Melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan baik lisan maupun tertulis	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Individu	Dokumen	6
10	Melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan baik lisan maupun tertulis	Jumlah Laporan LHKPN dan Laporan Pajak Tahunan (SPT Tahunan)	Laporan	2
11	Melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan baik lisan maupun tertulis	Jumlah kegiatan (Apel) dan kegiatan lainnya	Persen	100

Kutai Kartanegara, 9 Februari 2026

PIHAK KEDUA,
**KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN
EKONOMI DESA**


DEDDY SETYO UTOMO, S.IP.M.SI
PENATA TK. I (III/d)
NIP. 198808062007011003

PIHAK PERTAMA,
**PENGERAK SWABAYA MASYARAKAT
AHILI MUDA**


SAMSUL DAHIK S.Sos.
PENATA TK. I (III/d)
NIP. 197312311998031017



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HENDRA MADAN, SE**
Jabatan : **PENGERAK SWADAYA MASYARAKAT**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **POINO, S.IP., M.Si**
Jabatan : **KEPALA BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Bidang Administrasi Pemerintahan Desa yang saya pimpin;
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.

4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Unit Usaha dan Pendapatan BUMDesa/BUMDESMA dan Lembaga Kerja sama Antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Persen	100
2	Terwujudnya organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Nilai	45
3	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan	Persen	100
4	Terwujudnya pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan	Tingkat keterisian Data Prioritas Tahunan	Persen	100
5	Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100
6	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% setiap bulan dan SKP Final tahunan	Persen	100

7	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Pelaksanaan Etam Mengaji (GEMA)	Laporan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	12
8	Melaksanakan Layanan Konsultasi Desa	Terlaksananya Layanan Konsultasi Desa	Layanan	Laporan	12

**SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2026
BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**

No.	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa	Rp. 0,-	APBD

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN DESA**



POINO, S.IP., M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19690503 199101 1 001

Pihak Pertama,
PENGERAK SWADAYA MASYARAKAT



HENDRA MADAN, SE
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19770903 199803 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ANITA HEFIANA, S. Sos. M. Si**

Jabatan : **PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **DEDDY SETYO UTOMO, S.IP., M.SI**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PENGEMBANGAN EKONOMI DESA.**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan Pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia

guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.

5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 9 Februari 2026

**Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pemberdayaan
Masyarakat dan Pengembangan
Ekonomi Desa .**

Deddy Setyo Utomo, S.IP., M.Si
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19880806 200701 1 003

**Pihak Pertama,
Pengerak Swadaya Masyarakat**

Anita Hefiana, S. Sos. M. Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19740304 200012 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Terfasilitasinya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat	Laporan	1
2.	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	6
3.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Unit	14

4.	Terfasilitasinya Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Laporan	1
5.	Terwujudnya organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Pelaksanaan GEMA pada Bidang	Laporan	12
6.	Tersedianya Kertas Kerja Manajemen Resiko dan Laporan Manajemen Resiko Sub. Kegiatan	Jumlah Dokumen Manajemen Resiko dan Laporan Manajemen Resiko	Kegiatan	3
7.	Terlaksananya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data	Jumlah Data pada Kertas Kerja BECIK, WALIDATA, PENATA-USAHAN ARSIP dan Aplikasi SRI KANDI	Kegiatan	3
8.	Melaksanakan perintah atasan dalam hal Penilaian Berjenjang (E-KINERJA) Pelaksanaan Perjanjian Kinerja(PK) Indikator Kinerja Individu (IKI) dan Pengukuran Kinerja,melaksanagn pelaporan Harta Kekayaan LHKPN dan kepatuhan pelaporan Pajak, melaksanakan Gerakan Etam Mengaji OPD (GEMA) Zakat&Shodaqoh, nilai nilai ASN Ber-Akhlak, serta melaksanakan tugas dari atasan baik secara	Jumlah Laporan Penilaian Berjenjang (E-KINERJA) Pelaksanaan Perjanjian Kinerja(PK) Indikator Kinerja Individu (IKI) dan Pengukuran Kinerja,melaksanagn pelaporan Harta Kckayaan LHKPN dan kepatuhan pelaporan Pajak, melaksanakan Gerakan Etam Mengaji OPD (GEMA) Zakat&Shodaqoh, nilai nilai ASN Ber-Akhlak, serta melaksanakan tugas dari atasan baik	Laporan	1

9.	Terlaksananya Pelaporan (Input pada Aplikasi E-PANTAU) Pada Bidang	Jumlah Laporan yang di Input pada Aplikasi E Pantau	Kegiatan	3
----	--	---	----------	---

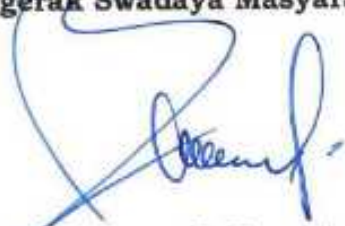
Kutai Kartanegara, 9 Februari 2026

**Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pemberdayaan
Masyarakat dan Pengembangan
Ekonomi Desa .**



**Deddy Setyo Utomo, S.IP., M.Si
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19880806 200701 1 003**

**Pihak Pertama,
Penggerak Swadaya Masyarakat**



**Anita Hefiana, S. Sos. M. Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19740304 200012 2 002**

**SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PENGEMBANGAN EKONOMI DESA**

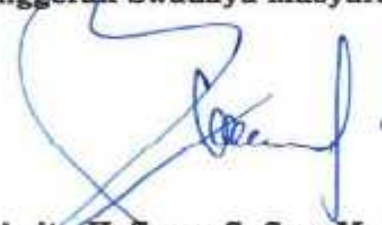
No	Kegiatan	Anggaran	Ket
1.	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 0	-
2.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 1.864.677.200,00	APBD
3.	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 11.314.797.000,00	APBD
4	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Rp. 2.000.000.000,00	APBD

Kutai Kartanegara, 9 Februari 2026

**Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pemberdayaan
Masyarakat dan Pengembangan
Ekonomi Desa .**


Deddy Setyo Utomo, S.IP., M.Si
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19880806 200701 1 003

**Pihak Pertama,
Penggerak Swadaya Masyarakat**


Anita Hefiana, S. Sos. M. Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19740304 200012 2 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **LAILA SUNDARTI, SE**
Jabatan : Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

N a m a : **JULPIANSYAH, S.Sos, M.Si**
Jabatan : Kasubbag Keuangan dan Aset
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kutai
Kartanegara
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Rcnja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik;
3. Menerapkan manajemen resiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi;
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengambilan kebijakan yang berbasis data;

5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi E-Pantau secara tepat waktu, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi dan pengambilan kebijakan berbasis data;
6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat ;
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang;

Pihak kedua

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua
Kasubbag Keuangan dan Aset


JULFIANSYAH, S.Sos, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19740901 200701 1 015

Pihak Pertama
Penata Kelola Sistem dan Teknologi
Informasi


LAILA SUNDARTI, SE
NIP. 19740214 200701 2 013

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Terwujudnya Tingkat Kepatuhan Penyampaian Penilaian Berjenjang (E-Kinerja)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP setiap bulan dan final	Persen	100
2.	Penyusunan Perjanjian Kinerja ASN	Ketepatan waktu penyusunan dan penyampaian Perjanjian Kinerja ASN	Persen	100
3.	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan atas Laporan SPT Tahunan	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan	Persen	100
4.	Terwujudnya Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Kegiatan GEMA yang dilaksanakan	Laporan	12
5.	Terlaksananya nilai-nilai ASN Ber-Akhlak di Perangkat Daerah	Kegiatan yang dilaksanakan dalam pelaksanaan ASN Ber-Akhlak	Kegiatan	15
6.	Terwujudnya Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Pegawai	JP	20
7.	Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Yang Akuntabel	Laporan Verifikasi SPJ yang dilaksanakan setiap bulan	Berkas	72
8.	Terlaksananya serapan anggaran Perangkat Daerah	Serapan anggaran berdasarkan verifikasi berkas yang disampaikan PPTK	Persen	100
9.	Terwujudnya organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik	Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Nilai	45
10.	Terwujudnya pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggung jawabkan	Tingkat keterisian Data Prioritas Tahunan	Persen	100

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua
 Kasubbag Keuangan dan Aset


JULPIANSYAH, S.Sos, M.Si
 (Pembina /IV/a)
 NIP. 19740901 200701 1 015

Pihak Pertama
 Penata Kelola Sistem dan
 Teknologi Informasi


LAILA SUNDARTI, SE
 NIP. 19740214 200701 2 013

SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA


NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 16.395.172.199.-	APBD
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 5.000.000.-	APBD
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp. 125.520.000.-	APBD
4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp. --	APBD
5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp. --	APBD
6	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Rp. --	APBD
7	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. 9.000.0000.-	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp 16.534.692.199,-	

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua
Kasubbag Keuangan dan Aset


JULPIANSYAH, S.Sos, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19740901 200701 1 015

Pihak Pertama
Penata Kelola Sistem dan Teknologi
Informasi


LAILA SUNDARTI, SE
NIP. 19740214 200701 2 013



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ENNY NOOR AFIANI.S.Sos**
Jabatan : **PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **JULPIANSYAH,S.Sos**
Jabatan : **KEPALA SUBBAG KEUANGANA DAN ASET**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.

4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
Kepala Subbag Keuangan dan
Aset,

Pihak Pertama,
Penclaaah Teknis Kebijakan


JULPIANSYAH, S.Sos., M.SI
Pembina
NIP. 19740901 200701 1 015


ENNY NOOR AFIANI, S.Sos
Penata
NIP. 19840616 200801 2 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen
2	Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa lingkup Perangkat Daerah	1	Data
3	Terwujudnya organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Nilai	45
4	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan	Persen	100
5	Terwujudnya pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan	Tingkat keterisian Data Prioritas Tahunan	Persen	100
6	Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
7	Terlaksananya penyusunan Laporan Penyelenggaraan SPIP serta laporan kinerja lainnya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan SPIP	Laporan	1
8	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	12
9	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Kinerja Pelaksana (Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Individu, dan Sasaran Kinerja Pegawai dan Penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bawahan	Jumlah PK, IKI dan SKP Bawahan	Dokumen	3

**SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN*	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000	APBD
2	Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	50.000.000	APBD
JUMLAH ANGGARAN		100.000.000	APBD

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
Kepala Subbag Keuangan dan
Aset,


JULPIANSYAH, S.Sos., M.SI
Pembina
NIP. 19740901 200701 1 015

Pihak Pertama,
Penelaah Teknis Kebijakan


ENNY NOOR AFIANI, S.Sos
Penata
NIP. 19840616 200801 2 010



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DEWI UTAMI**

Jabatan : **PENGADMINISTRASI PERKANTORAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **JULPIANSYAH, S.Sos, M.Si**

Jabatan : **KASUBBAG KEUANGAN DAN ASET**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Sub Bagian Keuangan dan Aset yang saya pimpin;
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.

4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua
Kasubbag Keuangan dan Aset


JULPIANSYAH S.Sos.,M.Si,
Pembina (IV/a)
NIP. 197409012007011015

Pihak Pertama
Pengadministrasi Perkantoran


DEWI UTAMI
Pengatur TK.I (II/d)
NIP. 198008102007012031

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	2142
2	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Laporan	1
3	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	Laporan	12
4	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	Dokumen	1
5	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	Dokumen	5
6	Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	Laporan	1
7	Terlaksananya Rekonsiliasi dan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan	Laporan	4

	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		
8	Membuat pelaporan pajak (SPT Tahunan)	Jumlah Laporan Pajak pada Aplikasi Cortex	Laporan	1
9	Menyediakan Dokumen Pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Individu (IKI) dan Pengukuran Kinerja tahun 2026	Jumlah dokumen pelaksanaan inputan laporan Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Individu (IKI) dan Pengukuran Kinerja Tahun 2026	Dokumen	2
10	Menyediakan Dokumen Laporan E-Kinerja (SKP) setiap bulannya	Jumlah Dokumen Penyampaian penilaian sasaran kinerja pegawai hingga sampai final (SKP Final Tahunan))	Dokumen	1
11	Menginput data tagihan pada Aplikasi AMANDA	Jumlah data tagihan yang di input pada Aplikasi AMANDA	Data	20
12	Menginput data permintaan pembayaran pada Aplikasi SIPD Penatausahaan	Jumlah data tagihan (SPP) yang di input pada Aplikasi SIPD Penatausahaan	Data	20
13	Menginput data penerima pembayaran pada Aplikasi ATKP	Jumlah data penerima tagihan yang terinput pada Aplikasi ATKP	Data	20
14	Menginput data penerima Gaji dan Tunjangan PNS dan PPPK pada Aplikasi SIPD Penatausahaan	Jumlah Data penerima Gaji dan Tunjangan PNS dan PPPK pada Aplikasi SIPD Penatausahaan	Data	36
15	Memeriksa kelengkapan tagihan yang akan di bayarkan	Jumlah kelengkapan data pengajuan sesuai permintaan PPTK	Data	20

16	Membuat kertas kerja kendali realisasi anggaran Sub Kegiatan yang ada di Dinas PMD	Jumlah data sub kegiatan yang sudah realisasi keuangan	Data	1
17	Membuat rekapitulasi sub kegiatan yang realisasinya beresiko	Jumlah data sub kegiatan yang teridentifikasi realisasi anggarannya mengandung resiko	Data	1
18	Melaksanakan kegiatan GEMA (Gerakan Etam Mengaji) setiap bulannya	Jumlah pelaksanaan GEMA di Sub Bagian Keuangan dan Aset	Dokumen	10
19	Melaksanakan kegiatan ASN Berakhlak serta melaksanakan perintah atasan baik secara lisan maupun tertulis	Jumlah kegiatan dan tugas yang di laksanakan	Kegiatan	5

**SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.16.395.172.199. -	APBD
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 5.000.000.-	APBD
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp. 125.520.000.-	APBD
4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp. -	APBD
5	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Rp. -	APBD
6	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. 9.000.0000.-	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp 16.534.692.199,-	


Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua
Kasubbag Keuangan dan Aset


JULPIANSYAH S.Sos., M.Si,

Pembina (IV/a)
NIP. 197409012007011015

Pihak Pertama
Pengadministrasi Perkantoran


DEWI UTAMI

Pengatur TK.1 (II/d)
NIP. 198008102007012031



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Muhammad Aidil Nur, S.Sos**
Jabatan : **Pengolah Data dan Informasi**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Julpiansyah, S.Sos., M.Si**
Jabatan : **Kasubbag Keuangan dan Aset**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data

Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.

5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

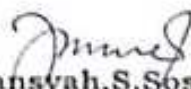
1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
Kasubbag Keuangan dan Aset

Pihak Pertama,
Pengolah Data dan Informasi


Julpiansyah, S.Sos., M.Si
Pembina - (IV/a)
NIP. 19740901 200701 1 015


Muhammad Aidil Nur, S.Sos
Penata Muda - (III/a)
NIP. 19781112 200701 1 017

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	2142
2	Melaksanakan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD	Laporan	14
3	Menyusun Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	12
4	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	Dokumen	1
5	Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1
6	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1
7	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	Laporan	2
8	Melaksanakan Gerakan Etam Mengaji (GEMA) di Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Gerakan Etam Mengaji (GEMA)	Laporan	12

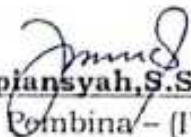
9	Melaksanakan Pembuatan Dokumen PK, IKI Dan Pengukuran kerja	Jumlah Dokumen PK, IKI dan Pengukuran Kinerja	Dokumen	4
10	Melaksanakan perintah atasan dalam hal Penilaian Berjenjang (E-Kinerja) Bulanan dan Final	Jumlah Dokumen (E-Kinerja) Bulanan dan Final	Laporan	13
11	Melaksanakan kepatuhan terhadap Pelaporan Harta dan Kewajiban Pajak	Jumlah kepatuhan terhadap pelaporan harta dan kewajiban pajak	Laporan	1
12	Menginput Data E-Bupot PPh 21 dan Unifikasi pada Aplikasi Coretax	Jumlah input Data E-Bupot PPh 21 dan Unifikasi pada Aplikasi Coretax	Dokumen	50
13	Melaksanakan Pelaporan Pajak Unifikasi dan PPn pada Aplikasi Coretax	Jumlah Pelaporan Pajak Unifikasi dan PPn pada Aplikasi Coretax	Laporan	12
14	Melaksanakan pembuatan ID Billing Pajak pada Aplikasi CORETAX	Jumlah Dokumen ID Billing Pajak yang dibuat pada Aplikasi CORETAX	Dokumen	100
15	Menginput Data Pelaporan DTH (Daftar Transaksi Harian) pajak per SP2D yang telah dipotong/dipungut pajaknya setiap bulan	Jumlah Data Pelaporan DTH (Daftar Transaksi Harian) pajak per SP2D yang telah dipotong/dipungut pajaknya setiap bulan yang terinput	Laporan	12

**SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN*	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 16.395.172.199,-	APBD
2	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 5.000.000.-	APBD
3	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp. 125.520.000.-	APBD
4	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp. -	APBD
5	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rp. -	APBD
6	Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Rp. -	APBD
7	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. 9.000.000.-	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp. 16.534.692.199.-	

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
Kasubbag Keuangan dan Aset


Julpiansyah, S.Sos., M.Si

Pembina - (IV/a)

NIP. 19740901 200701 1 015

Pihak Pertama,
Pengolah Data dan Informasi


Muhammad Aidil Nur, S.Sos

Penata Muda - (III/a)

NIP. 19781112 200701 1 017



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MURDIANI SHANTY,SE**

Jabatan : **PENELAAH TEKHNIS KEBIJAKAN/ PELAKSANA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **JULPIANSYAH,S.SOS,.M.Si**

Jabatan : **KASUBAG KEUANGAN DAN ASET**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data

Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.

5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:


1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
KASUBAG KEUANGAN DAN ASET

Pihak Pertama,
**PENELAAH TEKHNIS
KEBIJAKAN/PELAKSANA**


JULPIANSYAH, S.SOS., M.Si
Pembina IV/a
NIP. 197409012007011015


MURDIANI SHANTY, SE
Penata III/c
NIP. 197701042007012019

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	2142
2	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	14
3	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	12
4	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	Dokumen	1
5	Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1
6	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1
7	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	2
8	Menyusun laporan SKP dan Penilaian Kinerja Bulanan Berdasarkan E - Kinerja	Jumlah Laporan Penilaian Berjenjang (E- Kinerja) yang tersusun	Laporan	13
9	Memeriksa kelengkapan tagihan yang akan dibayarkan	Jumlah terinputnya data pencairan sub kegiatan pada kertas kerja	Kegiatan	4

10	Menyusun kepatuhan pelaporan pajak pada aplikasi Coretax	Jumlah pelaporan pajak	dokumen	1
11	Menginput data pencairan SPP pada aplikasi SIPD Penatausahaan pada sub kegiatan	Jumlah data pencairan yang diinput pada aplikasi SIPD Penatausahaan	Kegiatan	4
12	Menginput data Register pengesahan Pertanggungjawaban pada sub kegiatan	Jumlah data register pengesahan pertanggungjawaban pada sub kegiatan	Kegiatan	8
13	Melaksanakan Nilai - nilai ASN Ber - Akhlak dan tugas dari atasan baik secara tertulis maupun lisan	Jumlah terlaksananya nilai - nilai ASN Ber - Akhlak dan tugas dari atasan baik secara tertulis maupun lisan	kegiatan	5
14	Menginput data pencairan sub kegiatan pada aplikasi ATKP	Jumlah data yang di input pada sub kegiatan di aplikasi ATKP	Kegiatan	4
15	Melaksanakan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah laporan GEMA yang terlaksana	Laporan	12
16	Membuat rekapitulasi data sub kegiatan yang realisasinya beresiko	Jumlah data sub kegiatan yang teridentifikasi realisasi anggaran yang mengandung resiko	Kegiatan	4
17	Mengelola data arsip in aktif	Jumlah data arsip inaktif yang dikelola	Kotak	5
18	Menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Indikator Kinerja Individu (IKI) dan Pengukuran Kinerja	Jumlah dokumen yang tersusun perjanjian kinerja (PK) Indikator Kinerja Individu (IKI) dan Pengukuran Kinerja	Dokumen	2

**SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN*	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 16.395.172.199,-	APBD
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 5.000.000.-	APBD
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp. 125.520.000.-	APBD
4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp. -	APBD
5	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Rp. -	APBD
6	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
7	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. 9.000.0000.-	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp 16.534.692.199,-	

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
KASUBAG KEUANGAN DAN ASET


JULFIANSYAH, S.SOS., M.Si
Pembina IV/a
NIP. 197409012007011015

Pihak Pertama,
**PENELAAH TEKHNIS
KEBIJAKAN/PELAKSANA**


MURDIANI SHANTY, SE
Penata III/c
NIP. 197701042007012019

CATATAN:

*HAPUS YANG TIDAK PERLU



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hj. Misrini, S.Sos

Jabatan : Pengolah Data Dan Informasi

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Julpiansyah, S.Sos, M.Si

Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Sub Bagian Keuangan dan Aset yang saya pimpin;
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.

6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 05 Januari 2026

Pihak Kedua,
Kasubbag Keuangan dan Aset,


Julpiansyah, S.Sos., M.Si
Pembina
NIP. 197409012007011015

Pihak Pertama,
Pengolah Data Dan Informasi


HJ. MISRINI. S.SOS
Penata Tingkat I
NIP. 19700207 199310 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	2142
2	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	14
3	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	12
4	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	Dokumen	1
5	Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1
6	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1
7	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	Laporan	2

8	Terverifikasinya dokumen bukti pengaluan kelengkapan pengajuan realisasi anggaran perangkat daerah	Jumlah dokumen yang terverifikasi	dokumen	1200
9	Terverifikasi kelengkapan berkas pengajuan realisasi anggaran perangkat daerah	Jumlah berkas yang terverifikasi	berkas	60
10	Terverifikasinya berkas dokumen pembukuan pengelolaan keuangan perangkat daerah	Jumlah berkas dokumen pembukuan yang terverifikasi	berkas	300
11	Terverifikasinya dokumen pertanggung jawaban pengelolaan keuangan (bukti pengeluaran dan penerimaan) perangkat daerah	Jumlah dokumen kelengkapan pertanggung jawaban yang terverifikasi	dokumen	1200
12	Terwujudnya organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Nilai	45
13	Terlaksananya tata kelola arsip perangkat daerah	Predikat tata kelola arsip perangkat daerah	Predikat	B (60-70)
14	Terlaksanakannya tata kelola core values ASN "BerAKHLAK"	Jumlah kegiatan sosialisasi, internalisasi, penetapan leader, tim budaya kerja	Kegiatan	4

Kutai Kartanegara, 05 Januari 2026

Pihak Kedua,
Kasubbag Keuangan dan Aset,


Julpiansyah, S.Sos., M.Si
Pembina
NIP. 197409012007011015

Pihak Pertama,
Pengolah Data Dan Informasi


HJ. MISRINI. S.SOS
Penata Tingkat I
NIP. 19700207 199310 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DYAH RISNAWATI, SE**
Jabatan : **PENGOLAH DATA DAN INFORMASI**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **JULPIANSYAH, S.Sos. M.Si.**
Jabatan : **KEPALA SUB.BAGIAN KUANGAN DAN ASET**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Sub Bagian Keuangan dan Aset yang saya pimpin;
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.

4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 05 Januari 2026

Pihak Kedua
Kasubbag Keuangan dan Aset


JULPIANSYAH, S.Sos.,M.Si

Pembina (IV/a)
NIP. 197409012007011015

Pihak Pertama
Pengolah Data dan Informasi


DYAH RISNAWATI, SE

Penata Tk.I (III/d)
NIP. 197812162012122003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Melaksanakan Perjanjian Kinerja (PK) , Indikator Kinerja Individu (IKI) dan Pengukuran Kinerja	Jumlah PK,IKI dan Pengukuran kinerja	Dokumen	4
2	Menyusun Data Gaji dan Back Up Gaji ASN dan PPPK	Jumlah Data Gaji dan Back Up Gaji ASN dan PPPK	Data	28
3	Menyusun Data Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)	Jumlah Data Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)	Data	12
4	Menginput Data Gaji dan Tunjangan ASN di Aplikasi E Pantau	Jumlah Data Gaji Dan Tunjangan ASN di Aplikasi E Pantau	Data	28
5	Melaporkan SPT Tahunan Wajib Pajak Pribadi	Jumlah Laporan SPT Tahunan PPh 21 Wajib Pajak Pribadi	Laporan	1
6	Mengisi Data pada Aplikasi SIMGAJI (KGB,KENPA dan Perubahan Data Kreluarga)	Jumlah Data Pada Aplikasi SIMGAJI	Data	35
7	Mengisi Data BPJS TPP Pada Aplikasi ARIP	Jumlah Data BPJS Pada Aplikasi ARIP	Data	12
8	Melaporkan Bupot PPh Pasal 21 di Aplikasi Coretax	Jumlah Laporan PPh 21 di Aplikasi Coretax	Laporan	12
9	Menginput Data Penganggaran Pada SIPD RI dan Terinputnya Rencana Anggaran Kas Pada SIPD Penatausahaan	Jumlah Dokumen RKA pada SIPD RI dan RAK pada SIPD Penatausahaan	Dokumen	4
10	Melaporkan SKP setiap bulan pada Aplikasi E Kinerja	Jumlah SKP yang terlapor	Laporan	12

11	Melaksanakan nilai nilai ASN Ber-Akhlak serta terlaksananya tugas dari atasan secara tertulis atau lisan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Kegiatan	12
12	Melaporkan SPJ Kegiatan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaporkannya SPJ Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen	12
13	Mengisi Data Surat di SRIKANDI	Jumlah Data Surat di aplikasi SRIKANDI	Surat	6
14	Melaksanakan GEMA (Gerakan Etam Mengaji)	Jumlah Laporan GEMA	Laporan	12
15	Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	JP	20


**SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 16.395.172.199,-	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp 16.395.172.199,-	

Kutai Kartanegara, 05 Januari 2026

Pihak Kedua
Kasubbag Keuangan dan Aset

Pihak Pertama
Pengolah Data dan Informasi


JULPIANSYAH, S.Sos.,M.Si
 Pembina (IV/a)
 NIP. 197409012007011015


DYAH RISNAWATI, SE
 Penata Tk.I (III/d)
 NIP. 197812162012122003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DYAH RISNAWATI, SE**
Jabatan : **PENGOLAH DATA DAN INFORMASI**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **JULPIANSYAH, S.Sos. M.Si.**
Jabatan : **KEPALA SUB.BAGIAN KUANGAN DAN ASET**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Sub Bagian Keuangan dan Aset yang saya pimpin;
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.

4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 05 Januari 2026

Pihak Kedua
Kasubbag Keuangan dan Aset


JULPIANSYAH, S.Sos.,M.Si

Pembina (IV/a)
NIP. 197409012007011015

Pihak Pertama
Pengolah Data dan Informasi


DYAH RISNAWATI, SE

Penata Tk.I (III/d)
NIP. 197812162012122003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Melaksanakan Perjanjian Kinerja (PK) , Indikator Kinerja Individu (IKI) dan Pengukuran Kinerja	Jumlah PK,IKI dan Pengukuran kinerja	Dokumen	4
2	Menyusun Data Gaji dan Back Up Gaji ASN dan PPPK	Jumlah Data Gaji dan Back Up Gaji ASN dan PPPK	Data	28
3	Menyusun Data Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)	Jumlah Data Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)	Data	12
4	Menginput Data Gaji dan Tunjangan ASN di Aplikasi E Pantau	Jumlah Data Gaji Dan Tunjangan ASN di Aplikasi E Pantau	Data	28
5	Melaporkan SPT Tahunan Wajib Pajak Pribadi	Jumlah Laporan SPT Tahunan PPh 21 Wajib Pajak Pribadi	Laporan	1
6	Mengisi Data pada Aplikasi SIMGAJI (KGB,KENPA dan Perubahan Data Kreluarga)	Jumlah Data Pada Aplikasi SIMGAJI	Data	35
7	Mengisi Data BPJS TPP Pada Aplikasi ARIP	Jumlah Data BPJS Pada Aplikasi ARIP	Data	12
8	Melaporkan Bupot PPh Pasal 21 di Aplikasi Coretax	Jumlah Laporan PPh 21 di Aplikasi Coretax	Laporan	12
9	Menginput Data Penganggaran Pada SIPD RI dan Terinputnya Rencana Anggaran Kas Pada SIPD Penatausahaan	Jumlah Dokumen RKA pada SIPD RI dan RAK pada SIPD Penatausahaan	Dokumen	4
10	Melaporkan SKP setiap bulan pada Aplikasi E Kinerja	Jumlah SKP yang terlapor	Laporan	12

11	Melaksanakan nilai nilai ASN Ber-Akhlak serta terlaksananya tugas dari atasan secara tertulis atau lisan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Kegiatan	12
12	Melaporkan SPJ Kegiatan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaporkannya SPJ Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen	12
13	Mengisi Data Surat di SRIKANDI	Jumlah Data Surat di aplikasi SRIKANDI	Surat	6
14	Melaksanakan GEMA (Gerakan Etam Mengaji)	Jumlah Laporan GEMA	Laporan	12
15	Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	JP	20

**SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**


NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 16.395.172.199,-	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp 16.395.172.199,-	

Kutai Kartanegara, 05 Januari 2026

Pihak Kedua
Kasubbag Keuangan dan Aset

Pihak Pertama
Pengolah Data dan Informasi


JULPIANSYAH, S.Sos.,M.Si
 Pembina (IV/a)
 NIP. 197409012007011015


DYAH RISNAWATI, SE
 Penata Tk.I (III/d)
 NIP. 197812162012122003



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RUDI HARIYANTO**
Jabatan : **PENGADMINISTRASI PERKANTORAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **JULPIANSYAH, S.SOS.M.SI**
Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Sub Bagian Keuangan dan Aset yang saya pimpin;
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.

5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 05 Januari 2026

Pihak Kedua,
Kepala Sub Bagian Keuangan
Dan Aset


JULPIANSYAH, S.SOS.M.SI
Pembina, IV/a
NIP. 19740901 200701 1 015

Pihak Pertama,
Pengadministrasi Perkantoran


RUDI HARIYANTO
Pengatur Tingkat I
NIP. 19871028 200604 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MSYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN/URAIAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya Pendistribusian Barang Persediaan dan Barang Milik Daerah ke unit pemakai	Jumlah Bukti Pendistribusian dan Berita acara Pinjam Pakai Barang Milik Daerah	dokumen	20
2	Tersedianya Laporan Barang Persediaan	Jumlah Laporan Barang Persediaan	dokumen	2
3	Tersedianya Surat Usulan Barang Rusak berat untuk dilakukan perubahan kondisi pada SIMDA BMD	Jumlah surat usulan barang rusak berat	dokumen	1
4	Tersedianya laporan Stock Opname Barang Persediaan	Jumlah Dokumen Laporan Stock Opname Barang Persediaan	dokumen	2
5	Tersedianya laporan Inventarisasi Aset Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah Dokumen Laporan Inventarisasi	dokumen	1
6	Tersedianya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Kartu Pemeliharaan Barang	dokumen	4
7	Terlaksananya pencatatan Barang Milik Daerah Pada SIMDA BMD	Jumlah Dokumen KIB, KIR, Buku Inventaris	dokumen	3
8	Tersedianya Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS)	Jmlah Dokumen Laporan Semesteran	dokumen	2
9	Tersedianya Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT)	Jmlah Dokumen Laporan Tahunan	dokumen	1
10	Tersedianya surat usulan penghapusan Barang Milik Daerah	Jmlah Dokumen Laporan Semesteran	dokumen	1
11	Terlaksananya Rekonsiliasi Aset dan Keuangan	Jmlah Dokumen Laporan Rekonsiliasi	dokumen	2

NO	SASARAN/URAIAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
12	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	12
13	Terlaksananya penyusunan Dokumen Kinerja Pelaksana (Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Individu, dan Sasaran	Jumlah PK, IKI dan SKP Bawahan	Dokumen	3

**SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.16.395.172.199,-	APBD
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 5.000.000,-	APBD
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp. 125.520.000,-	APBD
5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp. --	APBD
6	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp. --	APBD
7	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Rp. --	APBD
8	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. 9.000.0000,-	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp 16.534.692.199,	

Kutai Kartanegara, 05 Januari 2026

Pihak Kedua,
**KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
DAN ASET**


JULPIANSYAH, S.SOS.M.SI
PEMBINA, IV/a
NIP. 19740901 200701 1 015

Pihak Pertama,
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN


RUDI HARIYANTO
PENGATUR TK.I. II/d
NIP. 198710282006041003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Agus Sufian
Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Julpiansyah, S.Sos.M.Si
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Aset

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Sub Bagian Keuangan dan Aset yang saya pimpin;
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.

5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
Kepala Sub Bagian Keuangan dan
Aset

Pihak Pertama,
Pengadministrasi Perkantoran


JULPIANSYAH, S.SOS.M.SI
Pembina, IV/a
NIP. 19740901 200701 1 015


MUHAMMAD AGUS SUFIAN
Pengatur Tingkat I
NIP. 19770819 201001 1 012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MSYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN/URAIAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya Pendistribusian Barang Persediaan dan Barang Milik Daerah ke unit pemakai	Jumlah Bukti Pendistribusian dan Berita acara Pinjam Pakai Barang Milik Daerah	dokumen	20
2	Tersedianya Laporan Barang Persediaan	Jumlah Laporan Barang Persediaan	dokumen	4
3	Terisi dan Tersusunnya SKP Bulanan dan Tahunan pada Aplikasi E Kinerja	Jumlah SKP Bulanan dan Tahunan pada Aplikasi E Kinerja	Laporan	12
4	Tersedianya laporan Stock Opname Barang Persediaan	Jumlah Dokumen Laporan Stock Opname Barang Persediaan Bulanan	Laporan	12
5	Tersedianya laporan Inventarisasi Aset Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah Dokumen Laporan Inventarisasi	dokumen	1
6	Tersedianya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	laporan	12
7	Terlaksananya pencatatan Barang Milik Daerah Pada SIMDA BMD	Jumlah Dukumen KIB,KIR,Buku Inventaris	dokumen	3
8	Tersedianya Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS)	Jumlah Dokumen Laporan Semesteran	dokumen	2
9	Tersedianya Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT)	Jumlah Dokumen Laporan Tahunan	dokumen	1

NO	SASARAN/URAIAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
10	Terlaksananya Rekonsiliasi Aset dan Keuangan	Jumlah Dokumen Laporan Rekonsiliasi	dokumen	2
11	Terselesaikannya Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat kepatuhan LHKASN Tahun Per 31 Maret 2026	Persen	100
12	Terlaksananya Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	AA (90,89)
13	Terlaksanakannya Entri data Pelaksanaan Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya ke Aplikasi E-Pantau	Jumlah Laporan Entri data Pelaksanaan Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya ke Aplikasi E-Pantau	Laporan	12

**SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**


NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.75.000.000.-	APBD
2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. 9.000.000.-	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp 84.000.000,-	

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

**KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
DAN ASET**


JULPIANSYAH, S.SOS.M.SI
PEMBINA, IV/a
NIP. 19740901 200701 1 015

**PENGADMINISTRASI
PERKANTORAN**


MUHAMMAD AGUS SUFIAN
PENGATUR TK.I. II/d
NIP. 19770819 201001 1 012



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **YULIA ASTUTY, S.Sos**

Jabatan : **PENGOLAH DATA DAN INFORMASI**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **JULPIANSYAH, S.SOS., M.SI**

Jabatan : **KASUBBAG. KEUANGAN DAN ASET**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui pencrapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.

6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
8. saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Pihak Kedua,
Kasubbag Keuangan dan Aset


JULPIANSYAH, S.SOS., M.SI
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19740901 200701 1 015

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Pertama,
Pengolah Data dan Informasi,


YULIA ASTUTY, S.Sos
PENATA MUDA (III/a)
NIP. 19750731 200701 2 025

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	1582
2	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	14
3	Terlaksananya Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12
4	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	Dokumen	1
5	Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1
6	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1
7	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	Laporan	2
8	Melaksanakan Tingkat Kematangan Organisasi "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	12
9	Menginput data pencairan pada Kertas Kerja kegiatan	Menginput data pencairan pada Kertas Kerja Kegiatan	Berkas	18
10	Melaksanakan Perjanjian Kinerja ,IKI dan Pengukuran Kinerja	Melaksanakan Penyusunan Dokumen Kinerja Pelaksana (Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Individu,	Dokumen	2

11	Melaksanakan pelaporan harta kekayaan LHKPN dan Kepatuhan Pelaporan Pajak	Jumlah pelaporan Harta Kekayaan LHKPN dan kepatuhan pelaporan Pajak,	Laporan	1
12	Melaksanakan Tugas sesuai arahan atasan secara tertulis maupun lisan	Jumlah tugas dari atasan yang terlaksanakan sesuai arahan	Kegiatan	4
13	Penilaian Berjenjang (E- Kinerja)	Jumlah Dokumen Berjenjang (Ekinerja) atas Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Setiap Bulan dan Final Tersusun	Dokumen	13
14	Menyediakan Laporan Administrasi Keuangan yang akuntabel Register Pengesahan (SPJ)	Jumlah Laporan Dokumen Register Pengesahan (SPJ) Per Sub, Kegiatan	Kegiatan	8
15	Menginput Keterisian Data Surat Perintah Pembayaran (SPP) di aplikasi SIPD Penatausahaan	Jumlah Keterisian data pelaporan pada Aplikasi SIPD	Kegiatan	3
16	Menginput Data Pencairan ATKP (TBP dan LPJ) di Aplikasi SIPD	Jumlah Keterisian data pelaporan pada Aplikasi SIPD	Kegiatan	3
17	Terealisasinya anggaran sub kegiatan perangkat daerah	Jumlah realisasi anggaran pada sub kegiatan perangkat daerah	Kegiatan	3

**SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN*	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 16.395.172.199.-	APBD
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 5.000.000.-	APBD
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp. 125.520.000.-	APBD

4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp.	--	APBD
5	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rp.	--	APBD
6	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Rp.	--	APBD
7	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp.	9.000.0000.-	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp.	16.534.692.199,-	

Pihak Kedua,
Kasubbag Keuangan dan Aset


JULPIANSYAH, S.SOS., M.SI
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19740901 200701 1 015

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2025

Pihak Pertama,
Pengolah Data dan Informasi,


YULIA ASTUTY, S.Sos
PENATA MUDA (III/a)
NIP. 19750731 200701 2 025



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RINANUR OKTAVIA, SE**
Jabatan : **PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI DAN INFORMASI**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **JULPIANSYAH, S.Sos, MM**
Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.

4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara , 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
**KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
DAN ASET**

Pihak Pertama,
**PENATA KELOLA SISTEM DAN
TEKNOLOGI INFORMASI**


JULPIANSYAH, S.SOS, MM
PEMBINA
NIP.197409012007011015


RINANUR OKTAVIA, SE
PENATA TK.I
NIP.198404202010012037

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Melaksanakan GEMA (Gerakan Etam Mengaji) Di Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan GEMA (Gerakan Etam Mengaji)	Laporan	12
2	Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Jumlah jam Pelajaran pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	JP	20
3	Melaksanakan Pembuatan Perjanjian Kinerja(PK) Indikator Kinerja Individu (IKI) dan Pengukuran Kinerja	Jumlah PK,IKI dan Pengukuran Kinerja	Dokumen	4
4	Melaksanakan Pembuatan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran pada SKPD yang disampaikan setiap bulannya	Laporan	12
5	Tersedianya Laporan Pertanggung jawaban sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggung Jawaban Sub Keg Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Laporan	12
6	Melaksanakan perintah atasan dalam hal Penilaian Berjenjang (E-KINERJA)	Jumlah Laporan (E-Kinerja) Bulanan dan Final	Laporan	13
7	Melaksanakan Kepatuhan terhadap pelaporan harta dan kewajiban pajak	Jumlah Laporan Kepatuhan terhadap pelaporan harta dan kewajiban pajak	Laporan	1
8	Terinputnya Data Penganggaran Pada SIPD RI dan Terinputnya Rencana Anggaran Kas Pada SIPD Penatausahaan	Jumlah Data yang terinput pada SIPD	Dokumen	4
9	Teristinya Data Prioritas Tahunan (SRIKANDI	Jumlah Data Prioritas Tahunan (SRIKANDI	Surat	2
10	Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan baik secara tertulis maupun lisan	Jumlah tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan baik secara tertulis maupun lisan	Kegiatan	12
11	Terwujudnya organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Nilai	45
12	Terwujudnya pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.	Tingkat keterisian Data Prioritas Tahunan	Persen	100
13	Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100

**SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp. 125.520.000,-	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp 125.520.000,-	

Kutai Kartanegara , 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
**KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
DAN ASET**


JULPIANSYAH, S. SOS, MM

PEMBINA

NIP.197409012007011015

Pihak Pertama,
**PENATA KELOLA SISTEM DAN
TEKNOLOGI INFORMASI**


RINANUR OKTAVIA, SE

PENATA TK.I

NIP.198404202010012037

PENGUKURAN KINERJA

1. PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. KUTAI KARTANEGARA
 2. JAFUNG / PELAKSANA : PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI
 3. TAHUN : 2026

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Melaksanakan GEMA (Gerakan Etam Mengaji) Di Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan GEMA (Gerakan Etam Mengaji)	12	12	100%
2	Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan pegawai	Jumlah jam Pelajaran pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	20	20	100%
3	Melaksanakan Pembuatan Perjanjian Kinerja(PK) Indikator Kinerja Individu (IKI) dan Pengukuran Kinerja	Jumlah PK,IKI dan Pengukuran Kinerja	4	4	100%
4	Melaksanakan Pembuatan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran pada SKPD yang disampaikan setiap bulannya	12	12	100%
5	Tersedianya Laporan Pertanggung jawaban sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggung jawaban sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	12	12	100%
6	Melaksanakan perintah atasan dalam hal Penilaian Berjenjang (E-KINERJA)	Jumlah Laporan (E-Kinerja) Bulanan dan Final	13	13	100%
7	Melaksanakan Kepatuhan terhadap pelaporan harta dan kewajiban pajak	Jumlah Laporan Kepatuhan terhadap pelaporan harta dan kewajiban pajak	1	1	100%
8	Terinputnya Data Penganggaran Pada SIPD RI dan Terinputnya Rencana Anggaran Kas Pada SIPD Penatausahaan	Jumlah Data yang terinput pada SIPD	4	4	100%
9	Terisinya Data Prioritas Tahunan (SRIKANDI	Jumlah Data Prioritas Tahunan (SRIKANDI	2	2	100%
10	Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan baik secara tertulis maupun lisan	Jumlah tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan baik secara tertulis maupun lisan	12	12	100%
11	Terwujudnya organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	45	45	100%

12	Terwujudnya pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan	Tingkat keterisian Data Prioritas Tahunan	100	100	100%
13	Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	100	100	100%

Kutai Kartanegara, 05 Januari 2026

Kasubbag Keuangan dan Asct,

Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi ,


JULPIANSYAH, S. Sos, M. Si
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19740901 200701 1 015


RINANUR OKTAVIA, SE
 Penata Tk.1 (III/d)
 NIP. 19840420 201001 2 037



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BAINAH

Jabatan : PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **KARTIKA SARI, A.Ma.Pd**

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM KETATALAKSANAAN
DAN KEPEGAWAIAN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.

4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak Kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua
Kasubbag Umum Ketatalaksanaan
dan Kepegawaian



KARTIKA SARI, A.Ma.Pd

PENATA TK. I (III/d)

NIP.19720519 199306 2 001

Pihak Pertama
Pengadministrasi Perkantoran



BAINAH

PENGATUR TK. I (II/d)

NIP.19750406 200701 2 028

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Tersusunnya Dokumen kelengkapan Administrasi Realisasi Anggaran dan Pembukuan Sub.Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi dan Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Administrasi sub kegiatan Dokumen pengelolaan	Dokumen	96
2.	Tersusunnya Dokumen kelengkapan Administrasi Realisasi Anggaran dan Pembukuan Sub.Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Administrasi sub kegiatan Dokumen pengelolaan	Dokumen	84
3.	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan serta Laporan Akhir Sub.Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi dan Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan tersusun	Laporan	13
4.	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan keuanan Sub.Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah laporan tersusun	Laporan	13
5.	Tersusunnya Naskah Dinas melalui Aplikasi Srikandi	Jumlah Naskah Dinas yang tersusun melalui Aplikasi Srikandi	Naskah Dinas	36
6.	Entry Data Arsip Urusan UMTALPEG ada format Exsel Tata Kearsipan	Jumlah Data yang di Entry pada Format Exsel	Data	600
7.	Tersusunnya Notulen Rapat setiap acara rapat baik internal maupun rapat yang meminta fasilitasi Sub. Bagian UMTALPEG	Jumlah Notulen rapat yang tersusun	Notulen	6

8.	Terhimpun dan tersusunnya rekapitulasi pernohnan penggunaan ruang rapat	Jumlah daftar rekapitulasi pernohnan penggunaan ruang rapat	Daftar	12
9.	Terlaksananya Administrasi Buku Tamu dan Penyambutan Tamu Resmi	Jumlah Kegiatan Penyambutan tamu	Persen	100
10.	Terhimpunnya data Pelaksanaan Sub.Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi dan Sumber Daya Air dan Listrik dan Sub.Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dalam rangka terkait Manajemen Resiko	Jumlah Data yang terhimpun dalam rangka penyusunan laporan Manajemen Resiko	Data	12
11.	Terlaksananya Update data ASN ke aplikasi Simpeg dan My ASN	Persentase terlaksananya Update data ASN ke aplikasi Simpeg dan My ASN	Persen	100
12.	Terhimpunnya data Pelaksanaan Sub.Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi dan Sumber Daya Air dan Listrik dan Sub.Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dalam rangka E- Pantau	Jumlah Data yang terhimpun dalam rangka penyusunan laporan E-Pantau	Data	12
13.	Tersusunnya PK, IKI dan Pengukuran	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja, IKI dan Pengukuran yang tersusun	Dokumen	6
14.	Tersusunnya Dokumen Penilaian Berjenjang Bulanan dan Final	Jumlah Dokumen SKP yang tersusun	Dokumen	13
15.	Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Gerakan Etam mengaji "GEMA"	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan GEMA Individu	Laporan	12
16.	Terlaksananya tugas sesuai arahan pimpinan	Persentase terlaksananya tugas sesuai arahan	Persen	100

17.	Terinputnya laporan Pajak Tahunan 2025 pada Aplikasi Coretax	Jumlah Bukti Pelaporan Pajak	Laporan	1
-----	--	------------------------------	---------	---

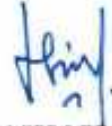
Pihak Kedua
Kasubbag Umum Ketatalaksanaan
dan Kepegawaian



KARTIKA SARI, A.Ma.Pd

PENATA TK.I (III/d)
NIP.19750406 200701 2 028

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026
Pihak Pertama
Pengadministrasi Perkantoran



BAINAH

PENGATUR TK.I (II/d)
NIP.197205191993062001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SURYA DHARMA, S.Sos**
Jabatan : **PENELAAH TEKHNIS KEBIJAKAN**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **KARTIKA SARI, A.Ma.Pd**
Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN UMUM KETATALAKSANAAN
DAN KEPEGAWAIAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.

4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak Kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua
Kasubbag Umum Ketatalaksanaan
dan Kepegawaian



KARTIKA SARI, A.Ma.Pd
PENATA TINGKAT I (III/d)
NIP.19720519 199306 2 001

Pihak Pertama
Penelaah Tckhnis Kebijakan



SURYA DHARMA, S.Sos
PENATA TINGKAT I (III/d)
NIP. 196910122000031003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Menyelesaikan Pelaksanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terpelihara	Unit	1
2	Menyelesaikan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12
3	Mengikuti Peningkatan Kapasitas ASN	Jumlah Jam Pelajaran yang di Ikuti dalam Peningkatan Kapasitas ASN	JP	20
4	Menyusun Dokumen SOP	Jumlah Dokumen SOP Selesai di Buat	Dokumen	4
5	Melaksanakan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	1
6.	Menyelesaikan Pembuatan Kertas Kerja MR Sub.Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Kertas Kerja MR Selesai di Buat	Dokumen	4
7.	Menyelesaikan Pembuatan Kertas Kerja MR Sub.Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Kertas Kerja MR Selesai di Buat	Dokumen	4
8.	Membuat Naskah Dinas pada Aplikasi Srikandi	Jumlah Naskah Dinas yang di Buat di Srikandi	Naskah Dinas	30
9.	Menyelesaikan Input Data Laporan Pelaksanaan Sub.Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Data Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang di Input pada Aplikasi E Pantau	Laporan	4

10.	Menyelesaikan Input Data Laporan Pelaksanaan Sub.Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Data Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang di Input pada Aplikasi E Pantau	Laporan	4
11.	Menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Individu (IKI), dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang dinilai	Jumlah Dokumen PK, IKI, dan SKP di Susun	Dokumen	14
12.	Melaporkan SPT Tahunan PPh pada Aplikasi Coretax	Jumlah SPT Tahunan Selesai Di Laporkan	Laporan	1
13.	Menyelesaikan Penyusunan dan Input RKA serta Anggaran Kas pada SIPD	Jumlah Dokumen RKA dan Anggaran Kas di Susun dan di Input	Dokumen	2
14.	Membantu PA Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Menyusun dan Mengumumkan RUP Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen Data RUP Dinas PMD yang Terumumkan	Persen	100
15.	Membantu PA Selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam Menyelesaikan Administrasi Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Pengadaan	Dokumen	110
16.	Menyelesaikan Tugas Lainnya dari Atasan Baik Secara Lisan Maupun Tertulis	Jumlah Laporan Pelaksanaan	Laporan	15
17.	Mengikuti Pelaksanaan Apel Pagi dan Apel Gabungan	Presentase dalam Mengikuti Pelaksanaan Apel Pagi dan Apel Gabungan	Persen	100
18.	Menyelesaikan Data My ASN dan SIMPEG	Presentase Update Data My ASN dan SIMPEG	Persen	100

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua
Kasubbag Umum Ketatalaksanaan
dan Kepegawaian



KARTIKA SARI, A.Ma.Pd
PENATA TINGKAT I (III/d)
NIP.197205191993062001

Pihak Pertama
Penelaah Tekhnis Kebijakan



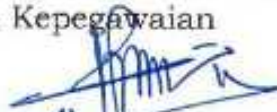
SURYA DHARMA, S.Sos
PENATA TINGKAT I (III/d)
NIP. 196910122000031003

**SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN *	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	300.000.000	APBD
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	50.000.000	APBD
Jumlah Anggaran		350.000.000	

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua
Kasubbag Umum Ketatalaksanaan
dan Kepegawaian



KARTIKA SARI, A.Ma.Pd
PENATA TINGKAT I (III/d)
NIP.197205191993062001

Pihak Pertama
Penelaah Teknis Kebijakan



SURYA DHARMA, S.Sos
PENATA TINGKAT I (III/d)
NIP. 196910122000031003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SRI BUDIARTI,SE.**

Jabatan : **PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **KARTIKA SARI, A.Ma.Pd**

Jabatan : **KEPALA SUBBAG UMUM, KETATALAKSANAAN DAN
KEPEGAWAIAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.

5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data
6. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara
7. Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, menjadi tanggung jawab saya.

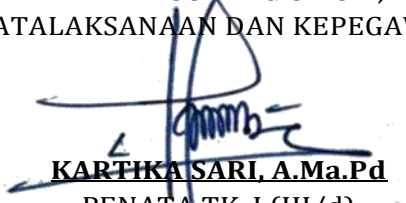
Pihak kedua

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2025

PIHAK KEDUA,
KEPALA SUBBAG UMUM,
KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN



KARTIKA SARI, A.Ma.Pd
PENATA TK. I (III/d)
NIP.197205191993062001

PIHAK PERTAMA,
PENATA KELOLA SISTEM DAN
TEKNOLOGI INFORMASI



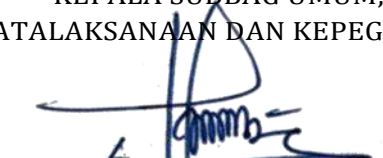
SRI BUDIARTI,SE
PENATA TK. I (III/d)
NIP. 198205222001122002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Melaksanakan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12
2	Membuat Perjanjian Kinerja dan IKI dan membuat SKP Bulanan dan Tahunan	Jumlah PK, IKI dan SKP	Dokumen / Laporan	15
3	Melakukan pembaharuan data pada Aplikasi My.ASN , SIMPEG, Bangkom dan menginput data SIPD, Coretax	Jumlah data	Data	15
4	Mengikuti Peningkatan Kapasitas ASN baik secara luring atau daring	Jumlah Jam Pelajaran	JP	20
5	Membuat SOP Umum Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	Jumlah SOP	SOP	7
6	Membuat, menelaah, memverifikasi serta memproses Naskah Dinas melalui aplikasi SRIKANDI	Jumlah Naskah Dinas yang terselesaikan	Naskah	20
7	Membuat Kertas Kerja Manajemen Resiko Sub Kegiatan per triwulan	Jumlah Kertas Kerja Manajemen Resiko yang terselesaikan	Kerta Kerja	4
8	Melakukan input data pelaksanaan sub kegiatan pada aplikasi E-Pantau	Jumlah data terinput	Data	12
9	Melaksanakan GEMA	Jumlah Laporan GEMA	Laporan	12
10	Melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan baik lisan maupun tertulis	Persentase tugas yang terselesaikan	Persen	100

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2025

PIHAK KEDUA,
 KEPALA SUBBAG UMUM,
 KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN


KARTIKA SARI, A.Ma.Pd
 PENATA TK. I (III/d)
 NIP.197205191993062001

PIHAK PERTAMA,
 PENATA KELOLA SISTEM DAN
 TEKNOLOGI INFORMASI

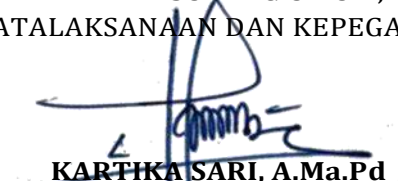

SRI BUDIARTI,SE
 PENATA TK. I (III/d)
 NIP. 198205222001122002

**SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 148.651.000,00	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp 1.890.408.300,-	APBD

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2025

PIHAK KEDUA,
KEPALA SUBBAG UMUM,
KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN


KARTIKA SARI, A.Ma.Pd
PENATA TK. I (III/d)
NIP.197205191993062001

PIHAK PERTAMA,
PENATA KELOLA SISTEM DAN
TEKNOLOGI INFORMASI


SRI BUDIARTI,SE
PENATA TK. I (III/d)
NIP. 198205222001122002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. SOPIAN NUR**

Jabatan : **PENGADMINISTRASI PERKANTORAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **KARTIKA SARI, A.Ma.,Pd**

Jabatan : **KASUBBAG UMUM KETATALAKSANAAN DAN
KEPEGAWAIAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.

4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 05 Januari 2026

Pihak Kedua,
Kasubbag Umum Ketatalaksanaan
dan Kepegawaian



KARTIKA SARI, A.Ma.,Pd
PENATA TK. I (III/d)
NIP.198101122025212017

Pihak Pertama,
Pengadministrasi Perkantoran



M. SOPIAN NUR
PENGATUR MUDA - V
NIPPPK. 198602282025211048

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
SUB. BAGIAN UMUM KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

A. KINERJA UTAMA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Pelayanan Front Office dan membuat laporan setiap kali bertugas	Terlaksananya Jumlah Front Office dan membuat laporan setiap kali bertugas	Laporan/ Dokumentasi	12
2	Menyiapkan Ruang Rapat , Fasilitas ruang rapat dan membuat laporan perminggu dan perbulan	Jumlah Laporan Fasilitas ruang rapat dan membuat laporan perminggu dan perbulan	Laporan/ Dokumentasi	12
3	Menyiapkan Perlengkapan dan peralatan persiapan Apel Pagi , dan indonesia raya	Jumlah Laporan Perlengkapan dan peralatan persiapan Apel Pagi , dan indonesia raya	Laporan/ Dokumentasi	12
4	Dokumentasi setiap kegiatan sebagai laporan kepada pimpinan	Jumlah Laporan Dokumentasi setiap kegiatan sebagai laporan kepada pimpinan	Laporan/ Dokumentasi	12
5	Penataan Usahaan Arsip	Persentase penyusunan arsip di setiap rak/lemari arsip	Persen	100
6	Melakukan Update data ASN ke aplikasi Simpeg, My ASN yang memastikan semua data terupdate	Terlaksannanya Update data ASN ke aplikasi Simpeg, My ASN yang memastikan semua data terupdate	Persen	100

7	Tersusunnya Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Individu (IKI) dan Pengukuran Kinerja	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Individu (IKI) dan Pengukuran Kinerja yang tersusun	Dokumen	2
8	Membuat Dokumen SKP Bulanan dan Final	Jumlah Dokumen Penilaian Berjenjang atas Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Setiap Bulan & Final yang tersusun	Dokumen	13
9	Melaksanakan dan membuat laporan Gema	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Dokumentasi/ Laporan	12
10	Melaksanakan tugas sesuai arahan pimpinan	Terlaksana Tugas Sesuai Arahan Pimpinan (Apel Pagi/Apel Gabungan)	Dokumentasi/ Laporan	11

Pihak Kedua,
Kasubbag Umum Ketatalaksanaan
dan Kepegawaian


KARTIKA SARI, A.Ma.,Pd
PENATA TK. I (III/d)
NIP.198101122025212017

Pihak Pertama,
Pengadministrasi Perkantoran


M. SOPIAN NUR
PENGATUR MUDA - V
NIPPPK. 198602282025211048



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **LENI WATY, S.Sos**
Jabatan : PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI
INFORMASI

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **KARTIKA SARI, A.Ma.Pd**
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM KETATALAKSANAAN
DAN KEPEGAWAIAN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.

4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak Kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 05 Januari 2026

Pihak Kedua,
**Kepala Sub Bagian Umum
Ketatalaksanaan dan Kepegawaian**



KARTIKA SARI, A.Ma.Pd
PENATA TINGKAT I (III/d)
NIP. 19720519 199306 2 001

Pihak Pertama,
**Penata Kelola Sistem dan Teknologi
Informasi**



LENI WATY, S.Sos
PENATA MUDA TINGKAT I (III/b)
NIP. 19760404 200701 2 017

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Tersusunnya SOP Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta SOP Sub Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah SOP Sub Kegiatan yang tersusun	Dokumen	2
2	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	1
3	Terfasilitasinya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	98
4	Tersusunnya dokumen administrasi SAKIP rapat evaluasi pertriwulan Sekretariat (Undangan Rapat, Absen, Notulen Dokumentasi)	Jumlah Dokumen SAKIP yang tersusun	Dokumen	4
5	Tersusunnya Dokumen Kelengkapan Administrasi Penggunaan Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Dokumen Kelengkapan Adm Penggunaan Anggaran yang Tersusun	Dokumen	504
6	Tersusunnya Laporan Kegiatan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Dinas PMD	Jumlah Laporan Gratifikasi yang tersusun	Laporan	1
7	Terinputnya Data Pelaksanaan Sub	Jumlah Data Pelaksanaan Sub Kegiatan yang	Data	24

	Kegiatan pada Aplikasi E-Pantau	Terinput pada Aplikasi E-Pantau		
8	Tersusunnya naskah dinas melalui Aplikasi Srikandi	Jumlah Naskah Dinas yang tersusun	Naskah	36
9	Tersusunnya Dokumen Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Manajemen Resiko yang tersusun	Dokumen	8
10	Terlaksananya update data ASN pada aplikasi SIMPEG dan My ASN	Persentase terlaksananya update Data ASN pada aplikasi SIMPEG dan My ASN	Persen	100
11	Tersusunnya Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Individu dan Pengukuran APBD dan APBDP Tahun Anggaran 2026	Jumlah Dokumen PK,IKI dan Pengukuran yang tersusun	Dokumen	6
12	Tersusunnya Dokumen Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) setiap bulan dan Tahunan (Final)	Jumlah Dokumen Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) setiap bulan dan Tahunan (Final) yang tersusun	Dokumen	13
13	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan GEMA Individu	Laporan	12
14	Melaksanakan Tugas Lain Sesuai Arah-an Pimpinan	Persentase terlaksananya tugas lain sesuai arahan pimpinan	Persen	100
15	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas ASN	Jumlah JP Peningkatan Kapasitas ASN yang terlaksanakan	JP	20
16	Terinputnya Data Arsip urusan Umtalpeg pada format excel kearsipan	Jumlah Data Arsip yang Terinput	Data	120
17	Terlaksananya Input Lapotan SPT tahunan Pada Aplikasi Coretax	Jumlah Laporan SPT Tahunan yang terinput	Laporan	1

SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	KEGIATAN / SUB KEGIATAN*	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000	APBD
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75.000.000	APBD
JUMLAH ANGGARAN		90.000.000	

Kutai Kartanegara, 05 Januari 2026

Pihak Kedua,
Kepala Sub Bagian Umum
Ketatalaksanaan dan Kepegawaian



KARTIKA SARI, A.Ma.Pd
PENATA TINGKAT I (III/d)
NIP. 19720519 199306 2 001

Pihak Pertama,
Penata Kelola Sistem dan Teknologi
Informasi



LENI WATY, S.Sos
PENATA MUDA TINGKAT I (III/b)
NIP. 19760404 200701 2 017



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **IKE NORALITA .,S.Pd.,MS.i**
Jabatan : **PENATA KELOLA SISTEM TEKNOLOGI DAN INFORMASI**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **KARTIKA SARI, A.Ma.Pd**
Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN UMUM KETATALAKSANAAN
DAN KEPEGAWAIAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.

4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak Kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

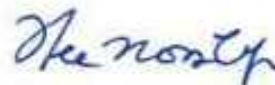
Kutai Kartanegara, 2026

Pihak Kedua,
**KEPALA SUBBAGIAN
UMUM, KETATALAKSANAAN DAN
KEPEGAWAIAN**



KARTIKA SARI, A.Ma.Pd
PENATA TK.1/IIIid
NIP.197205191993062001

Pihak Pertama,
**PENATA KELOLA SISTEM TEKNOLOGI DAN
INFORMASI**



IKE NORALITA SPd.,MSi
PEMBINA /IVa
NIP. 198307092009022005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Tersusunnya SOP Pelaksanaan Sistem Pemerintah berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen SOP Pelaksanaan Sistem Pemerintah berbasis Elektronik pada SKPD Yang Tersusun	1	Dokumen
2	Tersusunnya SOP Penyusunan SKM	Jumlah Dokumen SOP Penyusunan SKM	1	Dokumen
3	Tersusunnya SOP SP4N Lapor	Jumlah Dokumen SOP SP4N LAPOR	1	Dokumen
4	Tersusunnya PPID	Jumlah Laporan PPID tersusun	1	Laporan
5	Terlaksananya Sub Keg. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Sub Keg. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4	Dokumen
6	Terlaksananya Laporan Sub Keg. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Laporan Sub Keg. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	13	Laporan
7	Tersusunnya Laporan SKM	Jumlah laporan SKM yang tersusun	1	Laporan
8.	Tersusunnya Naskah Dinas Melalui Aplikasi Srikandi	Jumlah Naskah Dinas Yang tersusun Melalui Aplikasi Srikandi	Naskah Dinas	48
9.	Terlaksananya Input Data Pelaksanaan 2 (Dua) Sub Kegiatan pada Aplikasi E-Pantau NG	Jumlah Data Pelaksanaan Sub Kegiatan yang terinput pada Aplikasi c-Pantau NG	Data	24
10.	Tersusunnya Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Jumlah Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang tersusun	Dokumen	1
11	Tersusunnya Perjanjian Kinerja	Jumlah Perjanjian Kinerja	1	Dokumen
12	Tersusunnya SKP Bulanan dan Final	Jumlah SKP Bulanan dan Final	13	Dokumen

13	Melaksanakan dan membuat laporan Gema	Jumlah Laporan GEMA	12	Laporan
14.	Terinputnya Data Laporan Pajak Tahunan pada Aplikasi Coretax	Jumlah Laporan Pajak Tahunan pada Aplikasi Coretax	Laporan	1

Kutai Kartanegara, 2026

Pihak Kedua,
**KEPALA SUBBAGIAN
UMUM, KETATALAKSANAAN DAN
KEPEGAWAIAN**



KARTIKA SARI, AMa.Pd
PENATA TK. I/III d
NIP. 197205191993062001

Pihak Pertama,
**PENATA KELOLA SISTEM TEKNOLOGI DAN
INFORMASI**



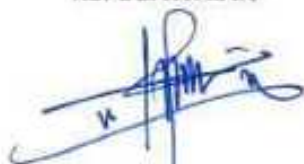
IKE NORALITA SPd., MSi
PEMBINA / IVa
NIP. 198307092009022005

**SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN*	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Dukungan Sistem Pelaksanaan Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	RP.420.000.000,-	APBD
JUMLAH ANGGARAN		RP.420.000.000,-	

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
KEPALA SUBBAGIAN
UMUM, KETATALAKSANAAN DAN
KEPEGAWAIAN



KARTIKA SARI, AMa.Pd
PENATA/TK.1/III d
NIP.197205191993062001

Pihak Pertama,
PENATA KELOLA SISTEM TEKNOLOGI DAN
INFORMASI



IKE NORALITA SPd., MSi
PEMBINA /IVa
NIP. 198307092009022005



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DENI SINATA**

Jabatan : **PENGADMINISTRASI PERKANTORAN**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **KARTIKA SARI, A.Ma.Pd**

Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN UMUM KETATALAKSANAAN
DAN KEPEGAWAIAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.

4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak Kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 05 Januari 2026

Pihak Kedua
Kasubbag Umum Ketatalaksanaan
dan Kepegawaian



KARTIKA SARI, A.Ma.Pd

PENATA TK. I (III/d)

NIP.19720519 199306 2 001

Pihak Pertama
Pengadministrasi Perkantoran



DENI SINATA

NIP. 19820608 200902 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Terisi dan terbuatnya SKP Bulanan dan Tahunan pada Aplikasi E Kinerja	Jumlah SKP Bulanan dan Tahunan pada Aplikasi E Kinerja	Laporan	12
2	Tersusunnya Roadmap dan Rencana Aksi Implementasi Nilai dasar ASN Berakhlak	Jumlah Roadmap dan Rencana Aksi Implementasi Nilai dasar ASN Berakhlak	Laporan	2
3	Tersusunnya Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Individu (IKI) dan Pengukuran Kinerja	Terbuatnya PK, IKI Bulanan dan Tahunan	Laporan	2
4	Terlaksanakannya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" Individu	Laporan	12
5.	Terlaksananya Laporan Kegiatan Unit Pengendalian Gratifikasi pada dinas PMD	Jumlah Laporan Kegiatan Unit Pengendalian Gratifikasi pada dinas PMD	Laporan	2
6.	Terlaksananya apel pagi DPMD dan Apel gabungan	Terlaksananya apel pagi DPMD dan Apel gabungan	Laporan	12
7.	Terlaksananya Laporan Operasional Gedung E DPMD	Jumlah Laporan Operasional Gedung E DPMD	Laporan	12
8.	Terlaksananya Administrasi data Laporan Kinerja ASN (SKP,PK,IKI DPMD dalam bentuk Arsip Digital	Jumlah Administrasi data Laporan Kinerja ASN (SKP,PK,IKI DPMD dalam bentuk Arsip Digital	Laporan	12
9.	Melakukan Update Data ASN ke Aplikasi Simpeg,MyASN (Updata Data Mandiri)	Jumlah Melakukan Update Data ASN ke Aplikasi Simpeg,MyASN (Updata Data Mandiri)	Data	8
10.	Terlaksananya Bahan dan data laporan input E Pantau	Jumlah Bahan dan data laporan input E Pantau	Laporan	12

11.	Terlaksananya Penataan Arsip Dinamis	Jumlah Tata Kelola Arsip Dinamis	Laporan	12
12.	Terlaksananya Input Data SPT Tahunan pada Aplikasi Cortex	Jumlah Input Data SPT Tahunan pada Aplikasi Cortex	Laporan	11

Kutai Kartanegara, 05 Januari 2026

Pihak Kedua
Kasubbag Umum Ketatalaksanaan
dan Kepegawaian



KARTIKA SARI, A.Ma.Pd
PENATA TK. I (III/d)
NIP.197205191993062001

Pihak Pertama
Pengadministrasi Perkantoran



DENI SINATA
NIP. 19820608 200902 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MEIDY FERNANDA, S.E, M.Si**
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **KARTIKA SARI, A.Ma.Pd**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja) jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Sub Bagian Umum Ketatalaksanaan dan Kepegawaian;
2. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
3. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik;
4. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi;
5. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data;
6. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data;

7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

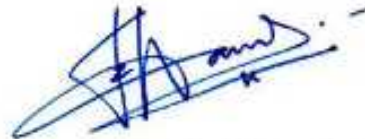
Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
Kepala Sub Bagian Umum,
Ketatalaksanaan dan Kepegawaian



KARTIKA SARI, A.Ma.Pd
Penata Tingkat I
NIP. 19720519 199306 2 001

Pihak Pertama,
Penelaah Teknis Kebijakan,



MEIDY FERNANDA, S.E, M.Si
Pembina
NIP. 19720523 200112 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Tersusunnya Dokumen SKP dan Penilaian Berjenjang (Bulanan dan Tahunan)	Jumlah Dokumen SKP dan Penilaian Berjenjang (bulanan dan tahunan) yang tersusun	Dokumen	13
2	Tersusunnya Laporan Manajemen Risiko per Triwulan	Jumlah Laporan Manajemen Resiko yang tersusun	Laporan	4
3	Terlaksananya penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) OPD	Jumlah Laporan RKBU perangkat daerah yang tersusun	Laporan	1
4	Terlaksananya Update Data di Aplikasi MyASN dan SIMPEG	Persentase Update Data di Aplikasi MyASN dan SIMPEG	Persen	100
5	Terfasilitasinya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3
6	Terlaksananya Input Data Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada Aplikasi e-Pantau	Jumlah Data yang Diinput pada Aplikasi e-Pantau	Data	12
7	Tersusunnya Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Individu (IKI) dan Pengukuran ASN	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Individu (IKI) dan Pengukuran ASN yang tersusun	Dokumen	6
8	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Jumlah Laporan pelaksanaan GEMA	Laporan	12
9	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan serta Laporan Akhir Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan serta Laporan Akhir yang tersusun	Laporan	13
10	Terinputnya Laporan SPT Tahunan di Aplikasi CORETAX	Jumlah Laporan yang terinput	Laporan	1

11	Tersusunnya Laporan Roadmap dan Rencana Aksi implementasi nilai dasar ASN BerAKHLAK	Jumlah Laporan yang tersusun	Laporan	1
12	Terhimpunnya data untuk Laporan Kegiatan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Dinas PMD	Jumlah Laporan yang tersusun	Laporan	1
13	Tersusunnya Dokumen SOP Penyusunan RKBU DPMD dan SOP Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Dokumen yang tersusun	Dokumen	2

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
Kepala Sub Bagian Umum,
Ketatalaksanaan dan Kepegawaian



KARTIKA SARI, A.Ma.Pd
Penata Tingkat I
NIP. 19720519 199306 2 001

Pihak Pertama,
Penelaah Teknis Kebijakan



MEIDY FERNANDA, S.E, M.Si
Pembina
NIP. 19720523 200112 1 001

**KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

No	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Anggaran	Ket
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 92.977.500	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp 92.977.500	

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
Kepala Sub Bagian Umum,
Ketatalaksanaan dan Kepegawaian



KARTIKA SARI, A.Ma.Pd
Penata Tingkat I
NIP. 19720519 199306 2 001

Pihak Pertama,
Penelaah Teknis Kebijakan



MEIDY FERNANDA, S.E, M.Si
Pembina
NIP. 19720523 200112 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **TITIEN KUSUMAWATI**
Jabatan : **PENGOLAH DATA DAN INFORMASI**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **KARTIKA SARI, A.Ma.Pd**
Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara
Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.

3. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

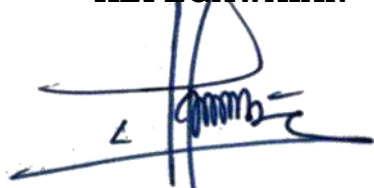
1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 05 Januari 2026

Pihak Kedua,

**KEPALA SUB BAGIAN UMUM,
KETATALAKSANAAN DAN
KEPEGAWAIAN**



KARTIKA SARI, A.Ma.Pd
Penata Tingkat I
NIP. 197205191993062001

Pihak Pertama,

PENGOLAH DATA DAN INORMASI



TITIEN KUSUMAWATI
Pengatur Tingkat I
NIP. 198012062007012005

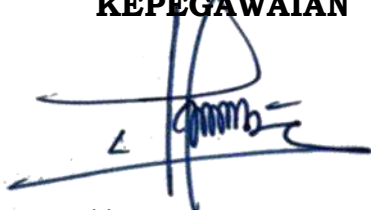
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Menghimpun, mengusulkan dan memproses Berkas Usul Kenaikan Pangkat	Jumlah ASN kenaikan pangkat	Orang	10
2	Menghimpun, mengusulkan dan memproses Berkas Usul Kenaikan Gaji Berkala (KGB)	Jumlah ASN Usul Kenaikan Gaji Berkala (KGB)	Orang	34
3	Menghimpun, mengusulkan dan memproses Berkas Usul Berkas Pensiun	Jumlah Usul Pensiun ASN	Orang	2
4	Memproses berkas Usul Penghargaan Satyalancana Karya Satya	Jumlah Usul Penghargaan Satyalancana Karya Satya	Orang	10
5	Melaksanakan Gerakan Etam Mengaji (GEMA), Apel Pagi, Apel Gabungan, Peningkatan Kapasitas ASN, Penugasan Atasan di Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan “Gerakan Etam Mengaji” (GEMA), Apel Pagi, Apel Gabungan, Peningkatan Kapasitas ASN, Penugasan Atasan	Laporan	30
6	Membuat perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Individu, SKP	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Individu, SKP	Dokumen	15
7	Memproses Laporan Hukuman Disiplin ASN DPMD	Jumlah Laporan Hukuman Disiplin	Laporan	12
8	Melakukan proses penginputan dokumen di SRIKANDI	Jumlah Dokumen pada aplikasi SRIKANDI	Dokumen	50

9	Mengelola File Personal ASN DPMD (berkas fisik/digital)	Jumlah Data ASN	Data	145
---	---	-----------------	------	-----

Kutai Kartanegara, 05 Januari 2026

Pihak Kedua,
**KEPALA SUB BAGIAN UMUM,
KETATALAKSANAAN DAN
KEPEGAWAIAN**



KARTIKA SARI, A.Ma.Pd
Penata Tingkat I
NIP. 197205191993062001

Pihak Pertama,

PENGOLAH DATA DAN INFORMASI



TITIEN KUSUMAWATI
Pengatur Tingkat I
NIP. 198012062007012005



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Hj.BUSTANIAH, S.Sos**
Jabatan : PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **KARTIKA SARI, A.Ma.Pd**
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM KETATALAKSANAAN
DAN KEPEGAWAIAN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan

akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.

4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak Kedua: Terlaksananya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;

2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
**KASUBAG UMUM,
KETATALAKSANAAN DAN
KEPEGAWAIAN**



(KARTIKA SARI, A.MA.Pd)
PENATA TK.I / III D
NIP. 19720519 199306 2 001

Pihak Pertama,
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN



(Hj. BUSTANIAH, S.Sos)
PENATA TK.I / III D
NIP. 19690127 200502 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Terfasilitasinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	33
2.	Terfasilitasinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan serta Laporan Akhir Sub Kegiatan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Laporan	13
3.	Terlaksananya Gerakan Etam Mengaji (GEMA)	Jumlah Laporan GEMA individu	Laporan	12
4.	Terlaksananya Apel Pagi/Gabungan	Persentase Terlaksananya Apel	Persen	100
5.	Tersusunnya SOP Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Dokumen SOP yang tersusun	Dokumen	1
6.	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas ASN	Jumlah JP Peningkatan Kapasitas ASN	JP	20
7.	Tersusunnya Naskah Dinas melalui Aplikasi Srikandi	Jumlah data pada aplikasi Srikandi	Data	15
8.	Tersedianya Data Penatausahaan Arsip	Jumlah arsip yang dikelola	Arsip	25
9.	Terlaksananya Input data pada aplikasi E-Pantau	Jumlah data yang terinput pada aplikasi epantau	Data	12
10.	Tersusunnya Dokumen Kinerja Pelaksana	Tersusunnya Dokumen PK, IKI, dan	Dokumen	6

	(Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Individu, dan Sasaran Kinerja Pegawai dan Penilaian Sasaran Kerja	Pengukuran		
11.	Tersusunnya Dokumen Kinerja Pelaksana (Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Individu, dan Sasaran Kinerja Pegawai dan Penilaian Sasaran Kerja	Jumlah Dokumen SKP dan Penilaian Berjenjang yang tersusun	Dokumen	13
12.	Terinputnya Data Laporan Pajak Tahunan pada Aplikasi Coretax	Jumlah Laporan Pajak Tahunan	Laporan	1
13.	Terlaksananya Update Data ASN pada Aplikasi My ASN dan Simpeg	Persentase Terlaksananya Update Data ASN pada Aplikasi My ASN dan Simpeg	Persen	100
14.	Tersusunnya Laporan Manajemen Resiko Umtalpeg	Persentase penyusunan Laporan Manajemen Resiko Umtalpeg	Persen	100

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
**KASUBAG UMUM,
 KETATALAKSANAAN DAN
 KEPEGAWAIAN**

(KARTIKA SARI, A.Ma.Pd)
 PENATA TK.I / III D
 NIP. 19720519 199306 2 001

Pihak Pertama,
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN

(Hj. BUSTANIAH, S.Sos)
 PENATA TK.I / III D
 NIP. 19690127 200502 2 002

**KEGIATAN / SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN*	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.000.000,-	APBD
JUMLAH ANGGARAN		100.000.000,-	

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
Kepala Sub Bagian Umum,
Ketatalaksanaan dan Kepegawaian



KARTIKA SARI, A.Ma.Pd
Penata Tingkat I
NIP. 19720519 199306 2 001

Pihak Pertama,
Penelaah Teknis Kebijakan



Hj. BUSTANIAH, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19690127 200502 2 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YENI KANIAWATI, SE**
Jabatan : PENELAAH TEKHNIS KEBIJAKAN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **KARTIKA SARI, A.Ma.Pd**
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM KETATALAKSANAAN
DAN KEPEGAWAIAN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.

4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak Kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua
Kasubbag Umum Ketatalaksanaan
dan Kepegawaian



KARTIKA SARI, A.Ma.Pd
PENATA TINGKAT I (III/d)
NIP.19720519 199306 2 001

Pihak Pertama
Penelaah Tekhnis Kebijakan



YENI KANIAWATI, SE
PENATA TINGKAT I (III/d)
NIP. 197603191996032002

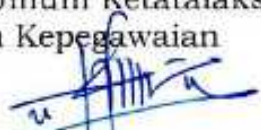
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	Paket	1
2	Tersedianya Barang dan Penggandaan Cetak	Jumlah Paket Barang dan Penggandaan Yang Disediakan	Paket	1
3	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Serta Laporan Akhir Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Laporan Yang tersusun	Laporan	13
4	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Serta Laporan Akhir Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Laporan Yang tersusun	Laporan	13
5	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" Perangkat Daerah	Laporan	12
6.	Tersusunnya Dokumen SOP Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, SOP Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan serta SOP Penyusunan Laporan MR Sub Umtalpeg	Jumlah Dokumen Yang Tersusun	Dokumen	3
7.	Tersusunnya Laporan Manajemen Resiko Umum Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	Jumlah Laporan Manajemen Risiko Yang tersusun	Laporan	4
8.	Tersusunnya Naskah Dinas Melalui Aplikasi Srikandi	Jumlah Naskah Dinas Yang tersusun Melalui Aplikasi Srikandi	Naskah Dinas	48

9.	Terlaksananya Input Data Pelaksanaan 2 (Dua) Sub Kegiatan pada Aplikasi E-Pantau NG	Jumlah Data Pelaksanaan Sub Kegiatan yang terinput pada Aplikasi e-Pantau NG	Data	24
10.	Tersusunnya Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Jumlah Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang tersusun	Dokumen	1
11.	Tersusunnya Dokumen Penilaian Berjenjang Setiap Bulan dan tahunan	Jumlah Dokumen Penilaian Berjenjang Setiap Bulan dan tahunan yang tersusun	Dokumen	13
12.	Tersusunnya Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Individu (IKI) dan Pengukuran Kinerja	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Individu (IKI) dan Pengukuran Kinerja yang tersusun	Dokumen	6
13.	Terlaksananya Update Data ASN pada Aplikasi My ASN dan Simpeg serta input data pada Aplikasi SIPD	Persentase Terlaksananya Update Data ASN pada Aplikasi My ASN dan Simpeg serta Input Data pada Aplikasi SIPD	Persen	100
14.	Terinputnya Data Laporan Pajak Tahunan pada Aplikasi Coretax	Jumlah Laporan Pajak Tahunan pada Aplikasi Coretax	Laporan	1
15.	Terlaksananya Peningkatan kapasitas ASN	Jumlah JP Peningkatan kapasitas ASN	JP	20
16.	Terlaksananya entri data arsip urusan Umtalpeg pada format exel	Jumlah Data arsip yang terentri	Data	120

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua
Kasubbag Umum Ketatalaksanaan
dan Kepegawaian



KARTIKA SARI, A.Ma.Pd
PENATA TINGKAT I (III/d)
NIP.197205191993062001

Pihak Pertama
Penelaah Tekhnis Kebijakan



YENI KANAWATI, SE
PENATA TINGKAT I (III/d)
NIP. 197603191996032002

**SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN *	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	150.746.250	APBD
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	38.033.550	APBD
Jumlah Anggaran		188.779.800	

Pihak Kedua
Kasubbag Umum Ketatalaksanaan
dan Kepegawaian



KARTIKA SARI, A.Ma.Pd
PENATA TINGKAT I (III/d)
NIP.197205191993062001

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Pertama
Penelaah Tekhnis Kebijakan



YENI KANAWATI, SE
PENATA TINGKAT I (III/d)
NIP. 197603191996032002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ABU YAZID**

Jabatan : **PENGADMINISTRASI PERKANTORAN**

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **KARTIKA SARI, A.Ma.Pd**

Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN UMUM
KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.

4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak Kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 05 Januari 2026

Pihak Kedua
Kasubbag Umum Ketatalaksanaan
dan Kepegawaian



KARTIKA SARI, A.Ma.Pd

PENATA TK. I (III/d)

NIP.19720519 199306 2 001

Pihak Pertama
Pengadministrasi Perkantoran



ABU YAZID

PENGATUR TK. I (II/d)

NIP. 19821101 200801 1 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Tersusunnya Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (Detil SKP)	Jumlah Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (Detil SKP) yang tersusun	Dokumen	1
2	Tersusunnya Dokumen Penilaian Berjenjang Setiap Bulan	Jumlah Dokumen Penilaian Berjenjang Setiap Bulan yang tersusun	Dokumen	13
3	Tersusunnya Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Individu (IKI) dan Pengukuran Kinerja	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Individu (IKI) dan Pengukuran Kinerja yang tersusun	Dokumen	6
4	Terlaksanakannya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" Individu	Laporan	12
5.	Terlaksananya Pengolahan dokumentasi Publik berupa foto dan vidio kegiatan DPMD	Persentase Pengolahan dokumentasi Publik berupa foto dan vidio kegiatan DPMD	Persen	100
6.	Terlaksananya kegiatan mendampingi tugas pimpinan	Persentase kegiatan mendampingi tugas pimpinan yang terlaksanakan	Persen	100
7.	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas ASN	Jumlah JP Peningkatan Kapasitas ASN	JP	20
8.	Terlaksananya tugas Front Office	Jumlah Laporan pelaksanaan tugas Front Office	Laporan	12
9.	Terlaksananya Input Data SPT Tahunan pada Aplikasi Coretaxe	Jumlah Bukti Laporan SPT Tahunan	Laporan	1
10.	Terlaksananya Update data ASN pada aplikasi Simpeg dan My ASN	Persentase Update data ASN	Persen	100

Kutai Kartanegara, 05 Januari 2026

Pihak Kedua
Kasubbag Umum Ketatalaksanaan
dan Kepegawaian

Pihak Pertama
Pengadministrasi Perkantoran


KARTIKA SARI, A.Ma.Pd

PENATA TK. I (III/d)
NIP.19720519 199306 2 001


ABU YAZID

PENGATUR TK. I (II/d)
NIP. 19821101 200801 1 010



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **YUSRAN HANANI, S.Sos**

Jabatan : **PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **DEDY SURYANTO, SE**

Jabatan : **KEPALA BIDANG KERJA SAMA DESA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Bidang Kerjasama Desa yang saya pimpin;
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.

4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.


Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 05 Januari 2026

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG KERJA SAMA
DESA**


DEDY SURYANTO, SE
Pembina (IV/A)
NIP. 19711112 199703 1 005

Pihak Pertama,
**PENATA KELOLA SISTEM DAN
TEKNOLOGI INFORMASI**


YUSRAN HANANI, S.Sos
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19750730 199803 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Prosentase Realisasi Kesepakatan Kerjasama Desa	Persen	100
2	Terfasilitasinya kerjasama antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	4
3	Terwujudnya organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Nilai	45
4	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan	Persen	100
5	Terwujudnya pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan	Tingkat keterisian Data Prioritas Tahunan	Persen	100
6	Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100
7	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% setiap bulan dan SKP Final tahunan	Persen	100

8	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	12
---	---	--	---------	----

**KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Rp. -	APBD
1	Fasilitasi Kerja sama antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Rp. -	APBD
	JUMLAH ANGGARAN	Rp. -	APBD

Kutai Kartanegara, 05 Januari 2026

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG KERJA SAMA
DESA**


DEDY SURYANTO, SE

Pembina (IV/A)

NIP. 19711112 199703 1 005

Pihak Pertama,
**PENATA KELOLA SISTEM DAN
TEKNOLOGI INFORMASI**


YUSRAN HANANI, S.Sos

Penata Tingkat I (III/d)

NIP. 19750730 199803 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RUSLINA**

Jabatan : **PENGADMINISTRASI PERKANTORAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **DEDY SURIANTO, SE**

Jabatan : **KEPALA BIDANG KERJA SAMA DESA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Bidang Kerjasama Desa yang saya pimpin;
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.

5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.


Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG KERJA SAMA
DESA**


DEDY SURIANTO, SE
Pembina (IV/A)
NIP. 19711112 199703 1 005

Pihak Pertama,
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN


RUSLINA
Pengatur T.I -(II/d)
NIP. 19741122 200701 2019

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Prosentase Realisasi Kesepakatan Kerjasama Desa	Persen	100
2	Terfasilitasinya Pembentukan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen	5
3	Tercapainya organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Nilai	45
4	Tersusunnya Dokumen Manajemen Risiko PD	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan	Persen	100
5	Terkelolanya data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan	Tingkat keterisian Data Prioritas Tahunan	Persen	100
6	Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100
7	Terlaksananya Tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% setiap bulan dan SKP Final tahunan	Persen	100
8	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	12

**KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Rp. -	APBD
1	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Rp. -	APBD
	JUMLAH ANGGARAN	Rp. -	APBD

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG KERJA SAMA
DESA**


DEDY SURIANTO, SE

Pembina (IV/A)
NIP. 19711112 199703 1 005

Pihak Pertama,
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN


RUSLINA

Pengatur T.I -(II/d)
NIP. 19741122 200701 2019



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SARI ULFAH**
Jabatan : **PENGADMINISTRASI PERKANTORAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **DEDY SURIANTO, SE**
Jabatan : **KEPALA BIDANG KERJA SAMA DESA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Bidang Kerjasama Desa yang saya pimpin;
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan

pengambilan kebijakan yang berbasis data.

5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 05 Januari 2026

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG KERJA SAMA
DESA**


DEDY SURIANTO, SE

Pembina (IV/a)
NIP. 19711112 199703 1 005

Pihak Pertama,
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN


SARI ULFAH

Pengatur Tingkat I (II/d)
NIP. 19790101 200701 2 044

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Program Peningkatan Urusan Kerjasama Desa	Prosentase Realisasi Kesepakatan Kerjasama Desa	Persen	100
2	Terfasilitasinya Kerjasama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	8
5	Terwujudnya organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Nilai	45
6	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan	Persen	100
7	Terwujudnya pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan	Tingkat keterisian Data Prioritas Tahunan	Persen	100
8	Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100
9	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% setiap bulan dan SKP Final tahunan	Persen	100


10	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	12
----	---	--	---------	----

**KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Rp. -	APBD
1	Fasilitasi Kerja sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Rp. -	APBD
	JUMLAH ANGGARAN	Rp. -	APBD

Kutai Kartanegara, 05 Januari 2026

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG KERJA SAMA
DESA**


DEDY SURIANTO, SE
Pembina (IV/a)
NIP. 19711112 199703 1 005

Pihak Pertama,
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN


SARI ULFAH
Pengatur Tingkat I (II/d)
NIP. 19790101 200701 2 044



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **BURHANUDDIN, SE**

Jabatan : **PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **DEDY SURIANTO, SE**

Jabatan : **KEPALA BIDANG KERJA SAMA DESA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Bidang Kerjasama Desa yang saya pimpin;
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan

pengambilan kebijakan yang berbasis data.

5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.


Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).


Kutai Kartanegara, 05 Januari 2026

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG KERJA SAMA
DESA**


DEDY SURIANTO, SE
Pembina (IV/A)

NIP. 19711112 199703 1 005

Pihak Pertama,
**PENATA KELOLA SISTEM DAN
TEKNOLOGI INFORMASI**


BURHANUDDIN, SE
Penata TK.I (III/d)
NIP. 196909092001121003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Terlaksananya Program Peningkatan Kerjasama Desa	Prosentase Realisasi Kesepakatan Kerjasama Desa	Persen	100
2	Terlaksananya Kerjasama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	8
3	Terlaksananya organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Nilai	45
4	Terlaksananya Dokumen Manajemen Risiko PD	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan	Persen	100
5	Terlaksananya pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan	Tingkat keterisian Data Prioritas Tahunan	Persen	100
6	Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100
7	Terlaksananya Tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% setiap bulan dan SKP Final tahunan	Persen	100

8	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	12
---	---	--	---------	----

**KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Rp. -	APBD
1	Fasilitasi Kerja sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Rp. -	APBD
	JUMLAH ANGGARAN	Rp. -	APBD

Kutai Kartanegara, 05 Januari 2026

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG KERJASAMA
DESA**

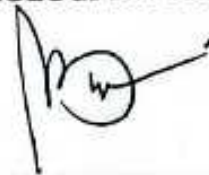


DEDY SURYANTO, SE

Pembina (IV/A)

NIP. 19711112 199703 1 005

Pihak Pertama,
**PENATA KELOLA SISTEM DAN
TEKNOLOGI INFORMASI**



BURHANUDDIN, SE

Penata TK.I (III/d)

NIP. 196909092001121003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SURIADY AGUS Dj.**

Jabatan : **PENGADMINISTRASI PERKANTORAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **DEDY SURYANTO, SE**

Jabatan : **KEPALA BIDANG KERJA SAMA DESA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Bidang Kerjasama Desa yang saya pimpin;
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.

5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG KERJA SAMA DESA



DEDY SURYANTO, SE
Pembina (IV/A)
NIP. 19711112 199703 1 005

Pihak Pertama,
Pengadministrasi Perkantoran



SURIADY AGUS Dj
Pengatur Tingkat I / II/d
NIP. 19720909 200604 1 018

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Prosentase Realisasi Kesepakatan Kerjasama Desa	Persen	100
2	Terfasilitasinya kerjasama antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	4
3	Terwujudnya organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Nilai	45
4	Tersedianya Dokumen Kelengkapan SAKIP Bidang Kerjasama Desa	Terkelolanya Dokumen Kelengkapan SAKIP pada Bidang Kerjasama Desa	Persen	100
5	Terlaksannya Gerakan Etam Mengaji GEMA Bidang Kerjasama Desa	Terwujudnya Gerakan Etam Mengaji (GEMA) di Bidang Kerjasama	Laporan	12
6	Terpenuhinya Penilaian Berjenjang (E-KINERJA) Pejabat Struktural dan Fungsiona, di Bidang Kerjasama Desa	Terkelolanya Data Penilaian Berjenjang (E-KINERJA)	Persen	100
7	Terpenuhinya nilai nilai ASN Ber Akhlak di Bidang Kerjasama Desa	Terkelolanya Data nilai ASN Ber Akhlak	Laporan	100
8	Persentase Kerjasama Antar Desa dengan Pihak Ketiga Dalam Kabupaten/ Kota	Terkelolanya Persentase Realisasi Pelaksanaan Fasilitasi Pihak Ketiga Dalam Kabupaten/ Kota	Persen	100

9	Persentase Kerjasama Antar Desa dengan Pihak Ketiga Dalam Kabupaten/ Kota	Terkelolanya Persentase Realisasi Pelaksanaan Fasilitasi Pihak Ketiga Dalam Kabupaten/Kota	Laporan	100
10	Terlaksananya tugas dari atasan baik secara tertulis maupun lisan di Bidang Kerjasama Desa	Terkelolanya tugas dari atasan baik secara tertulis maupun lisan di Bidang Kerjasama Desa	Persen	100
11	Terpenuhinya pelaporan Harta Kekayaan LHKPN dan kepatuhan pelaporan Pajak di Bidang Kerjasama Desa	Terkelolanya Data melaksanakn pelaporan Harta Kekayaan LHKPN	Laporan	1
12	Tersedianya Dokumen Kelengkapan Penilaian ARINDAMA embangunan Bidang Pembangunan Wilayah Perdesaan	Terkelolanya Dokumen Kelengkapan SAKIP pada Bidang Kerjasama Desa	Persen	100
13	Tersedianya Dokumen Surat Pada Aplikasi Srikandi melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung erencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data	Terkelolanya dokumen Pendukung yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggung jawabkan melalui penerapan Satu Data	Persen	100
14	Terpenuhinya Perjanjian Kinerja(PK) Indikator Kinerja Individu (IKI) dan Pengukuran Kinerja	Terkelolanya Data Pelaksanaan Perjanjian Kinerja(PK) Indikator Kinerja Individu (IKI)	Dokumen	2

**KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Rp. -	APBD
1	Kerjasama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten / Kota	Rp. -	APBD
	JUMLAH ANGGARAN	Rp. -	APBD

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG KERJA SAMA
DESA**



DEDY SURYANTO, SE
Pembina (IV/A)
NIP. 19711112 199703 1 005

Pihak Pertama,
Pengadministrasi Perkantoran



SURIADY AGUS DJ
Pengatur Tingkat I / II/d
NIP. 19720909 200604 1 018



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **PADLI**

Jabatan : **PENGADMINISTRASI PERKANTORAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **DEDY SURIANTO, SE**

Jabatan : **KEPALA BIDANG KERJASAMA DESA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Bidang Kerjasama Desa yang saya pimpin;
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan

pengambilan kebijakan yang berbasis data.

5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG KERJASAMA
DESA**


DEDY SURIANTO, SE
Pembina (IV/a)
NIP. 19711112 199703 1 005

Pihak Pertama,
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN


PADLI
Pengatur Tingkat I (II/d)
NIP. 19790717 201001 1 036

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Prosentase Realisasi Kesepakatan Kerjasama Desa	Persen	100
2	Terfasilitasinya Pembentukan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen	5
3	Terwujudnya organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Nilai	45
4	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan	Persen	100
5	Terwujudnya pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan	Tingkat keterisian Data Prioritas Tahunan	Persen	100
6	Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100
7	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% setiap bulan dan SKP Final tahunan	Persen	100


8	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	12
---	---	--	---------	----

**KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Rp. -	APBD
1	Terfasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Rp. -	APBD
	JUMLAH ANGGARAN	Rp. -	APBD

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG KERJASAMA
DESA**


DEDY SURIANTO, SE
Pembina (IV/a)
NIP. 19711112 199703 1 005

Pihak Pertama,
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN


PADLI
Pengatur Tingkat I (II/d)
NIP. 19790717 201001 1 036



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SUPARTININGSIH, S.Sos**
Jabatan : **PENGOLAH DATA DAN INFORMASI**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **DEDY SURIANTO, SE**
Jabatan : **KEPALA BIDANG KERJASAMA DESA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Bidang Kerjasama Desa yang saya pimpin;
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan

pengambilan kebijakan yang berbasis data.

5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.


Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG KERJASAMA
DESA**


DEDY SURIANTO, SE
Pembina (IV/a)
NIP. 19711112 199703 1 005

Pihak Pertama,
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI


SUPARTININGSIH, S.Sos
Penata Muda (III/a)
NIP. 19811010 200902 2 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Prosentase Realisasi Kesepakatan Kerjasama Desa	Persen	100
2	Terfasilitasinya Pembentukan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen	5
3	Tercapainya organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Nilai	45
4	Tersusunnya Dokumen Manajemen Risiko PD	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan	Persen	100
5	Terkelolanya data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan	Tingkat keterisian Data Prioritas Tahunan	Persen	100
6	Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100
7	Terlaksanakannya Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% setiap bulan dan SKP Final tahunan	Persen	100

8	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	12
---	---	--	---------	----

**KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Rp. -	APBD
1	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Rp. -	APBD
	JUMLAH ANGGARAN	Rp. -	APBD

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG KERJASAMA
DESA**


DEDY SURIANTO, SE
Pembina (IV/a)
NIP. 19711112 199703 1 005

Pihak Pertama,
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI


SUPARTININGSIH, S.Sos
Penata Muda (III/a)
NIP. 19811010 200902 2007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **EVA FARISAH, SE**
Jabatan : **PENGOLAH DATA DAN INFORMASI**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **DEDY SURIANTO, SE**
Jabatan : **KEPALA BIDANG KERJA SAMA DESA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Bidang Kerjasama Desa yang saya pimpin;
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.

4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG KERJA SAMA

DESA


DEDY SURIANTO, SE

Pembina (IV/A)

NIP. 19711112 199703 1 005

Pihak Pertama,
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI


EVA FARISAH, SE

Penata Tk.I (III/D)

NIP. 19720330 200003 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Terlaksananya Program Peningkatan Kerjasama Desa	Prosentase Realisasi Kesepakatan Kerjasama Desa	Persen	100
2	Terfasilitasinya kerjasama antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	4
3	Terwujudnya organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Nilai	45
4	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan	Persen	100
5	Terwujudnya pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan	Tingkat keterisian Data Prioritas Tahunan	Persen	100
6	Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100
7	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% setiap bulan dan SKP Final tahunan	Persen	100

8	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	12
---	---	--	---------	----

**KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Rp. -	APBD
1	Fasilitasi Kerja sama antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Rp. -	APBD
	JUMLAH ANGGARAN	Rp. -	APBD

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG KERJA SAMA
DESA**



DEDY SURIANTO, SE
Pembina (IV/A)
NIP. 19711112 199703 1 005

Pihak Pertama,
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI



EVA FARISAH, SE
Penata Tk.I (III/D)
NIP. 19720330 200003 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **EKO HADISUSANTO, S.Sos**
Jabatan : **PENGOLAH DATA DAN INFORMASI**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **DEDY SURYANTO, SE**
Jabatan : **KEPALA BIDANG KERJA SAMA DESA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Bidang Kerjasama Desa yang saya pimpin;
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.

5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG KERJA SAMA DESA

PENGOLAH DATA DAN INFORMASI


DEDY SURYANTO, SE
Pembina (IV/A)
NIP. 19711112 199703 1 005


ERO HADISUSANTO, S.Sos
Penata Muda Tingkat I (III/D)
NIP. 19741025 200012 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Prosentase Realisasi Kesepakatan Kerjasama Desa	Persen	100
2	Terfasilitasinya Kerjasama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	8
3	Terwujudnya organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Nilai	45
4	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan	Persen	100
5	Tersedianya Dokumen Kelengkapan SAKIP Bidang Kerjasama Desa	Terkelolanya Dokumen Kelengkapan SAKIP pada Bidang Kerjasama Desa	Dokumen	1
6	Terlaksannya Gerakan Etam Mengaji GEMA Bidang Kerjasama Desa	Terwujudnya Gerakan Etam Mengaji (GEMA) di Bidang Kerjasama Desa	Laporan	12
7	Terpenuhinya Penilaian Berjenjang (EKINERJA) Pejabat Struktural dan Fungsiona, di Bidang Kerjasama Desa	Terkelolanya Data Penilaian Berjenjang (E-KINERJA)	Dokumen	12
8	Terpenuhinya nilai nilai ASN BerAkhhlak di Bidang Kerjasama Desa	Terkelolanya Data nilai ASN Ber Akhlak	Laporan	30


9	Persentase Realisasi Pelaksanaan Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	Terkelolanya Persentase Realisasi Pelaksanaan Fasilitasi Kerjasama Desa	Persen	100
10	Terpenuhinya pelaporan Harta Kekayaan LHKPN dan kepatuhan pelaporan Pajak di Bidang Kerjasama Desa	Terkelolanya Data melaksanakn pelaporan Harta Kekayaan LHKPN	Laporan	1
11	Tersedianya Dokumen Kelengkapan Penilaian ARINDAMA Pembangunan Bidang Pembangunan Wilayah Perdesaan	Terpenuhinya Dokumen Kelengkapan Penilaian ARINDAMA Pembangunan Bidang Pembangunan Wilayah Perdesaan	Dokumen	1
12	Tersedianya Dokumen Surat Pada Aplikasi Srikandi melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data	Terpenuhinya Dokumen Surat Pada Aplikasi Srikandi	Dokumen	30
13	Terpenuhinya Perjanjian Kinerja(PK) Indikator Kinerja Individu (IKI) dan Pengukuran Kinerja	Terkelolanya Data Pelaksanaan Perjanjian Kinerja(PK) Indikator Kinerja Individu (IKI)	Dokumen	12
14	Terlaksananya tugas dari atasan baik secara tertulis maupun lisan di Bidang Kerjasama Desa	Terpenuhinya tugas dari atasan baik secara tertulis maupun lisan di Bidang Kerjasama Desa	Laporan	10

**KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**


NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Rp. -	APBD
1	Fasilitasi Kerja sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Rp. -	APBD
	JUMLAH ANGGARAN	Rp. -	APBD

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG KERJA SAMA
DESA**


DEDY SURYANTO, SE
Pembina (IV/A)
NIP. 19711112 199703 1 005

Pihak Pertama,
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI


EKO HADISUSANTO, S.Sos
Penata Muda Tingkat I (III/D)
NIP. 19741025 200012 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HILARIUS SILITUBUN, S.Sos**
Jabatan : **PENGOLAH DATA DAN INFORMASI**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **DEDY SURYANTO, SE**
Jabatan : **KEPALA BIDANG KERJA SAMA DESA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Bidang Kerjasama Desa yang saya pimpin;
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.

5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG KERJA SAMA DESA



DEDY SURYANTO, SE
Pembina (IV/A)
NIP. 19711112 199703 1 005

Pihak Pertama,
Pengolah Data dan Informasi



HILARIUS SILITUBUN, S.Sos
Pengatur Muda Tingkat I (II/D)
NIP. 19830414 201001 1 033

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Prosentase Realisasi Kesepakatan Kerjasama Desa	Persen	100
2	Terfasilitasinya Kerjasama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	8
3	Terwujudnya organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Nilai	45
4	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan	Persen	100
5	Tersedianya Dokumen Kelengkapan Penilaian ARINDAMA Pembangunan Bidang Pembangunan Wilayah Perdesaan	Terpenuhinya Dokumen Kelengkapan Penilaian ARINDAMA Pembangunan Bidang Pembangunan Wilayah Perdesaan	Dokumen	1
6	Terlaksannnya Gerakan Etam Mengaji GEMA Bidang Kerjasama Desa	Terwujudnya Gerakan Etam Membaca Alkitab (GEMA) di Bidang Kerjasama Desa	Laporan	12
7	Terpenuhinya Penilaian Berjenjang (E KINERJA) Pejabat Struktural dan Fungsiona, di Bidang Kerjasama Desa	Terkelolanya Data Penilaian Berjenjang (E-KINERJA)	Persen	100
8	Terpenuhinya nilai nilai ASN Ber-Akhlak di Bidang Kerjasama Desa	Terkelolanya Data nilai ASN Ber-Akhlak	Laporan	12

9	Persentase Realisasi Pelaksanaan Fasilitas Kerjasama Antar Desa	Terkelolanya Persentase Realisasi Pelaksanaan Fasilitas Kerjasama Antar Desa	Persen	100
10	Terpenuhinya pelaporan Harta Kekayaan LHKPN dan kepatuhan pelaporan Pajak di Bidang Kerjasama Desa	Terkelolanya Data melaksanakn pelaporan Harta Kekayaan LHKPN	Laporan	1
11	Tersedianya Dokumen Surat Pada Aplikasi Srikandi melalui penerapan Satu Data Indonesia guna endukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data	Terkelolanya dokumen Pendukung yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggung jawabkan melalui penerapan Satu Data	Dokumen	50
12	Terpenuhinya Perjanjian Kinerja(PK) Indikator Kinerja Individu (IKI) dan Pengukuran Kinerja	Terkelolanya Data Pelaksanaan Perjanjian Kinerja(PK) Indikator Kinerja Individu (IKI)	Dokumen	2
13	Tersedianya Dokumen Pendukung yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia, (BECIK,) di Bidang Kerjasama Desa	Terkelolanya dokumen pendukung Becik di Bidang Kerjasama Desa	Persen	100
14	Terlaksananya tugas dari atasan baik secara tertulis maupun lisan di Bidang Kerjasama Desa	Terpenuhinya tugas dari atasan baik secara tertulis maupun lisan di Bidang Kerjasama Desa	Laporan	15

**KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Rp. -	APBD
1	Fasilitasi Kerja sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Rp. -	APBD
	JUMLAH ANGGARAN	Rp. -	APBD

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG KERJA SAMA
DESA**



DEDY SURYANTO, SE

Pembina (IV/A)

NIP. 19711112 199703 1 005

Pihak Pertama,

Pengolah Data dan Informasi



HILARIUS SILITUBUN, S.Sos

Pengatur Muda Tingkat I (II/D)

NIP. 19830414 201001 1 033



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ANSYARI, S.Sos**

Jabatan : **PENGOLAH DATA DAN INFORMASI**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **DEDY SURIANTO, SE**

Jabatan : **KEPALA BIDANG KERJA SAMA DESA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Bidang Kerjasama Desa yang saya pimpin;
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Terlaksananya Program Peningkatan Kerjasama Desa	Prosentase Realisasi Kesepakatan Kerjasama Desa	Persen	100
2	Terfasilitasinya Pembentukan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen	5
3	Terwujudnya organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Nilai	45
4	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan	Persen	100
5	Terwujudnya pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan	Tingkat keterisian Data Prioritas Tahunan	Persen	100
6	Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100
7	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% setiap bulan dan SKP Final tahunan	Persen	100

4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.


Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG KERJA SAMA
DESA**


DEDY SURIANTO, SE
Pembina (IV/a)
NIP. 19711112 199703 1 005

Pihak Pertama,
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI


ANSYARI, S.Sos
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19680602 200604 1 009

8	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	12
---	---	--	---------	----

**KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Rp. -	APBD
1	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Rp. -	APBD
	JUMLAH ANGGARAN	Rp. -	APBD

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG KERJA SAMA
DESA**


DEDY SURIANTO, SE
Pembina (IV/a)
NIP. 19711112 199703 1 005

Pihak Pertama,
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI


ANSYARI, S.Sos
Penata Tk.I (III/a)
NIP. 19680602 200604 1 009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **TATI HARIATI**

Jabatan : **PENGADMINISTRASI PERKANTORAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **DEDY SURIANTO, SE**

Jabatan : **KEPALA BIDANG KERJASAMA DESA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Bidang Kerjasama Desa yang saya pimpin;
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.

6. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG KERJA SAMA
DESA**



DEDY SURIANTO, SE
Pembina (IV/a)
NIP. 19711112 199703 1 005

Pihak Pertama,
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN



TATI HARIATI
Pengatur (II/d)
NIP. 19770619 200902 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Terlaksananya Program Peningkatan Kerjasama Desa	Prosentase Realisasi Kesepakatan Kerjasama Desa	Persen	100
2	Terfasilitasinya kerjasama antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	4
3	Terwujudnya organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Nilai	45
4	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan	Persen	100
5	Terwujudnya pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan	Tingkat keterisian Data Prioritas Tahunan	Persen	100
6	Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100
7	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% setiap bulan dan SKP Final tahunan	Persen	100
8	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	12

**KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Rp. -	APBD
1	Fasilitasi Kerja sama antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Rp. -	APBD
	JUMLAH ANGGARAN	Rp. -	APBD

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG KERJA SAMA
DESA**



DEDY SURIANTO, SE
Pembina (IV/A)
NIP. 19711112 199703 1 005

Pihak Pertama,
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN



TATI HARIATI
Pengatur (II/D)
NIP. 19770619 200902 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ANDIANUR**

Jabatan : **PENGADMINISTRASI PERKANTORAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **DEDY SURIANTO, SE**

Jabatan : **KEPALA BIDANG KERJA SAMA DESA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Bidang Kerjasama Desa yang saya pimpin;
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.

4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.


Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG KERJA SAMA
DESA**


DEDY SURIANTO, SE
Pembina (IV/A)
NIP. 19711112 199703 1 005

Pihak Pertama,
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN


ANDIANUR
Pengatur Tk.I (II/D)
NIP. 19810811 200112 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Prosentase Realisasi Kesepakatan Kerjasama Desa	Persen	100
2	Terlaksananya kerjasama antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	4
3	Tercapainya organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Nilai	45
4	Tersusunnya Dokumen Manajemen Risiko PD	Penyusunan dokumen Manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan	Persen	100
5	Terkelolanya data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan	Tingkat keterisian Data Prioritas Tahunan	Persen	100
6	Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100
7	Terpenuhinya Tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% setiap bulan dan SKP Final tahunan	Persen	100

8	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	12
---	---	--	---------	----

**KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Rp. -	APBD
1	Fasilitasi Kerja sama antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Rp. -	APBD
	JUMLAH ANGGARAN	Rp. -	APBD

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG KERJA SAMA
DESA**


DEDY SURIANTO, SE
Pembina (IV/A)
NIP. 19711112 199703 1 005

Pihak Pertama,
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN


ANDIANUR
Pengatur Tk.I (II/D)
NIP. 19810811 200112 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MISWIYANTO.SH**
Jabatan : **PENATA KELOLA SISTIM DAN TEKNOLOGI
INFORMASI**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **AHMAD IRJI'I, SE,M.Si**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PENATAAN DESA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.

4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak

kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 06 Februari 2026

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa



AHMAD IRJI'LI, SE, M.Si

Pembina / (IV/a)

NIP. 191202 200604 1 008

Pihak Pertama,
Penata Kelola Sistem dan Teknologi
Informasi



MISWIYANTO, SH

Pengatur Tk. I

NIP. 19830810 200801 1 019

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya kualitas penataan desa	Terselenggaranya Kegiatan Lainnya yang ada dibidang yang diperintahkan atasn	Kegiatan	2
2	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di Bidang Penataan Desa	Terwujudnya Gerakan Etam Mengaji (GEMA)	Laporan	12
3	Terselenggaranya penataan desa	Terlaksananya Kegiatan Bidang	Kegiatan	2
4	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	Terimputnya PK, IKI, E-Kinerja dan SKP ASN	Laporan	15
5	Terwujudnya organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Nilai	45
6	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan	Persen	100
7	Terwujudnya pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan	Tingkat keterisian Data Prioritas Tahunan	Persen	100
8	Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau dan SRIKANDI	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100

**SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN*	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Rp. 13.730.000.000,-	
2	Fasilitasi Pembentukan, Penghapusan, Pengabungan, dan Perubahan Status Desa	Rp. 665.160.000,-	
JUMLAH ANGGARAN		Rp. 14.395.160.000,-	

Kutai Kartanegara, 06 Februari 2026

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa


AHMAD IRJI, SE, M.Si

Pembina / (IV/a)
NIP. 191202 200604 1 008

Pihak Pertama,
Penata Kelola Sistem dan Teknologi
Informasi


MISWIYANTO.SH

Pengatur Tk. I
NIP. 19830810 200801 1 019



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. JUNIAN. J**

Jabatan : **PENGADMINISTRASI PERKANTORAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **AHMAD IRJI'I, SE, M.Si**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PENATAAN DESA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut

Pihak Kedua Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik;
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi;
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data;
5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data;

6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang;

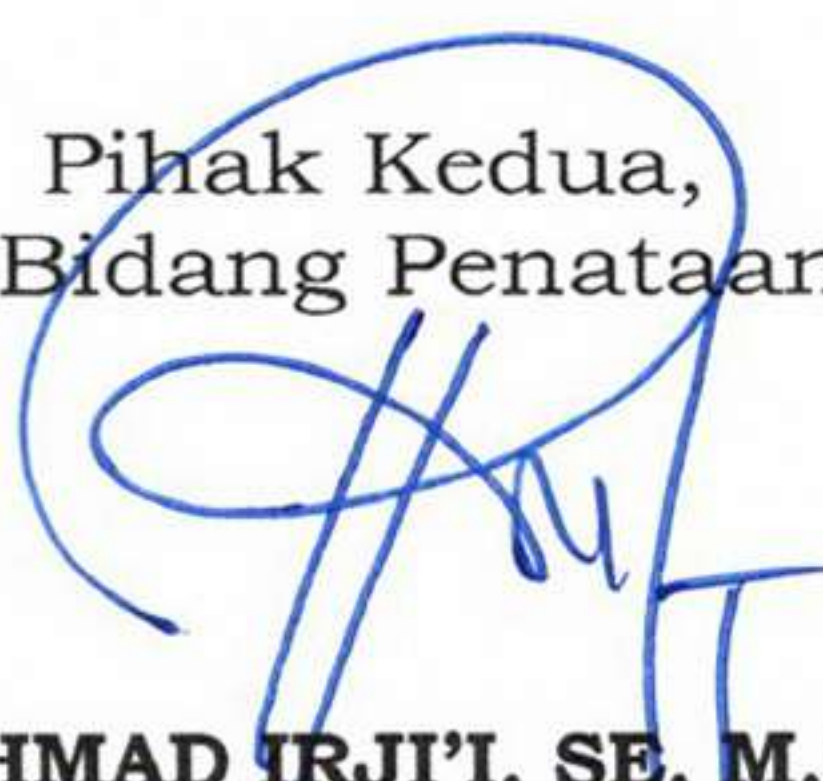
Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi;

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 06 Januari 2026

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Penataan Desa


AHMAD IRJI'I, SE, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19681202 200604 1 008

Pihak Pertama,
Pengadministrasi Perkantoran



M. JUNIAN.J
Pengatur Tingkat I / II d
NIP. 197902112010011014

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Terlaksanannya Gerakan Etam Mengaji (GEMA)	Laporan GEMA Bidang Penataan Desa	Laporan	12
2.	Terlaksananya Laporan Kinerja ASN pada Aplikasi E-Kinerja	Laporan E-Kinerja Bulanan dan Laporan SKP Tahunan	Laporan	13
3.	Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Individu (IKI)	Terbuatnya PK dan IKI Tahunan	Dokumen	4
4.	Kegiatan Apel Rutin DPMD dan Apel Gabungan	Pelaksanaan Apel Rutin DPMD dan Apel gabungan	Kegiatan	48
5.	Melaksanakan Perintah Atasan	Melaksanakan tugas dan pekerjaan dari perintah Atasan	Laporan	4
6.	Kegiatan Rapat Bidang Penataan Desa	Kegiatan Rapat Bidang Penataan Desa	Kegiatan	4
7.	Penataan Dokumen Arsip dan Administrasi	Penataan Dokumen Arsip dan Administrasi Bidang Penataan Desa	Dokumen	12

Kutai Kartanegara, 06 Januari 2026

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Penataan Desa


AHMAD IRJI'I, SE, M.Si
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19681202 200604 1 008

Pihak Pertama,
Pengadministrasi Perkantoran


M. JUNIAN.J
 Pengatur Tingkat I / I I d
 NIP. 197902112010011014



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **RUSDIANSYAH**
Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **AHMAD IRJI'I, SE, M.Si**
Jabatan : Kepala Bidang Penataan Desa

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.

4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak Kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 6 Ferbuari 2026

Pihak Kedua
Kepala Bidang Penataan Desa


AHMAD IRJI'I, SE, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19681202 200604 1 008

Pihak Pertama
Pengadministrasi Perkantoran



RUSDANSYAH
Pengatur Tingkat 1 (II/d)
NIP. 19800429 200701 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Terlaksanannya Gerakan Etam Mengaji (GEMA)	Laporan GEMA Bidang Penataan Desa	Laporan	12
2.	Terlaksanannya Laporan Kinerja ASN pada Aplikasi E-Kinerja	Laporan E-Kinerja Bulanan dan Laporan SKP Tahunan	Laporan	13
3.	Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Individu (IKI)	Terbuatnya PK dan IKI Tahunan	Dokumen	4
4.	Kegiatan Apel Rutin DPMD dan Apel Gabungan	Pelaksanaan Apel Rutin DPMD dan Apel gabungan	Kegiatan	48
5.	Melaksanakan Perintah Atasan	Melaksanakan tugas dan pekerjaan dari perintah Atasan	Laporan	4
6.	Kegiatan Rapat Bidang Penataan Desa	Kegiatan Rapat Bidang Penataan Desa	Kegiatan	4
7.	Penataan Dokumen Arsip dan Administrasi	Penataan Dokumen Arsip dan Administrasi Bidang Penataan Desa	Dokumen	12

Kutai Kartanegara, 6 Ferbuari 2026

Pihak Kedua
Kepala Bidang Penataan Desa


AHMAD IRJI'I, SE, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19681202 200604 1 008

Pihak Pertama
Pengadministrasi Perkantoran


RUSDIANSYAH
Pengatur Tingkat I (II/d)
NIP. 19800429 200701 1 007



8141

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **WARDAH ALBAIDA, SE**

Jabatan : **PENGOLAH DATA DAN INFORMASI**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **AHMAD IRJI'I, SE, M.Si**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PENATAAN DESA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data

Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.

5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 6 Februari 2026

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Penataan Desa



AHMAD IRJI'L, SE, M.Si
Pembina / (IV/a)
NIP. 19681202 200604 1 008

Pihak Pertama,
Pengolah Data dan Informasi



WARDAH ALBAIDA, SE
Penata Tk.I/(III/d)
NIP. 19720504 199303 2 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
	Meningkatnya Kualitas Penataan Desa	Prosentase Fasilitasi Penataan Desa	Persen	50
1	Terlaksananya Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Desa	7
2	Terlaksananya Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Desa	8
3	Terselesaikannya Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Individu (IKI) dan Pengukuran Kinerja (Murni dan Perubahan)	Jumlah Laporan PK, IKI dan Pengukuran Kinerja (Murni dan Perubahan)	Laporan	4
4	Terinputnya SKP E-Kinerja PNS Bulanan dan Final pada Aplikasi E-Kinerja	Laporan SKP E-Kinerja PNS Bidang Penataan Desa	Laporan	13
5	Terselesaikannya Laporan SPT Pajak Tahunan ASN	Jumlah Laporan SPT Pajak Tahunan ASN pada Aplikasi Coretax	Laporan	1
6	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di Bidang Penataan Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	12
7	Terlaksananya Apel Pagi Tiap Senin di lingkungan Dinas PMD	Jumlah terlaksananya Apel Pagi di lingkungan Dinas PMD	Kali	35
8	Tersusunnya Laporan Serapan Anggaran berdasarkan SPD Urusan Kegiatan	Jumlah Laporan Serapan Anggaran berdasarkan SPD Urusan Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	Laporan	1

	Penyelenggaraan Penataan Desa			
9	Tersusunnya laporan P3DN Urusan Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Laporan P3DN Urusan Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	Laporan	1
10	Terinputnya Data di Aplikasi E-Pantau Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase terinputnya Data E-Pantau Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	Persen	100
11	Terkelolanya Arsip SRIKANDI pada Aplikasi SRIKANDI	Persentase terkelolanya Arsip SRIKANDI	Persen	100
12	Terlaksananya Administrasi Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase Administrasi Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	Persen	100
13	Tersimpannya Berkas Arsip Bidang Penataan Desa	Persentase Berkas Arsip yang tertata di Bidang Penataan Desa	Persen	100
14	Tersedianya Data Prioritas di Bidang Penataan Desa	Persentase Tersedianya Data Prioritas di Bidang Penataan Desa	Persen	100

**SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Rp.665.160.000,00	APBD
2	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Rp.0,00	
JUMLAH ANGGARAN			

Kutai Kartanegara, 6 Februari 2026

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Penataan Desa


AHMAD IRJI'I, SE, M.Si

Pembina / (IV/a)
NIP. 19681202 200604 1 008

Pihak Pertama,
Pengolah Data dan Informasi


WARDAH ALBAIDA, SE

Penata Tk.I/(III/d)
NIP. 19720504 199303 2 005

CATATAN:

*HAPUS YANG TIDAK PERLU



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **MISDA ROYANI**
Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **AHMAD IRJI'I, SE, M.Si**
Jabatan : Kepala Bidang Penataan Desa

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.

4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

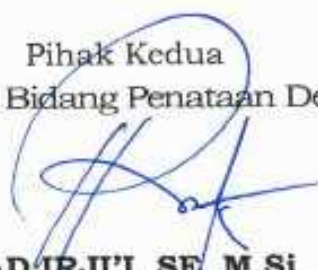
Pihak Kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 6 Ferbuari 2026

Pihak Kedua
Kepala Bidang Penataan Desa



AHMAD IRJI'L, SE, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19681202 200604 1 008

Pihak Pertama
Pengadministrasi Perkantoran



MISDA ROYANI
Pengatur Tingkat I (II/d)
NIP. 19760916 200701 2 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Terlaksanannya Gerakan Etam Mengaji (GEMA)	Laporan GEMA Bidang Penataan Desa	Laporan	12
2.	Terlaksanannya Laporan Kinerja ASN pada Aplikasi E-Kinerja	Laporan E-Kinerja Bulanan dan Laporan SKP Tahunan	Laporan	13
3.	Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Individu (IKI)	Terbuatnya PK dan IKI Tahunan	Dokumen	4
4.	Kegiatan Apel Rutin DPMD dan Apel Gabungan	Pelaksanaan Apel Rutin DPMD dan Apel gabungan	Kegiatan	48
5.	Melaksanakan Perintah Atasan	Melaksanakan tugas dan pekerjaan dari perintah Atasan	Laporan	4
6.	Kegiatan Rapat Bidang Penataan Desa	Kegiatan Rapat Bidang Penataan Desa	Kegiatan	4
7.	Penataan Dokumen Arsip dan Administrasi	Penataan Dokumen Arsip dan Administrasi Bidang Penataan Desa	Dokumen	12

Kutai Kartanegara, 6 Ferbuari 2026

Pihak Kedua
Kepala Bidang Penataan Desa


AHMAD IRJI'L, SE, M.Si
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19681202 200604 1 008

Pihak Pertama
Pengadministrasi Perkantoran


MISDA ROYANI
 Pengatur Tingkat I (II/d)
 NIP. 19760916 200701 2 009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **EMILIANA, SE**

Jabatan : Pengolah Data dan Informasi

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **AHMAD IRJI'I, SE, M.Si**

Jabatan : Kepala Bidang Penataan Desa

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.

4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak Kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 6 Februari 2026

Pihak Kedua
Kepala Bidang Penataan Desa



AHMAD IRJI'L, SE, M.Si

Pembina (IV/a)
NIP. 19681202 200604 1 008

Pihak Pertama
Pengolah Data dan Informasi



EMILIANA, SE

Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19731217 200112 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Terlaksanannya Gerakan Etam Mengaji (GEMA)	Laporan GEMA Bidang Penataan Desa	Laporan	12
2.	Terlaksanannya Laporan Kinerja ASN pada Aplikasi E-Kinerja	Laporan E-Kinerja Bulanan dan Laporan SKP Tahunan	Laporan	13
3.	Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Individu (IKI)	Terbuatnya PK dan IKI Tahunan	Dokumen	4
4.	Kegiatan Apel Rutin DPMD dan Apel Gabungan	Pelaksanaan Apel Rutin DPMD dan Apel gabungan	Kegiatan	48
5.	Melaksanakan Perintah Atasan	Melaksanakan tugas dan pekerjaan dari perintah Atasan	Laporan	4
6.	Kegiatan Rapat Bidang Penataan Desa	Kegiatan Rapat Bidang Penataan Desa	Kegiatan	4
7.	Penataan Dokumen Arsip dan Administrasi	Penataan Dokumen Arsip dan Administrasi Bidang Penataan Desa	Dokumen	12

Kutai Kartanegara, 6 Februari 2026

Pihak Kedua
Kepala Bidang Penataan Desa


AHMAD IRJI'I, SE, M.Si

Pembina (IV/a)
NIP. 19681202 200604 1 008

Pihak Pertama
Pengolah Data dan Informasi


EMILIANA, SE

Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19731217 200112 2 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AJI SYOFIAN**

Jabatan : **PENGADMINISTRASI PERKANTORAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **AHMAD IRJI'I, SE, M.Si**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PENATAAN DESA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut

Pihak Kedua Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik;
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi;
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data;
5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data;

6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang;

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi;

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 06 Januari 2026

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Penataan Desa


AHMAD IRJI'I, SE, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19681202 200604 1 008

Pihak Pertama,
Pengadministrasi Perkantoran


AJLSYOFIAN
Pengatur Tingkat I
NIP. 197404152007011024

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Terlaksanannya Gerakan Etam Mengaji (GEMA)	Laporan GEMA Bidang Penataan Desa	Laporan	12
2.	Terlaksananya Laporan Kinerja ASN pada Aplikasi E-Kinerja	Laporan E-Kinerja Bulanan dan Laporan SKP Tahunan	Laporan	13
3.	Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Individu (IKI)	Terbuatnya PK dan IKI Tahunan	Dokumen	4
4.	Kegiatan Apel Rutin DPMD dan Apel Gabungan	Pelaksanaan Apel Rutin DPMD dan Apel gabungan	Kegiatan	48
5.	Melaksanakan Perintah Atasan	Melaksanakan tugas dan pekerjaan dari perintah Atasan	Laporan	4
6.	Kegiatan Rapat Bidang Penataan Desa	Kegiatan Rapat Bidang Penataan Desa	Kegiatan	4
7.	Penataan Dokumen Arsip dan Administrasi	Penataan Dokumen Arsip dan Administrasi Bidang Penataan Desa	Dokumen	12

Kutai Kartanegara, 06 Januari 2026

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Penataan Desa


AHMAD IRJI'I, SE, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19681202 200604 1 008

Pihak Pertama,
Pengadministrasi Perkantoran


AJI SYOFIAN
Pengatur Tingkat I
NIP. 197404152007011024



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **SYAMSOEDDIN NOOR, MS**

Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **AHMAD IRJI'I, SE, M.Si**

Jabatan : Kepala Bidang Penataan Desa

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.

4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak Kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 6 Februari 2026

Pihak Kedua
Kepala Bidang Penataan Desa



AHMAD IRJI'I, SE, M.Si

Pembina (IV/a)

NIP. 19681202 200604 1 008

Pihak Pertama
Pengadministrasi Perkantoran



SYAMSOEDDIN NOOR, MS

Pengatur Tingkat I (II/d)

NIP. 19710825 200701 1 025

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Terlaksanannya Gerakan Etam Mengaji (GEMA)	Laporan GEMA Bidang Penataan Desa	Laporan	12
2.	Terlaksanannya Laporan Kinerja ASN pada Aplikasi E-Kinerja	Laporan E-Kinerja Bulanan dan Laporan SKP Tahunan	Laporan	13
3.	Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Individu (IKI)	Terbuatnya PK dan IKI Tahunan	Dokumen	4
4.	Kegiatan Apel Rutin DPMD dan Apel Gabungan	Pelaksanaan Apel Rutin DPMD dan Apel gabungan	Kegiatan	48
5.	Melaksanakan Perintah Atasan	Melaksanakan tugas dan pekerjaan dari perintah Atasan	Laporan	4
6.	Kegiatan Rapat Bidang Penataan Desa	Kegiatan Rapat Bidang Penataan Desa	Kegiatan	4
7.	Penataan Dokumen Arsip dan Administrasi	Penataan Dokumen Arsip dan Administrasi Bidang Penataan Desa	Dokumen	12

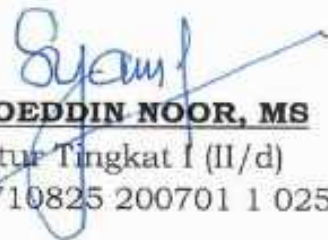
Kutai Kartanegara, 6 Februari 2026

Pihak Kedua
Kepala Bidang Penataan Desa



AHMAD IRJI T. SE, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19681202 200604 1 008

Pihak Pertama
Pengadministrasi Perkantoran



SYAMSOEDDIN NOOR, MS
Pengatur Tingkat I (II/d)
NIP. 19710825 200701 1 025



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SAYID MUHAMMAD NUR, SE**

Jabatan : Penata Kelola Sistem Teknologi dan Informasi

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **AHMAD IRJI'I, SE, M.Si**

Jabatan : Kepala Bidang Penataan Desa

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.

4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.


Pihak Kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 6 Februari 2026

Pihak Kedua
Kepala Bidang Penataan Desa


AHMAD IRJI, SE, M.SI
Pembina (IV/a)
NIP. 19681202 200604 1 008

Pihak Pertama
Penata Kelola Sistem Teknologi dan Informasi


SAYID MUHAMMAD NUR, SE
Penata Muda TK.I (HI/b)
NIP. 19802303 201001 1 019

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Laporan Terlaksanannya Gerakan Etam Mengaji (GEMA)	Laporan GEMA di Bidang Penataan Desa	Laporan	12
2.	Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Laporan E-Kinerja Bulanan dan SKP Tahunan	Laporan	13
3.	Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Individu (IKI)	Terbuatnya PK dan IKI Tahunan	Dokumen	2
4.	Pelaporan E- Pantau	Jumlah data laporan input E-Pantau	Laporan	12
5.	Kegiatan Apel Pagi DPMD dan Apel Gabungan	Terlaksanannya apel pagi DPMD dan Apel gabungan	Laporan	12
6.	Kegiatan Rapat Bidang Penataan Desa	Kegiatan Rapat Bidang Penataan Desa	Laporan	4
7.	Terlaksanannya Laporan Manajemen Resiko (MR) Bidang Penataan Desa	Terlaksanannya Laporan Manajemen Resiko (MR) Bidang Penataan Desa	Laporan	12
8.	Tersusunya Laporan, Notulen dan Berita Acara	Laporan Hasil Kegiatan, Notulen dan Berita Acara	Laporan	5

Kutai Kartanegara, 6 Februari 2026

Pihak Kedua
Plt. Kepala Bidang Penataan Desa



AHMAD IRJI'I, SE, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19681202 200604 1 008

Pihak Pertama
Penata Kelola Sistem Teknologi Informasi



SAYID MUHAMMAD NUR, SE
Penata Muda TK.I (III/b)
NIP. 19802303 201001 1 019



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SATYAWAN NUR RAHMAN**

Jabatan : **PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI**

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **AHMAD IRJI'I,SE.M.Si**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PENATAAN DESA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan pada perangkat daerah;
2. Terwujudnya pencapaian indikator kinerja kunci (IKK) yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kinerja organisasi;
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik";
4. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;

5. Terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel;
6. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
7. Terwujudnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan terintegrasi melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik;
8. Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data;
9. Terwujudnya ASN yang religius, berakhlak mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN;
10. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
11. Berkomitmen melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui upaya pengentasan stunting;
12. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
13. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
14. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;

2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 6 Pebruari 2026

Pihak Kedua
Kepala Bidang Penataan Desa



AHMAD IRJI'I, SE, M.Si
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19681202 200604 1 008

Pihak Pertama
Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi,



SATYAWAN NUR RAHMAN
NIP. 19810207 200012 1 005


**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Terselesainya Laporan SPT Tahunan Melalui Aplikasi Coretax online	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan pertanggal 31 Maret setiap tahunnya	Persen	100
2	Melaksanakan Apel Rutin Setiap Senin di DPMD Tahun 2026	Melaksanakan Apel di DPMD	Bulan	12
3	Tersusunnya Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Individu (IKI) dan Pengukuran Kinerja	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Individu (IKI) dan Pengukuran Kinerja yang tersusun	Dokumen	1
4	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	Jumlah Dokumen Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang tersusun	Dokumen	13
5	Terselenggaranya Kegiatan Rapat di Bidang Penataan Desa	Terselenggaranya Kegiatan Rapat di Bidang Penataan Desa Triwulan I s-d IV	Laporan	4
6	Melaksanakan Perintah Atasan	Melaksanakan Perintah Atasan di Bidang Penataan Desa	Dokumen	1
7	Ketersediaan Data di Bidang Penataan Desa Fasilitasi Kewenangan Desa	Tersedianya Data di Penataan Desa Fasilitasi Kewenangan Desa	Dokumen	1
8	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di Bidang Penataan Desa	Terlaksananya Gerakan Etam Mengaji GEMA	Laporan	2

Pihak Kedua
Kepala Bidang Penataan Desa


AHMAD RJI'I, S.E., M.Si
PEMBINA (I/1/a)
NIP. 19681202 200604 1 008

Kutai Kartanegara, 6 Pebruari 2026
Pihak Pertama
Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi


SATYAWAN NUR RAHMAN
NIP. 19810207 200012 1 005



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **LAILY JUMIATI, S.Sos**
Jabatan : Pengolah Data dan Informasi

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **AHMAD IRJI'I, SE, M.Si**
Jabatan : Kepala Bidang Penataan Desa

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.

4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak Kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 6 Februari 2026

Pihak Kedua
Kepala Bidang Penataan Desa



AHMAD IRJI'I, SE, M.Si

Pembina (IV/a)

NIP. 19681202 200604 1 008

Pihak Pertama
Pengolah Data dan Informasi



LAILY JUMHATI, S.Sos

Penata Tingkat I (III/d)


NIP. 19730504 199503 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Terlaksanannya Gerakan Etam Mengaji (GEMA)	Laporan GEMA Bidang Penataan Desa	Laporan	12
2.	Terlaksanannya Laporan Kinerja ASN pada Aplikasi E-Kinerja	Laporan E-Kinerja Bulanan dan Laporan SKP Tahunan	Laporan	13
3.	Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Individu (IKI)	Terbuatnya PK dan IKI Tahunan	Dokumen	4
4.	Kegiatan Apel Rutin DPMD dan Apel Gabungan	Pelaksanaan Apel Rutin DPMD dan Apel gabungan	Kegiatan	48
5.	Melaksanakan Perintah Atasan	Melaksanakan tugas dan pekerjaan dari perintah Atasan	Laporan	4
6.	Kegiatan Rapat Bidang Penataan Desa	Kegiatan Rapat Bidang Penataan Desa	Kegiatan	4
7.	Penataan Dokumen Arsip dan Administrasi	Penataan Dokumen Arsip dan Administrasi Bidang Penataan Desa	Dokumen	12

Kutai Kartanegara, 6 Februari 2026

Pihak Kedua
Kepala Bidang Penataan Desa


AHMAD IRJI'I, SE, M.Si

Pembina (IV/a)

NIP. 19681202 200604 1 008

Pihak Pertama
Pengolah Data dan Informasi


LAILY JUMIATI, S.Sos

Penata Tingkat I (III/d)

NIP. 19730504 199503 2 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SALOM, SE**
Jabatan : Pengolah Data dan Informasi
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kutai
Kartanegara.

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **POINO, S.IP, M.Si**
Jabatan : Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kutai
Kartanegara

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Administrasi
Pemerintahan Desa



POINO, S.IP. M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19690503 199101 1 001

Pihak Pertama,
Pengolah Data dan Informasi



SALOM, SE
Penata Muda (III/a)
NIP. 19800318 200902 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data	Terpantaunya Pengisian dan Pembaharuan Data Profil Desa yang ada pada aplikasi Prodeskel	Data	80
2	Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data	Terpantaunya Pengisian dan Pembaharuan Data Evaluasi Perkembangan Desa yang ada pada Aplikasi Epdeskel	Data	80
3	Terwujudnya organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja	Terlaksananya kegiatan Membaca ALKITAB	Laporan	12

4	<p>Melaksanakan perintah atasan dalam hal Penilaian Berjenjang (E-KINERJA)</p> <p>Pelaksanaan Perjanjian Kinerja(PK) Indikator Kinerja Individu (IKI) dan Pengukuran Kinerja,melaksanagn pelaporan Harta Kekayaan LHKPN dan kepatuhan pelaporan Pajak, melaksanakan Zakat&Shodaqoh, nilai nilai ASN Ber-Akhlak, serta melaksanakan tugas dari atasan baik secara tertulis maupun lisan</p>	<p>Melaksanakan Tugas Atasan Baik Secara Tertulis maupun Lisan</p>	Data	12
5	<p>Melaksanakan perintah atasan dalam hal Penilaian Berjenjang (E-KINERJA)</p> <p>Pelaksanaan Perjanjian Kinerja(PK) Indikator Kinerja Individu (IKI) dan Pengukuran Kinerja,melaksanagn pelaporan Harta Kekayaan LHKPN dan kepatuhan pelaporan Pajak, melaksanakan Zakat&Shodaqoh, nilai nilai ASN Ber-Akhlak, serta melaksanakan tugas dari atasan baik secara tertulis maupun lisan</p>	<p>Terlaksananya Penyusunan Perjanjian Kerja dan Indikator Kinerja Individu</p>	Dokumen	1

6	<p>Melaksanakan perintah atasan dalam hal Penilaian Berjenjang (E-KINERJA)</p> <p>Pelaksanaan Perjanjian Kinerja(PK) Indikator Kinerja Individu (IKI) dan Pengukuran Kinerja,melaksanagn pelaporan Harta Kekayaan LHKPN dan kepatuhan pelaporan Pajak, melaksanakan Zakat&Shodaqoh, nilai nilai ASN Ber-Akhlak, serta melaksanakan tugas dari atasan baik secara tertulis maupun lisan</p>	<p>Mewujudkan Tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai 100%</p>	<p>Laporan</p>	<p>1</p>
7	<p>Melaksanakan perintah atasan dalam hal Penilaian Berjenjang (E-KINERJA)</p> <p>Pelaksanaan Perjanjian Kinerja(PK) Indikator Kinerja Individu (IKI) dan Pengukuran Kinerja,melaksanagn pelaporan Harta Kekayaan LHKPN dan kepatuhan pelaporan Pajak, melaksanakan Zakat&Shodaqoh, nilai nilai ASN Ber-Akhlak, serta melaksanakan tugas dari atasan baik secara tertulis maupun lisan</p>	<p>Mewujudkan Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan</p>	<p>Laporan</p>	<p>1</p>

8	Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data	Terlaksananya Tata Kelola Arsip pada Aplikasi Srikand	Data	25
9	Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data	Terpantaunya Klasifikasi Profil Desa	Laporan	12
10	Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data	Terpantaunya Perkembangan (EPDESKEL) Evaluasi Desa	Dokumen	1
11	Terwujudnya organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja	Layanan Konsultasi Desa	Desa	10

12	Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data	Melaksanakan Nilai Nilai ASN Ber-Akhlak	Dokumen	12
----	---	---	---------	----

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Administrasi
Pemerintahan Desa



POINO, S.IP, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19690503 199101 1 001

Pihak Pertama,
Pengolah Data dan Informasi



SALOM, SE
Penata Muda (III/a)
NIP. 19800318 200902 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AJISSIUS, S.Pd, M.Si**
Jabatan : Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.
Kutai Kartanegara.

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **POINO, S.IP, M.Si**
Jabatan : Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.
Kutai Kartanegara.

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

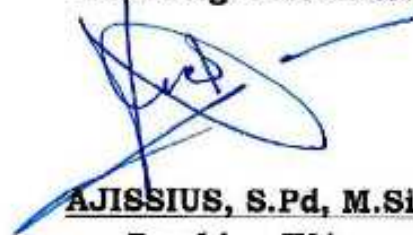
Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

**Pihak Kedua,
Kepala Bidang Administrasi
Pemerintahan Desa**



POINO, S.IP, M.Si
Pembina, IV/a
NIP.19690503 199101 1 001

**Pihak Pertama,
Penata Kelola Sistem dan
Teknologi Informasi**



AJISSIUS, S.Pd, M.Si
Pembina IV/a
NIP. 19690525 199303 1 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Terwujudnya organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja .(NILAI KEMATANGAN ORGANISASI) Dan Gerakan Etam Mengaji (GEMA)	Terlaksananya Pendalaman Kitab Suci	Persen	12 Laporan
2	Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data	Terlaksananya arsip srikandi	Persen	25 Arsip
3	Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data	Terlaksananya Laporan Kinerja BPD	Persen	18 Laporan

4	Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data	Laporan Infutan Profil Desa	Persen	60 Desa
5	Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data	Laporan infutan Evaluasi Perkembangan Desa	Persen	60 Desa
6	Melaksanakan perintah atasan dalam hal Penilaian Berjenjang (E-KINERJA) Pelaksanaan Perjanjian Kinerja(PK) Indikator Kinerja Individu (IKI) dan Pengukuran Kinerja,melaksanakn pelaporan Harta	Dokumen PK dan IKI	Persen	1 Laporan

	Kekayaan LHKPN dan kepatuhan pelaporan Pajak, melaksanakan nilai ASN Ber-Akhlak, serta melaksanakan tugas dari atasan baik secara tertulis maupun lisan			
7	Melaksanakan perintah atasan dalam hal Penilaian Berjenjang (E-KINERJA) Pelaksanaan Perjanjian Kinerja(PK) Indikator Kinerja Individu (IKI) dan Pengukuran Kinerja,melaksanakn pelaporan Harta Kekayaan LHKPN dan kepatuhan pelaporan Pajak, melaksanakan nilai ASN Ber-Akhlak, serta melaksanakan tugas dari atasan baik secara tertulis maupun lisan	Dokumen Pelaporan Pajak	Persen	1 Laporan
8	Melaksanakan perintah atasan dalam hal Penilaian Berjenjang (E-KINERJA) Pelaksanaan Perjanjian Kinerja(PK) Indikator Kinerja Individu (IKI) dan Pengukuran Kinerja,melaksanakn pelaporan Harta Kekayaan LHKPN dan kepatuhan pelaporan Pajak, melaksanakan nilai ASN Ber-Akhlak, serta melaksanakan tugas dari atasan baik secara tertulis maupun lisan	Terlaksananya Laporan SKP Tahunan	Persen	1 Laporan

9	<p>Melaksanakan perintah atasan dalam hal Penilaian Berjenjang (E-KINERJA) Pelaksanaan Perjanjian Kinerja(PK) Indikator Kinerja Individu (IKI) dan Pengukuran Kinerja,melaksanakn pelaporan Harta Kekayaan LHKPN dan kepatuhan pelaporan Pajak, melaksanakan nilai ASN Ber-Akhlak, serta melaksanakan tugas dari atasan baik secara tertulis maupun lisan</p>	<p>Melaksanakan Nilai-nilai ASN Ber-Akhlak</p>	<p>Persen</p>	<p>12 Laporan</p>
10	<p>Melaksanakan perintah atasan dalam hal Penilaian Berjenjang (E-KINERJA) Pelaksanaan Perjanjian Kinerja(PK) Indikator Kinerja Individu (IKI) dan Pengukuran Kinerja,melaksanakn pelaporan Harta Kekayaan LHKPN dan kepatuhan pelaporan Pajak, melaksanakan nilai ASN Ber-Akhlak, serta melaksanakan tugas dari atasan baik secara tertulis maupun lisan</p>	<p>Melaksanakan Perintah Atasan</p>	<p>Persen</p>	<p>50 data</p>
11	<p>Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. (MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN</p>	<p>Layanan konsultasi Desa</p>	<p>Persen</p>	<p>30 orang</p>

<p>PUBLIK) - (SAKIP - LAKJIP - PKO - SP4N LAPOR - PEMETAAN URUSAN PEMERINTAH, PENILAIAN ARINDAMA)</p>			
---	--	--	--

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

**Pihak Kedua,
Kepala Bidang Administrasi
Pemerintahan Desa**



**POINO, S.IP, M.Si
Pembina, IV/a
NIP.19690503 199101 1 001**

**Pihak Pertama,
Penata Kelola Sistem dan
Teknologi Informasi**



**AJISSIUS, S.Pd, M.Si
Pembina IV/a
NIP. 19690525 199303 1 010**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **FAISAL IDRUS, SE**
Jabatan : Pengolah Data dan Informasi
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kutai
Kartanegara.

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **POINO, S.IP, M.Si**
Jabatan : Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kutai
Kartanegara

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Administrasi
Pemerintahan Desa



POINO, S.IP, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19690503 199101 1 001

Pihak Pertama,
Pengolah Data dan Informasi



FAISAL IDRUS, SE
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19721125 200112 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data	Terlaksananya Data Arsip Srikandi	Data	6
2	Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data	Terpantaunya Data Perencanaan Desa	Data	6
3	Terwujudnya organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja	Terlaksananya kegiatan Gerakan Etam Mengaji (GEMA)	Dokumen	12

4	<p>Melaksanakan perintah atasan dalam hal Penilaian Berjenjang (E-KINERJA)</p> <p>Pelaksanaan Perjanjian Kinerja(PK) Indikator Kinerja Individu (IKI) dan Pengukuran Kinerja,melaksanagn pelaporan Harta Kekayaan LHKPN dan kepatuhan pelaporan Pajak, melaksanakan Zakat&Shodaqoh, nilai nilai ASN Ber-Akhlak, serta melaksanakan tugas dari atasan baik secara tertulis maupun lisan</p>	Melaksanakan Tugas dari Atasan	Data	6
5	<p>Melaksanakan perintah atasan dalam hal Penilaian Berjenjang (E-KINERJA)</p> <p>Pelaksanaan Perjanjian Kinerja(PK) Indikator Kinerja Individu (IKI) dan Pengukuran Kinerja,melaksanagn pelaporan Harta Kekayaan LHKPN dan kepatuhan pelaporan Pajak, melaksanakan Zakat&Shodaqoh, nilai nilai ASN Ber-Akhlak, serta melaksanakan tugas dari atasan baik secara tertulis maupun lisan</p>	Terlaksananya Penyusunan Perjanjian Kerja (PK) dan Indikator Kinerja Individu (IKI)	Dokumen	2

6	<p>Melaksanakan perintah atasan dalam hal Penilaian Berjenjang (E-KINERJA)</p> <p>Pelaksanaan Perjanjian Kinerja(PK) Indikator Kinerja Individu (IKI) dan Pengukuran Kinerja,melaksanakan pelaporan Harta Kekayaan LHKPN dan kepatuhan pelaporan Pajak, melaksanakan Zakat&Shodaqoh, nilai nilai ASN Ber-Akhlak, serta melaksanakan tugas dari atasan baik secara tertulis maupun lisan</p>	Penilaian berjenjang (E-KINERJA)	Dokumen	13
7	<p>Melaksanakan perintah atasan dalam hal Penilaian Berjenjang (E-KINERJA)</p> <p>Pelaksanaan Perjanjian Kinerja(PK) Indikator Kinerja Individu (IKI) dan Pengukuran Kinerja,melaksanahn pelaporan Harta Kekayaan LHKPN dan kepatuhan pelaporan Pajak, melaksanakan Zakat&Shodaqoh, nilai nilai ASN Ber-Akhlak, serta melaksanakan tugas dari atasan baik secara tertulis maupun lisan</p>	Kepatuhan pelaporan pajak	Dokumen	1
8	<p>Melaksanakan perintah atasan dalam hal Penilaian Berjenjang (E-KINERJA)</p> <p>Pelaksanaan Perjanjian Kinerja(PK) Indikator</p>	Zakat dan Infaq Shodaqoh	Dokumen	12

	Kinerja Individu (IKI) dan Pengukuran Kinerja, melaksanakan pelaporan Harta Kekayaan LHKPN dan kepatuhan pelaporan Pajak, melaksanakan Zakat&Shodaqoh, nilai nilai ASN Ber-Akhlak, serta melaksanakan tugas dari atasan baik secara tertulis maupun lisan			
9	Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data	Melaksanakan Nilai Nilai ASN Ber-Akhlak	Dokumen	20
10	Terwujudnya organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja	Layanan Konsultasi Desa	Data	12

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Administrasi
Pemerintahan Desa


POINO, S.IP, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19690503 199101 1 001

Pihak Pertama,
Pengolah Data dan Informasi


FAISAL IDRUS, SE
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19721125 200112 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SURIANSYAH, S.Sos**
Jabatan : **PENGOLAH DATA DAN INFORMASI**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama:

Nama : **POINO, S.IP .,M.Si**
Jabatan : **KEPALA BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Bidang Administrasi Pemerintahan Desa yang saya pimpin;
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.

4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG
ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN DESA**



POINO, S. IP., M. Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19690503 199101 1 001

Pihak Pertama,
**PENGOLAH DATA
DAN INFORMASI**



SURIANSYAH, S. Sos
Penata Muda (III/a)
NIP. 19820305 200902 1 001


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Tersusunnya Data Kepala Desa di Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	Penyampaian Data Kepala Desa	Laporan	13
2	Terkelolanya Data yang terintegrasi melalui penerapan Satu Data Indonesia	Penggunaan Aplikasi Pacar Kuda	Persen	100
3	Terkelolanya Data yang terintegrasi melalui penerapan Satu Data Indonesia	Melaksanakan Pengelolaan data dan Penggunaan Aplikasi Srikandi	Laporan	13
4	Terlaksananya Perintah Atasan baik secara tertulis maupun lisan	Melaksanakan Perintah Atasan baik secara tertulis maupun lisan	Persen	100
5	Terlaksananya Perintah Atasan dalam hal penilaian Berjenjang (E-Kinerja)	Penyampaian Penilaian Berjenjang (E-Kinerja)	Laporan	13
6	Terlaksananya Perintah Atasan dalam hal Penyampaian Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Individu (IKI)	Penyampaian Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Individu (IKI)	Dokumen	2
7	Terlaksananya Perintah Atasan dalam hal Penyampaian Kepatuhan Pajak Tahunan	Penyampaian Pajak Tahunan	Laporan	1
8	Terlaksananya Perintah Atasan dalam hal Melaksanakan Nilai ASN Ber-Akhlak	Pelaksanaan Apel OPD	Persen	100

9	Terlaksananya Perintah Atasan dalam hal Melaksanakan Zakat, Infaq dan Shodaqoh	Menyampaikan Zakat, Infaq dan Shodaqoh	Laporan	13
10	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	13

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG
ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN DESA**


POINO S.IP., M.Si
Pembina (IV/a)

NIP. 19690503 199101 1 001

Pihak Pertama,
**PENGOLAH DATA
DAN INFORMASI**


SURIANSYAH, S.Sos
Penata Muda (III/a)

NIP. 19820305 200902 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SRI WAHYUNI**
Jabatan : **PENGADMINISTRASI PERKANTORAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **POINO, S.IP .,M.Si**
Jabatan : **KEPALA BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Bidang Administrasi Pemerintahan Desa yang saya pimpin;
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.

4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG
ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN DESA**



POING, S. IP., M. Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19690503 199101 1 001

Pihak Pertama,

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN



SRI WAHYUNI
Pengatur Muda (II/a)
NIP. 19780904 202521 2 016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Tersusunnya Data Prodeskel di Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	Penyampaian Data Prodeskel	Laporan	13
2	Tersusunnya Data Evedeskel di Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	Penyampaian Data Evedeskel	Laporan	13
3	Tersusunnya Data Anggota BPD di Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	Penyampaian Data Anggota BPD	Laporan	13
4	Terkelolanya Data yang terintegrasi melalui penerapan Satu Data Indonesia	Melaksanakan Pengelolaan data dan Penggunaan Aplikasi Srikandi	Persen	100
5	Terlaksananya Perintah Atasan baik secara tertulis maupun lisan	Melaksanakan Perintah Atasan baik secara tertulis maupun lisan	Persen	100
6	Terlaksananya Perintah Atasan dalam hal penilaian Berjenjang (E-Kinerja)	Penyampaian Penilaian Berjenjang (E-Kinerja)	Laporan	13
7	Terlaksananya Perintah Atasan dalam hal Penyampaian Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Individu (IKI)	Penyampaian Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Individu (IKI)	Dokumen	2
8	Terlaksananya Perintah Atasan dalam hal Penyampaian Kepatuhan Pajak Tahunan	Penyampaian Pajak Tahunan	Laporan	1

9	Terlaksananya Perintah Atasan dalam hal Melaksanakan Nilai ASN Ber-Akhlak	Pelaksanaan Apel OPD	Laporan	13
10	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	13

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG
ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN DESA**

POINO, S.IP., M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19690503 199101 1 001

Pihak Pertama,

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN



SRI WAHYUNI
Pengatur Muda (II/a)
NIP. 19780904 202521 2 016



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SITI HADIJAH, SE**
Jabatan : **PENGOLAH DATA DAN INFORMASI**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **POINO,S.IP.,M.Si**
Jabatan : **KEPALA BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Bidang Administrasi Pemerintahan Desa yang saya pimpin;
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Mencrapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.

4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN DESA**



POINO, S.IP., M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19690503 199101 1 001

Pihak Pertama,
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI



SITI HADIJAH, SE
Penata Muda (III/a)
NIP. 19830729 200902 2 001

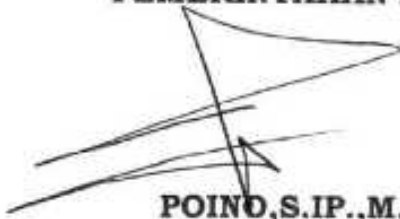
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Unit Usaha dan Pendapatan BUMDesa/BUMDESMA dan Lembaga Kerja sama Antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Persen	100
2	Terwujudnya organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Nilai	45
3	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan	Persen	100
4	Terwujudnya pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan	Tingkat keterisian Data Prioritas Tahunan	Persen	100
5	Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100
6	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% setiap bulan dan SKP Final tahunan	Persen	100

7	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Pelaksanaan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	12
---	---	---	---------------------------------------	---------	----

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN DESA**



POINDO, S.IP., M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19690503 199101 1 001

Pihak Pertama,
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI



SITI HADIJAH, SE
Penata Muda (III/a)
NIP. 19830729 200902 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DEDY ISKANDAR**
Jabatan : **PENGADMINISTRASI PERKANTORAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **POINO,S.IP.,M.Si**
Jabatan : **KEPALA BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Bidang Administrasi Pemerintahan Desa yang saya pimpin;
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.

4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN DESA**



POINO, S.IP., M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19690503 199101 1 001

Pihak Pertama,
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN



DEDY ISKANDAR
PENGATUR TK. I (II/d)
NIP. 19750505 201001 1 033

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Ketersediaan Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa (Dokumen)	Persen	100
2	Terwujudnya organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Nilai	45
3	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan	Persen	100
4	Terwujudnya pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan	Tingkat keterisian Data Prioritas Tahunan	Persen	100
5	Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100
6	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% setiap bulan dan SKP Final tahunan	Persen	100

7	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Pelaksanaan Etam Mengaji (GEMA)	Laporan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	12
---	---	--	---------------------------------------	---------	----

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN DESA**



POINO, S.IP., M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19690503 199101 1 001

Pihak Pertama,
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN



DEDY ISKANDAR
PENGATUR TK. I (II/d)
NIP. 19750505 201001 1 033



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RAHMAT HIDAYAT WASKITO, S.E**

Jabatan : **Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Informasi**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs. POINO, MSi**

Jabatan : **Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data

Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.

5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
**Kepala Bidang Administrasi
Pemerintahan Desa**



Drs. POINO, MSI
Pembina /IVa
NIP. 196905031991011001

Pihak Pertama,
**Penata Kelola Sistem Dan
Teknologi Informasi**



RAHMAT HIDAYAT WASKITO, S.E
Penata TK I /III d
NIP. 197306022009011003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Indikator Kinerja Individu (IKI)	Pelaksanaan Pembuatan Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Indikator Kinerja Individu (IKI)	Laporan	1
2	Tersedianya Dokumen Laporan Pajak Tahunan	Pembuatan Laporan Pajak Tahunan	Laporan	1
3	Terselenggaranya Penilaian Berjenjang (E-Kinnerja)	Pelaksanaan Penilaian Berjenjang (E-Kinnerja)	Dokumen	13
4	Pelaksanaan Nilai nilai ASN Berahklak	Pelaksanaan Nilai nilai ASN Berahklak	Dokumen	12
5	Terlaksananya Gerakan Etam Mengaji (GEMA)	Pelaksanaan Gerakan Etam Mengaji (GEMA)	Dokumen	12
6	Pelaksanaan tata kelola arsip melalui aplikasi srikandi	Tata kelola arsip melalui aplikasi srikandi	Data	15
7	Layanan Konsultasi Desa	Pelaksanaan Layanan Konsultasi Desa	Desa	6
8	Tersedianya Data Laporan Kepala Desa	Pelaksanaan Input data laporan Kepala Desa	Dokumen	1
9	Melaksanakan Perintah Atasan	Pelaksanakan Perintah Atasan	Data	1
10	Pengelolaan Keuangan dengan apliksi siskudes	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan dengan apliksi siskudes	Data	1

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
**Kepala Bidang Administrasi
Pemerintahan Desa**



Drs. POINO, MSi
Pembina /IVa
NIP. 196905031991011001

Pihak Pertama,
**Penata Kelola Sistim Dan
Teknologi Informasi**



RAHMAT HIDAYAT WASKITO, S.E
Penata TK I /IIIId
NIP. 197306022009011003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NINA AGUSTINA, SE**
Jabatan : **PENGOLAH DATA DAN INFORMASI**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **POINO, S.IP .,M.Si**
Jabatan : **KEPALA BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Bidang Administrasi Pemerintahan Desa yang saya pimpin;
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.

4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG
ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN DESA**



POINO, S.IP., M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19690503 199101 1 001

Pihak Pertama,
**PENGOLAH DATA
DAN INFORMASI**



NINA AGUSTINA, SE
Pengatur Tk I (II/d)
NIP. 19860518 201001 2 024

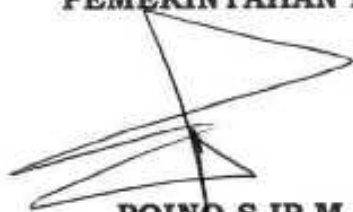
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Tersusunnya Data Kepala Desa di Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	Penyampaian Data Kepala Desa	Persen	100
2	Tersusunnya Data Produk Hukum Desa di Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	Penyampaian Data Produk Hukum Desa	Persen	100
3	Terkelolanya Data yang terintegrasi melalui penerapan Satu Data Indonesia	Melaksanakan Pengelolaan data dan Penggunaan Aplikasi Srikandi	Persen	100
4	Terlaksananya Perintah Atasan baik secara tertulis maupun lisan	Melaksanakan Perintah Atasan baik secara tertulis maupun lisan	Persen	100
5	Terlaksananya Perintah Atasan dalam hal penilaian Berjenjang (E-Kinerja)	Penyampaian Penilaian Berjenjang (E-Kinerja)	Dokumen	13
6	Terlaksananya Perintah Atasan dalam hal Penyampaian Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Individu (IKI)	Penyampaian Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Individu (IKI)	Dokumen	2
7	Terlaksananya Perintah Atasan dalam hal Penyampaian Kepatuhan Pajak Tahunan	Penyampaian Pajak Tahunan	Dokumen	1
8	Terlaksananya Perintah Atasan dalam hal Melaksanakan Nilai ASN Ber-Akhlak	Pelaksanaan Apel OPD	Dokumen	12

9	Terlaksananya Perintah Atasan dalam hal Melaksanakan Zakat, Infaq dan Shodaqoh	Menyampaikan Zakat, Infaq dan Shodaqoh	Dokumen	12
10	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Dokumen	12

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG ADMINISTRASI
 PEMERINTAHAN DESA**



POINO, S. IP, M. Si
 Pembina (IV/a)
 NIP.19690503 199101 1 001

Pihak Pertama,
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI



NINA AGUSTINA, SE
 Pengatur Tingkat I (II/d)
 NIP.19860518 201001 2 024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUHAMMAD ADITYA**

Jabatan : **PENGOLAH DATA DAN INFORMASI**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. POINO, S.IP., M. SI**

Jabatan : **KEPALA BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data

Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.


5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG
ADM. PEMERINTAHAN DESA**


H. POINO, S.IP., M. SI
PEMBINA/(IV/a)

NIP. 19690503 199101 1 001

Kutai Kartanegara, 05 Januari 2026

Pihak Pertama,
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI


MUHAMMAD ADITYA
PENGATUR TK. I/(II/d)

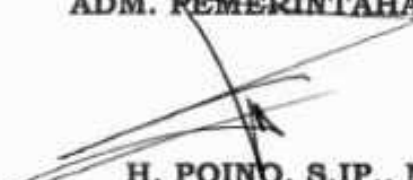
NIP. 19861226 201001 1 015

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Terlaksananya Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Indikator Kinerja Individu (IKI)	Ketepatan Penyelesaian Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Individu	Dokumen	2
2.	Tingkat Kepatuhan Pelaporan Pajak	Terlaksananya penyampaian Laporan Pajak	Dokumen	1
3.	Penilaian Berjenjang (E-KINERJA)	Laporan E- Kinerja	Dokumen	13
4.	Melaksanakan Nilai-Nilai ASN Ber-Akhlak	Penerapan ASN Berakhlak	Dokumen	12
5.	Melaksanakan Zakat/Infaq dan Shodaqoh	Terlaksananya Zakat/Infaq dan Sedekah	Dokumen	12
6.	Melaksanakan Perintah Atasan	Melaksanakan sesuai Perintah Atasan	Persen	100
7.	Data Arsip Srikandi	Data Arsip Srikandi	Persen	100
8.	Gerakan Etam Mengaji (GEMA) Bidang Administrasi Pemerintah Desa	Terlaksananya Gerakan Etam Mengaji (GEMA)	Dokumen	12
9.	Aplikasi Om Span	Penggunaan dan Penginputan Dana Desa pada Aplikasi Omspan	Persen	100
10.	Aplikasi Siskeudes	Pengelolaan Data terintegrasi pada Aplikasi Siskeudes	Persen	100
11.	Data Laporan Keuangan Desa	Data Laporan Keuangan Desa per Semester	Dokumen	2
12.	Konsultasi Pelayanan Desa	Pelayanan Konsultasi Desa	Persen	100

Kutai Kartanegara, 05 Januari 2026

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG
ADM. PEMERINTAHAN DESA


H. POINO, S.IP., M. SI
 PEMBINA/(IV/a)

NIP. 19690503 199101 1 001

Pihak Pertama,
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI


MUHAMMAD ADITYA
 PENGATUR TK. I/(II/d)

NIP. 19861226 201001 1 015



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ISNAINY AFIDA, SE**
Jabatan : **PENGOLAH DATA DAN INFORMASI**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **POINO, S.IP.M.SI**
Jabatan : **KEPALA BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.

4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
**Kepala Bidang Administrasi
Pemerintahan Desa**



POINO, S. IP. M. Si

Pembina (IV / a)

NIP. 19690503 199101 1 001

Pihak Pertama,
Pengolah Data dan Informasi



ISNAINY AFIDA, SE

Penata (III / c)

NIP. 19770709 200701 2 020

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Terlaksanannya Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	25
2.	Terlaksanannya Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen hasil evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Dokumen	10
3.	Penyampaian E-Kinerja berjenjang setiap bulan dan Final Tahunan	Tingkat Kepatuhan Penyampaian E-Kinerja berjenjang dan Final Tahunan	Dokumen	13
4.	Terlaksanannya Penyusunan Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja serta Pengukuran Kinerja	Jumlah Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja serta Pengukuran Kinerja	Dokumen	2
5.	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan atas Penyampaian Laporan SPT tahunan	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT tahunan	Dokumen	1
6.	Terlaksanannya Tata Kelola Arsip Daerah dengan Srikandi	Jumlah Tata Kelola Arsip Perangkat daerah dengan Srikandi pada bidang Administrasi Pemerintahan Desa	Persen	100
7.	Terlaksannya Gerakan Etam Mengaji (GEMA)	Terlaksananya Gerakan Etam Mengaji (GEMA) pada bidang Administrasi Pemerintahan Desa	Dokumen	12

8.	Melaksanakan ASN Ber-Akhlak	Terlaksanannya Apel Pagi	Dokumen	12
9.	Melaksanakan Tugas dari atasan	Jumlah laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	persen	100
10.	Terlaksananya Penyampaian Dokumen Zakat, Infaq dan Sadaqah	Dokumen Zakat, Infaq dan sadaqah	Dokumen	12
12.	Terlaksananya Pelayanan pada Bidang Administrasi Desa	Jumlah layanan Konsultasi Desa	Dokumen	12

**KEGIATAN / SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**

No	Kegiatan / SUB KEGIATAN	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	-	-
2.	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	-	-

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Kepala Bidang Administrasi
Pemerintahan Desa

Pengolah Data dan Informasi

POINO, S.IP, M.Si

ISNAINY AFIDA, SE

Pembina (IV/a)

Penata

NIP. 19690503 199101 1 001

NIP. 19770709 200701 2 020



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ISMIAH. E**

Jabatan : **PENGADMINISTRASI PERKANTORAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs. POINO, M.Si**

Jabatan : **KEPALA BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna

mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.

5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.


Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG ADM. PEMDES



Drs. POJNO, M.Si
Pembina / IV / a
NIP. 19690503 199101 1 001

Pihak Pertama,
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN



ISMIAH. E
Pengatur Tingkat I / II/d
NIP. 19760811 200701 2 012

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Terlaksananya Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa (Dokumen)	Dokumen	1
2	Terwujudnya organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Nilai	45
3	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan	Persen	100
4	Terwujudnya pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan	Tingkat keterisian Data Prioritas Tahunan	Persen	100
5	Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100
6	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% setiap bulan dan SKP Final tahunan	Persen	100
7	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	12

No	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Rp. 6.766.526.980,-	APBD

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG ADM. PEMDES



Drs. POINO, M.Si
Pembina/IV/a
NIP. 19690503 199101 1 001

Pihak Pertama,
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN



ISMIAH. E
Pengatur Tingkat I / II/d
NIP. 19760811 200701 2 012



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indra Bakti,SE

Jabatan : Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. Poino,S.IP., M. Si

Jabatan : Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.

4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 05 Januari 2026

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Administrasi
Pemerintahan Desa



H. POINO, S.IP, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19690503 199101 1 001

Pihak Pertama,
Penata Kelola Sistem dan Teknologi
Informasi



INDRA BAKTI, SE
Penata Muda
NIP. 19800911 200801 1 016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Pelaksanaan Gerakan Etam Mengaji	Terlaksana Gema	Dokumen	12
2	Data Jaminan Kesehatan & Ketenagakerjaan Kepala Desa	Data Kepesertaan	Dokumen	12
3	Data Jaminan Kesehatan & Ketenagakerjaan PerangkatDesa	Data Kepesertaan	Dokumen	12
4	Data Jaminan Ketenagakerjaan Anggota BPD	Data Kepesertaan	Dokumen	12
5	Pemanfaatan Aplikasi Pacar Kuda	Surat Pengantar Pencairan Keuangan Desa	Persen	100
6	Penyampaian Dokumen Pajak	Kepatuhan Penyampaian Dokumen Pajak	Dokumen	1
7	Dokumen Perjanjian Kinerja(PK) Indikator Kinerja Individu (IKI)	Kepatuhan Penyampaian Dokumen Perjanjian Kinerja(PK) Indikator Kinerja Individu (IKI)	Dokumen	2
8	Penilaian Berjenjang (E-KINERJA)	Penyampaian Laporan E-Kinerja	Dokumen	13
9	Melaksanakan Nilai-Nilai ASN Berakhlak	Penerapan ASN Berakhlak	Dokumen	12
10	Melaksanakan Zakat/Infaq dan Shodakoh	Terlaksannya Zakat/Infaq dan Shodakoh	Dokumen	12
11	Data Aplikasi Srikandi	Data Arsip Srikandi	Persen	100
12	Melaksanakan Tugas Atasan	Terlaksananya Tugas Atasan	Persen	100
13	Pemanfaatan Aplikasi E Dabu	Data Tagihan BPJS Kesehatan	Dokumen	12
14	Pemanfaatan Aplikasi SIPP	Data Tagihan BPJS Ketenagakerjaan	Dokumen	12

SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN*	ANGGARAN	KETERANGAN
1			
2			
3			
JUMLAH ANGGARAN			

Kutai Kartanegara, 05 Januari 2026

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Administrasi
Pemerintahan Desa



H. POINDO, S.IP, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19690503 199101 1 001

Pihak Pertama,
Penata Kelola Sistem dan Teknologi
Informasi



INDRA BAKTI,SE
Penata Muda
NIP. 19800911 200801 1 016



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HARTATI, S. Sos**
Jabatan : **PENGOLAH DATA DAN INFORMASI**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs.POINO, M. Si**
Jabatan : **KEPALA BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA.**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Bidang Administrasi Pemerintahan Desa yang saya pimpin;
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.

4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:


1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
**Kepala Bidang Administrasi
Pemerintahan Desa**

Pihak Pertama,
**Pengolah Data Bidang Adminisrasi
pemerintahan Desa dan Inormasi**


POINO, S. IP., M. Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19690503 199101 1 001


HARTATI, S. Sos.
Pembina III/C
NIP. 19740707200112 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Melaksanakan pengelolaan data Anggota BPD	Terlaksananya Data Anggota BPD	Persen	100
2	Melaksanakan pengelolaan data Laporan Kinerja BPD	Terlaksananya Data Laporan Kinerja BPD	Persen	50 Persen
3	Terlaksananya penerbitan Data SK BPD	Tersedianya Data SK BPD	Persen	100 Persen
4	Terlaksananya Data Arsip pada Aplikasi SRIKANDI	Melaksanakan Pembuatan Arsip Pada SRIKANDI	Persen	100 Persen
5	Tersedianya Dokumen Perjanjian Kinerja(PK) Indikator Kinerja Individu (IKI) 2 Dokumen Kuantitas	Pelaksanaan Pembuatan Dokumen Perjanjian Kinerja(PK) Indikator Kinerja Individu (IKI)	Dokumen	2 Dokumen
6	Tersedianya Dokumen pelaporan Harta Kekayaan LHKPN dan kepatuhan pelaporan Pajak	Tertaksananya Dokumen pelaporan Harta Kekayaan LHKPN dan kepatuhan pelaporan Pajak	Dokumen	2 Dokumen
7	Terselenggaranya Penilaian Berjenjang (E-KINERJA	Tertaksananya Penilaian Berjenjang (E-KINERJA	Dokumen	13 Dokumen
8	Pelaksanaan nilai nilai ASN Ber-Akhlak	Pelaksanaan nilai nilai ASN Ber-Akhlak	Dokumen	12 Dokumen
9	Tertaksanya Dokumen Melaksanajkan Tugas Atasan	Tertaksanya Dokumen Melaksanajkan Tugas Atasan	Persen	100
10	Terlaksananya Layanan Konsultasi Desa	Terlaksananya Layanan Konsultasi Desa	Dokumen	12 Dokumen
11	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Melaksanakan Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Dokumen	12 Dokumen

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
**Kepala Bidang Administrasi
Pemerintahan Desa**



POINO, S.IP., M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19690503 199101 1 001

Pihak Pertama,
**Pengolah Data Bidang Administrasi
pemerintahan Desa dan Inormasi**



HARTATI, S. Sos.
Pembina III/C
NIP. 19740707200112 2 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Elis Puryanti**

Jabatan : **Pengadministrasi Perkantoran**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Poino, S.IP., M.Si**

Jabatan : **Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.

6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

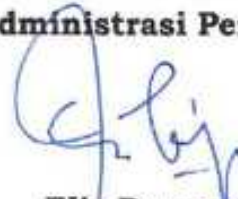
Kutai Kartanegara, 5 Februari 2026

Pihak Kedua,
**Kepala Bidang Administrasi
Pemerintahan Desa**



Poino, S.IP., M.Si
Pembina - (IV/a)
NIP. 196905003 199101 1 00

Pihak Pertama,
Pengadministrasi Perkantoran



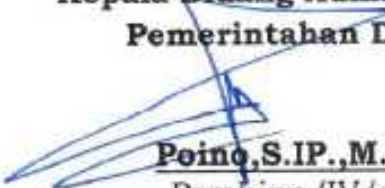
Elis Puryanti
Penata - (III/b)
NIP. 19760907 200112 2 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA


NO	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Mewujudkan Kinerja yang efektif, akuntabel dan adaptif;	Terwujudnya Kinerja yang efektif, akuntabel dan adaptif dengan Melaksanakan Apel	Dokumen	12
2.	Pengelolaan Data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan;	Pengelolaan Data Arsip Srikandi	Prosentase	100%
3.	Terlaksananya Perintah Atasan dalam hal Penilaian Berjenjang (E-Kinerja);	Tersusunnya dokumen Penilaian Berjenjang (E-KINERJA)	Dokumen	13
4.	Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Indikator Kinerja Individu (IKI);	Tersusunnya Dokumen Perjanjian Kinerja(PK) Indikator Kinerja Individu (IKI)	Dokumen	2
5.	Melaksanakan Tugas Atasan;	Terlaksananya Tugas yang diberikan Atasan	Prosentasi	100%
6.	Melaksanakan nilai nilai ASN Ber-Akhlak;	Nilai nilai ASN Ber-Akhlak melalui Gerakan Etam Mengaji OPD (GEMA)	Dokumen	12
7.	Pendataan Indeks Desa;	Dokumen Pendataan Indeks Desa	Dokumen	1
8.	Pengelolaan Data Manajemen Administrasi Pemerintahan Desa;	Terkelolanya Data Manajemen Administrasi Pemerintahan Desa;	Dokumen	1
9.	Kepatuhan Pelaporan Pajak dan Melaksanakan Zakat	Dokumen Pelaporan Pajak (SPT) Tahunan	Dokumen	1

Kutai Kartanegara, 5 Februari 2026

Pihak Kedua,
**Kepala Bidang Administrasi
Pemerintahan Desa**


Poind, S. IP., M. Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19690503 199101 1 001

Pihak Pertama,
Pengadministrasi Perkantoran


Elis Puryanti
Penata Tk. I - (III/b)
NIP. 19760907 200112 2 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **AJI NAZARUDIN, S.Sos**
Jabatan : Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

N a m a : **H. POINO, S.IP., M.Si**
Jabatan : Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kutai
Kartanegara.

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.

5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Kepala Bidang
Administrasi Pemerintahan Desa



H. POINO, S.IP, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19690503 199101 1 001

Penata Kelola Sistem dan Teknologi
Informasi



AJI NAZARUDIN, S.Sos
Penata III/c
NIP. 19790114 1999031 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

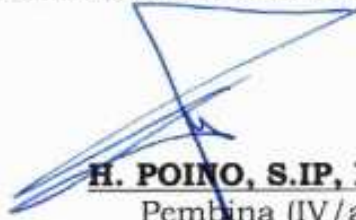
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	200
2.	Terwujudnya organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja	Gerakan Etam Mengaji (GEMA)	Persen	45
3.	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Ketersediaan Laporan Manajemen Resiko	Dokumen	4
4.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Ketersediaan Laporan Laporan SPIP	Dokumen	4
5.	Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data	Pengelolaan Satu Data Indonesia yang berhubungan dengan Bidang Administrasi Pemerintahan Desa (Data BPD, Data Perangkat Desa, Data Produk Hukum Desa, Aplikasi SRIKANDI, Aplikasi SIPD).	Persen	100
6.	Terlaksananya Kepatuhan Input E-PANTAU	Terlaksananya Kepatuhan Input E_Pantau Per tanggal 10 Setiap Bulan	Dokumen	2
7.	Penyusunan Perjanjian Kinerja sampai ke Pelaksana	Ketepatan waktu penyusunan dan penyampaian Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah (maksimal 1 bulan setelah APBD ditetapkan)	Dokumen	2
8.	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan Pembuatan E-Kinerja Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan setiap tahun	Dokumen	13
9.	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan Pajak atas SPT Tahunan	Tingkat Kepatuhan Pajak Penyampaian SPT Tahunan 100% per tanggal 31 Maret setiap tahunnya	Dokumen	1
10.	Pelaksanaan Zakat, Infaq dan Sedekah	Laporan Ketersediaan Zakat , Infaq dan Sedekah	Dokumen	12
11.	Penerapan Core Values ASN "BerAKHLAK"	Internalisasi Core Values ASN "BerAKHLAK"	Dokumen	12
12.	Melaksanakan perintah atasan baik secara tertulis maupun lisan	Melaksanakan perintah Atasan Bidang Adm. Pemdes baik secara tertulis maupun lisan	Persen	100
13.	Layanan Konsultasi Desa	Layanan Konsultasi Desa Bidang Adm. Pemerintahan Desa	Dokumen	12

**SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2026
BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Rp. 300.000.000,-	APBD
Jumlah Anggaran		Rp. 300.000.000,	

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Kepala Bidang
Administrasi Pemerintahan Desa



H. POINO, S.IP, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19690503 199101 1 001

Penata Kelola Sistem dan Teknologi
Informasi



AJI NAZARUDIN, S.Sos
Penata III/c
NIP. 19790114 1999031 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : **SOPIAN NUR, S.Sos**
Jabatan : Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kutai
Kartanegara.

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

N a m a : **POINO, S.IP, M.Si**
Jabatan : Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kutai
Kartanegara.

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;

2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 1 Januari 2026

Pihak Kedua
Kepala Bidang Administrasi
Pemerintahan Desa



POINO, S.IP, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19690503 199101 1 001

Pihak Pertama
Penata Kelola Sistem dan Teknologi
Informasi



SOPIAN NUR, S.Sos
Penata TK I (III/d)
NIP. 19680825 200012.1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Jumlah Desa yang dibina dan diawasi dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen	24
2	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Dokumen	12
3	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada Bidang Adm Pemerintahan Desa	Dokumen	4
4	Tingkat Keterisian Data Prioritas Indikator Tahunan	Data arsip Srikandi	Persen	100
5		Data Laporan Keuangan Desa	Dokumen	2
6		Data Aplikasi Siskeudes	Persen	100
7		Ketersedian Data Batas Desa	Persen	80

8		Keteriasin data pada Aplikasi Omspan	Persen	100
9		Keteriasian Data PA Desa	Persen	80
10	Melaksanakan perintah atasan dalam hal penilaian	Tingkat kepatuhan pelaporan Ekinerja	Laporan	12
11		Tingkat kepatuhan pelaporan pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja (IKI)	Dokumen	6
12		Jumlah kegiatan nilai ASN Berahklak	Laporan	12
13	Terwujudnya pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan	Tingkat keterisian Data Prioritas Tahunan	Persen	100
14	Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100

**SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2026
BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN*	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa	7.085.635.910	APBD
JUMLAH ANGGARAN			

Kutai Kartanegara, 5 Januari 2026

Pihak Kedua
Kepala Bidang Administrasi
Pemerintahan Desa


POINO S.IP, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19690503 199101 1 001

Pihak Pertama
Penata Kelola Sistem dan Teknologi
Informasi


SOPIAN NUR, S.Sos
Penata TK I (III/d)
NIP. 19680825 200012 1 004

CATATAN:

*HAPUS YANG TIDAK PERLU



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ALVITA KUMARA WASISTIYANA, S.Tr.I.P.**

Jabatan : **PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **POINO, S.IP., M.Si.**

Jabatan : **KEPALA BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.

4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 05 Januari 2026

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN DESA**



POINO, S.IP., M.Si.

Pembina (IV/a)
NIP.19690503 199101 1 001

Pihak Pertama,
**PENATA KELOLA SISTEM DAN
TEKNOLOGI INFORMASI**



ALVITA KUMARA WASISTNYANA, S.Tr.I.P.

Penata Muda (III/a)
NIP. 20010720 202409 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Terfasilitasinya Desa dalam Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Dokumen	1
2.	Terwujudnya Organisasi Perangkat Daerah yang Efektif, Akuntabel, dan Adaptif Dalam Mendukung Pencapaian Kinerja serta Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Nilai	45
3.	Terlaksananya Penyusunan Laporan Penyelenggaraan SPIP serta Laporan Kinerja Lainnya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah	Terekapnya Dokumen Manajemen Resiko Pertriwulan serta Dokumen Maturitas SPIP bidang pertriwulan	Persen	100
4.	Terwujudnya Pengelolaan Data Pemerintah Daerah yang Akurat, Mutakhir, Terpadu, dan dapat Dipertanggungjawabkan	Tingkat keterisian data prioritas tahunan	Persen	100
5.	Terlaksananya Kepatuhan Input E-Pantau	Tingkat Ketepatan Waktu Input E-Pantau dan telah diverifikasi 100% per Tanggal 10 setiap Bulan	Persen	100
6.	Terlaksanananya Penyusunan Dokumen Kinerja Pelaksana (Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Individu, Dan Sasaran Kinerja Pegawai Serta Penilaian Sasaran Kerja Kinerja Bawahan)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% setiap Bulan dan SKP Final Tahunan	Persen	100
7.	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah laporan pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	12

**SUBKEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO.	SUBKEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Rp 255.000.000	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp 255.000.000	APBD

Kutai Kartanegara, 05 Januari 2026

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN DESA**



POINO, S.IP., M.Si.
Pembina (IV/a)
NIP.19690503 199101 1 001

Pihak Pertama,
**PENATA KELOLA SISTEM DAN
TEKNOLOGI INFORMASI**



ALVITA KUMARA WASISTİYANA, S.Tr.I.P.
Penata Muda (III/a)
NIP. 20010720 202409 2 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NURJANNAIM**

Jabatan : **PENGADMINISTRASI PERKANTORAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **DEDDY SETYO UTOMO, S.IP., M.SI**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PENGEMBANGAN EKONOMI DESA.**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan Pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia

guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.

5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang


Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 9 Februari 2026

**Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pemberdayaan
Masyarakat dan Pengembangan
Ekonomi Desa .**


Deddy Setyo Utomo, S.IP., M.Si
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19880806 200701 1 003

**Pihak Pertama,
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN**


NURJANNAIM
Penata Muda Tk. I (III/b)
NIP. 19700130 199402 2 001


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	6
2.	Tersedianya data Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan	Jumlah Data Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan	Data	6 (Data LKD)
3.	Terwujudnya organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Pelaksanaan GEMA pada Bidang	Dokumen Hasil Pelaksanaan GEMA	12
4.	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko Perangkat Daerah (KK MANAJEMEN RESIKO, SPIP)	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada perangkat daerah per - Triwulan	Laporan	4 (Per tri wulan)
5.	Terlaksananya Kepatuhan Input E-PANTAU	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Laporan	12

6.	Terlaksananya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data	Jumlah Data pada Kertas Kerja BECIK, WALIDATA, PENATA-USAHAAN ARSIP dan Aplikasi SRI KANDI	Laporan dan Data	1
7.	Terlaksananya perintah atasan dalam hal Penilaian Berjenjang (E-KINERJA) Pelaksanaan Perjanjian Kinerja(PK) Indikator Kinerja Individu (IKI) dan Pengukuran Kinerja, melaksanakan pelaporan Harta Kekayaan LHKPN dan kepatuhan pelaporan Pajak, melaksanakan Gerakan Etam Mengaji OPD (GEMA) Zakat&Shodaqoh, nilai nilai ASN Ber-Akhlak, serta melaksanakan tugas dari atasan baik secara tertulis maupun lisan	Jumlah Dokumen Penilaian Berjenjang (E-KINERJA) Pelaksanaan Perjanjian Kinerja(PK) Indikator Kinerja Individu (IKI) dan Pengukuran Kinerja, melaksanakan pelaporan Harta Kekayaan LHKPN dan kepatuhan pelaporan Pajak, melaksanakan Gerakan Etam Mengaji OPD (GEMA) Zakat&Shodaqoh, nilai nilai ASN Ber-Akhlak, serta melaksanakan tugas dari atasan baik secara tertulis maupun lisan	Dokumen	12 Bulan

Kutai Kartanegara, 9 Februari 2026

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa .


Deddy Setyo Utomo, S.IP., M.Si
 Penata Tk. I (III/d)
 NIP. 19860806 200701 1 003

Pihak Pertama,
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN



NURJANNAIM
 Penata Muda Tk. I (III/b)
 NIP. 19700130 199402 2 001

**SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PENGEMBANGAN EKONOMI DESA**

No	Kegiatan	Anggaran	Ket
1.	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 0	-
2.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 1.864.677.200,00	APBD
3.	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 11.314.797.000,00	APBD
4	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Rp. 2.000.000.000,00	APBD

Kutai Kartanegara, 9 Februari 2026

**Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pemberdayaan
Masyarakat dan Pengembangan
Ekonomi Desa .**


Deddy Setyo Utomo, S.IP., M.Si
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19880806 200701 1 003

**Pihak Pertama,
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN**


NURJANNAIM
Penata Muda Tk. I (III/b)
NIP. 19700130 199402 2 001

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2. Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran
3. Tugas : Teradministrasinya Laporan, Dokumen dan Data pada Bidang Pemasangan
 1. Tersedianya Jumlah Laporan Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
 2. Tersedianya Jumlah Data Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.
4. Fungsi :
 3. Jumlah Dokumen Pelaksanaan GEMA pada Bidang
 4. Jumlah Laporan PENATA-USHAHAAN ARSIP (SPJ Kegiatan)
 5. Jumlah Laporan Penilaian Berjenjang (E-KINERJA) pada Aplikasi
 6. Jumlah Laporan Pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) Indikator Kinerja Individu (IKI) dan Pengukuran Kinerja,
 7. Jumlah Laporan pelaporan Harta Kekayaan LHKPN dan kepatuhan pelaporan Pajak,
 8. Jumlah Laporan Pelaksanakan nilai nilai ASN Ber-Akhlak, serta melaksanakan tugas dari atasan baik secara tertulis maupun lisan

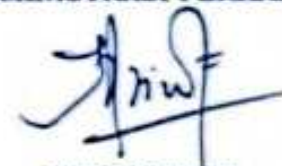
No	Sasaran Aktivitas	Indikator Kinerja	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data
1.	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Lembaga LKD/K dan LAD/K dan MHA yang ditingkatkan Kapasitas nya	$\frac{\text{Jumlah data yang tersusun}}{\text{Target data yang tersusun}} = 100 \times \text{Persentase Capaian Kinerja}$	20 Kecamatan
2.	Tersedianya data Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan	Jumlah Data Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan	$\frac{\text{Jumlah data yang tersusun}}{\text{Target data yang tersusun}} = 100 \times \text{Persentase Capaian Kinerja}$	20 Kecamatan
3.	Terwujudnya organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Pelaksanaan GEMA pada Bidang	$\frac{\text{Jumlah Inovasi Target data yang tersusun}}{\text{Target data yang tersusun}} = 100 \times \text{Persentase Capaian Kinerja}$	DPMD dan BIDANG PEMASBANGDES
4.	Terlaksananya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan	Jumlah Laporan pada PENATA-USAHAAN ARSIP	$\frac{\text{Jumlah data yang tersusun}}{\text{Target data yang tersusun}} = 100 \times \text{Persentase Capaian Kinerja}$	Aplikasi / Laporan / Dokumen

	melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data			
5.	Terlaksananya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data	Jumlah Data pada Aplikasi SRI KANDI	$\frac{\text{Jumlah data yang tersusun}}{\text{Target data yang tersusun}} = 100 \times \text{Persentase Capaian Kinerja}$	Aplikasi
6.	Melaksanakan perintah atasan dalam hal Penilaian Berjenjang (E-KINERJA) Pelaksanaan Perjanjian Kinerja(PK) Indikator Kinerja Individu (IKI) dan Pengukuran Kinerja, melaksanakan pelaporan Harta Kekayaan LHKPN dan kepatuhan pelaporan Pajak, melaksanakan Gerakan Etam Mengaji OPD (GEMA) Zakat&Shodaqoh, nilai nilai ASN Ber-Akhlak, serta melaksanakan tugas dari atasan baik secara tertulis maupun lisan	Jumlah Laporan Penilaian Berjenjang apa Aplikasi E Kinerja (SKP)	$\frac{\text{Jumlah Laporan yang tersusun}}{\text{Target data yang tersusun}} = 100 \times \text{Persentase Capaian Kinerja}$	Aplikasi

7	<p>Melaksanakan perintah atasan dalam hal Penilaian Berjenjang (E-KINERJA) Pelaksanaan Perjanjian Kinerja(PK) Indikator Kinerja Individu (IKI) dan Pengukuran Kinerja,melaksanakan pelaporan Harta Kekayaan LHKPN dan kepatuhan pelaporan Pajak, melaksanakan Gerakan Etam Mengaji OPD (GEMA) Zakat&amp;Shodaqoh, nilai nilai ASN Ber-Akhlak, serta melaksanakan tugas dari atasan baik secara tertulis maupun lisan</p>	<p>Jumlah Laporan Pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Individu (IKI) dan Pengukuran Kinerja pada Bidang PEMASBANGDES</p>	<p><u>Jumlah Laporan yang tersusun</u> Target data yang tersusun = 100 x Persentase Capaian Kinerja</p>	<p>DPMD dan BIDANG PEMASBANGDES</p>
8	<p>Melaksanakan perintah atasan dalam hal Penilaian Berjenjang (E-KINERJA) Pelaksanaan Perjanjian Kinerja(PK) Indikator Kinerja Individu (IKI) dan Pengukuran Kinerja,melaksanakan pelaporan Harta Kekayaan LHKPN dan kepatuhan pelaporan Pajak, melaksanakan Gerakan Etam Mengaji OPD (GEMA) Zakat&amp;Shodaqoh, nilai nilai ASN Ber-Akhlak, serta melaksanakan tugas dari atasan baik secara tertulis maupun lisan</p>	<p>Jumlah Laporan Pelaporan harta Kekayaan (ASN) pada Aplikasi CORETAX</p>	<p><u>Jumlah Laporan yang tersusun</u> Target data yang tersusun = 100 x Persentase Capaian Kinerja</p>	<p>Aplikasi</p>

<p>Melaksanakan perintah atasan dalam hal Penilaian Berprestasi (E-KINERJA) Pelaksanaan Perjanjian Kinerja/IK Indikator Kinerja Individu (IKI) dan Pengukuran Kinerja, melaksanakan pelaporan Harta Kekayaan LHKPN dan keparahan pelaporan Pajak, melaksanakan Gerakan Etam Mengaji OPD (GEMA) Zakat/Komp. Shodaqoh, nilai nilai ASN Ber-Akhlak, serta melaksanakan tugas dari atasan baik secara tertulis maupun lisan</p>	<p>Jumlah Dokumen pelaksanaan ASN Ber-Akhlak, serta melaksanakan tugas dari atasan baik secara tertulis maupun lisan</p>	<p>Jumlah Laporan yang tersusun Target data yang tersusun</p> <p>= 100 x Persentase Capaian Kinerja</p>	<p>DPMD dan BIDANG PEMASBANGDES</p>
---	--	---	-------------------------------------

**Pihak Pertama,
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN**



NURJANNAIM

**Penata Muda Tk. 1 (III/b)
NIP. 19700130 199402 2 001**

PENGUKURAN KINERJA

1. PERANGKAT DAERAH
2. JAPUNG/ PELAKSANA
3. TAHUN

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PENGAADMINISTRASI PERKANTORAN
2026


No	Sasaran Aktivitas	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna). Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna). Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Lembaga LKD/K dan LAD/K dan MHA yang ditingkatkan Kapasitas nya	6 Lembaga (20 Kecamatan/ 12 Bulan)	6 Lembaga (20 Kecamatan/ 12 Bulan)	100%
2	Tersedianya data Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna). Lembaga Adat Desa/Kelurahan	Jumlah Data Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna). Lembaga Adat Desa/Kelurahan	6 Data (20 Kecamatan/ 12 Bulan)	6 Data (20 Kecamatan/ 12 Bulan)	100%
3	Terwujudnya organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Pelaksanaan GEMA pada Bidang	12 Dokumen	12 Dokumen	100%

4	Tertindakannya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data	Jumlah Laporan pada PENATA-USAHAAN ARSIP	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
5	Tertindakannya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data	Jumlah Data pada Aplikasi SRI KANDI	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
6	Melaksanakan perintah atasan dalam hal Penilaian Berjenjang (E-KINERJA) Pelaksanaan Perjanjian Kinerja(PK) Indikator Kinerja Individu (IKI) dan Pengukuran Kinerja,melaksanakan pelaporan Harta Kekayaan LHKPN dan kepatuhan pelaporan Pajak, melaksanakan Gerakan Etam Mengaji OPD (GEMA) Zakat&Shodaqoh, nilai nilai ASN Ber-Achlik, serta melaksanakan tugas dari atasan baik secara tertulis maupun lisan	Jumlah Laporan Penilaian Berjenjang apa Aplikasi E Kinerja (SKP)	13 Laporan	13 Laporan	100%
7	Melaksanakan perintah atasan dalam hal Penilaian Berjenjang (E-KINERJA) Pelaksanaan Perjanjian Kinerja(PK) Indikator Kinerja Individu (IKI) dan Pengukuran Kinerja,melaksanakan pelaporan Harta kekayaan LHKPN dan kepatuhan pelaporan Pajak, melaksanakan Gerakan Etam Mengaji OPD (GEMA) Zakat&Shodaqoh, nilai nilai ASN Ber-Achlik, serta melaksanakan tugas dari atasan baik secara tertulis maupun lisan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Individu (IKI) dan Pengukuran Kinerja pada Bidang PEMASBANGDES	1 Laporan	1 Laporan	100%


8.	Melaksanakan perintah atasan dalam hal Penilaian Berjenjang (E-KINERJA) Pelaksanaan Perjanjian Kinerja(PK) Indikator Kinerja Individu (IKI) dan Pengukuran Kinerja,melaksanakan pelaporan Harta Kekayaan LHKPN dan kepatuhan pelaporan Pajak, melaksanakan Gerakan Etam Mengaji OPD (GEMA) Zakat& Shodaqoh, nilai nilai ASN Ber-Akhlak, serta melaksanakan tugas dari atasan baik secara tertulis maupun lisan	Jumlah Laporan Pelaporan harta Kekayaan (ASN) pada Aplikasi CORETAX	1 Laporan	1 Laporan	100%
9.	Melaksanakan perintah atasan dalam hal Penilaian Berjenjang (E-KINERJA) Pelaksanaan Perjanjian Kinerja(PK) Indikator Kinerja Individu (IKI) dan Pengukuran Kinerja,melaksanakan pelaporan Harta Kekayaan LHKPN dan kepatuhan pelaporan Pajak, melaksanakan Gerakan Etam Mengaji OPD (GEMA) Zakat& Shodaqoh, nilai nilai ASN Ber-Akhlak, serta melaksanakan tugas dari atasan baik secara tertulis maupun lisan	Jumlah Dokumen pelaksanaan ASN Ber-Akhlak, serta melaksanakan tugas dari atasan baik secara tertulis maupun lisan	12 Dokumen	12 Dokumen	100%

Kutai Kartanegara, 9 Februari 2026

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi
Desa .


Deddy Setyo Utomo, S.IP., M.Si
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19880806 200701 1 003

Pihak Pertama,
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN


NURJANNAIM
Penata Muda Tk. I (III/b)
NIP. 19700130 199402 2 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Wahyudi Herdianto, SE**

Jabatan : **Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi Pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara.**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Deddy Setyo Utomo, S.IP., M.Si**

Jabatan : **Kepala Bidang kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara.**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan Pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna

mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.

5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 9 Februari 2026

**Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pemberdayaan
Masyarakat dan Pengembangan
Ekonomi Desa .**

**Deddy Setyo Utomo, S.IP., M.Si
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19880806 200701 1 003**

**Pihak Pertama,
Penata Kelola Sistem dan Teknologi
Informasi**

**Wahyudi Herdianto, SE
Penata Tk. I (III / d)
NIP. 19800513 200112 1 003**

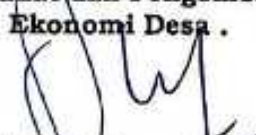
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, PW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	Lembaga	6
2.	Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)	Dokumen	1
3.	Terwujudnya organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Tersedianya Inovasi SIEDESA dan Jumlah Dokumen Pelaksanaan GEMA pada Bidang	Inovasi Laporan	1
4.	Ketersediaan dokumen Manajemen Resiko Perangkat Daerah (KK Manajemen Resiko, SPIP)	Ketersediaan dokumen Manajemen Resiko pada Perangkat Daerah Per Triwulan	Laporan	4


5.	Terlaksananya Kepatuhan Input E-PANTAU	Tingkat Ketepatan waktu input E-PANTAU dantelah di verifikasi 100 % Per tanggal 10 setiap bulan	Bulan	12
6.	Terlaksananya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data	Jumlah Data pada Kertas Kerja BECIK, WALIDATA, PENATA-USAHAN ARSIP dan Aplikasi SRI KANDI	Laporan dan Data	1
7.	Melaksanakan perintah atasan dalam hal Penilaian Berjenjang (E-KINERJA) Pelaksanaan Perjanjian Kinerja(PK) Indikator Kinerja Individu (IKI) dan Pengukuran Kinerja, melaksanakan pelaporan Harta Kekayaan LHKPN dan kepatuhan pelaporan Pajak, melaksanakan Gerakan Etam Mengaji OPD (GEMA) Zakat&Shodaqoh, nilai nilai ASN Ber-Akhlak, serta melaksanakan tugas dari atasan baik secara tertulis maupun lisan	Jumlah Laporan, Jumlah Dokumen	Laporan, Dokumen , Data	12

Kutai Kartanegara, 9 Februari 2026

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa .


Deddy Setyo Utomo, S.IP., M.Si
Penata Tk. I (III / d)
NIP. 19880806 200701 1 003

Pihak Pertama,
Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi


Wahyudi Herdianto, SE
Penata Tk. I (III / d)
NIP. 19800513 200112 1 003

**SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PENGEMBANGAN EKONOMI DESA**

No	Kegiatan	Anggaran	Ket
1.	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 0	-
2.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 1.864.677.200,00	APBD
3.	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 11.314.797.000,00	APBD
4.	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Rp. 2.000.000.000,00	APBD

Kutai Kartanegara, 9 Februari 2026

**Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pemberdayaan
Masyarakat dan Pengembangan
Ekonomi Desa .**

**Deddy Setyo Utomo, S.IP., M.Si
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19880806 200701 1 003**

**Pihak Pertama,
Penata Kelola Sistem dan Teknologi
Informasi**

**Wahyudi Herdianto, SE
Penata Tk. I (III / d)
NIP. 19800513 200112 1 003**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Mohd.Musni**
Jabatan : **Pengolah Data Dan Informasi**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **DEDDY SETYO UTOMO.S.IP. M.Si**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PENGEMBANGAN EKONOMI DESA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.

5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data
6. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara
7. Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, menjadi tanggung jawab saya.

Pihak kedua

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 9 Februari 2026

PIHAK KEDUA,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN
EKONOMI DESA


DEDDY SETYO UTOMO, S.JP., M.Si
PENATA TK. I (III/d)
NIP. 19880806 200701 1 003

PIHAK PERTAMA,
PENATA LAYANAN OPERASIONAL


Mohd. Musni
Penata Muda (III/a)
NIP. 19770427200701 1 024

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Terlaksananya Fasilitas Manajemen Pemerintahan Desa	Dokumen Hasil Fasilitas Manajemen Pemerintahan Desa	Dokumen	10
2	Terlaksananya Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan	11
3	Terlaksananya Fasilitas Penyelenggaraan Ketertarikan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyelenggaraan Ketertarikan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Dokumen	1
4	Terlaksananya kematangan Organisasi (Pelaksanaan Gerakan Mengaji) GEMA	Jumlah laporan Pelaksanaan GEMA	Laporan	12
5	Melakukan input data pelaksanaan sub kegiatan pada aplikasi E-Pantau	Jumlah data terinput pada Aplikasi E-Pantau	Data	12
6	Terwujudnya pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.	Jumlah Surat Naskah Dinas yang terselesaikan pada aplikasi SRIKANDI	Surat	25
7	Membuat Kertas Kerja Manajemen Resiko Sub Kegiatan per trwulan	Jumlah Kertas Kerja Manajemen Resiko yang terselesaikan	Kerta Kerja Dan Laporan	1 Kertas Kerja dan 4 Laporan
8	Melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan baik lisan maupun tertulis.	Jumlah laporan Ekinerja (SKP) Bulanan Dan Final	Laporan	13
9	Melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan baik lisan maupun tertulis	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Individu	Dokumen	6
10	Melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan baik lisan maupun tertulis	Jumlah Laporan Pajak Tahunan (SPT Tahunan	Laporan	1
11	Melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan baik lisan maupun tertulis	Jumlah kegiatan (Apel) dan kegiatan lainnya	Persen	100

Kutai Kartanegara, 9 Februari 2026

PIHAK KEDUA,
 KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN
 MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN
 EKONOMI DESA

DEDDY SETYO UTOMO, S.P. M.Si

PENATA TK. I (III/d)

NIP. 19880806 200701 1 003

PIHAK PERTAMA,
 PENATA LAYANAN OPERASIONAL

Mohd. Musni

Penata Muda (III/a)

NIP. 19770427200701 1 024



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **JAMRIAH**

Jabatan : **PENGADMINISTRASI PERKANTORAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **DEDDY SETYO UTOMO, S.IP., M.Si**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PENGEMBANGAN EKONOMI DESA.**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan Pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia

guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.

5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 9 Februari 2026

**Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pemberdayaan
Masyarakat dan Pengembangan
Ekonomi Desa .**

Deddy Setyo Utomo, S.IP., M.Si
Penata Tk. I (III / d)

**Pihak Pertama,
Pengadministrasi Perkantoran**


Jamriah
Pengatur Tk. I (II / d)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam rangka Pendapatan Asli Desa	Dokumen	12 Bulan
2.	Terwujudnya organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Tersedianya Inovasi SIEDESA dan Jumlah Dokumen Pelaksanaan GEMA pada Bidang	Inovasi Laporan	Inovasi 12 Bulan
3.	Terlaksananya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data	Jumlah Data pada Kertas Kerja BECIK, WALIDATA, PENATA-USAHAAN ARSIP dan Aplikasi SRI KANDI	Laporan dan Data	12 Bulan
4.	Melaksanakan perintah atasan dalam hal Penilaian Berjenjang (E-KINERJA) Pelaksanaan Perjanjian Kinerja(PK) Indikator Kinerja Individu (IKI) dan Pengukuran Kinerja, melaksanakan pelaporan Harta Kekayaan LHKPN dan kepatuhan pelaporan Pajak, melaksanakan Gerakan Etam Mengaji OPD (GEMA) Zakat&Shodaqoh, nilai nilai ASN Ber-Akhlak, serta melaksanakan tugas dari atasan baik secara tertulis maupun lisan	Jumlah Laporan Jumlah Dokumen Jumlah Data	Laporan Dokumen Data	12 Bulan

Kutai Kartanegara, 9 Februari 2026

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pemberdayaan
Masyarakat dan Pengembangan
Ekonomi Desa

Deddy Setyo Utomo, S.IP., M.Si

Pihak Pertama,
Pengadministrasi Perkantoran



Jamriah

Pengatur Tk. I (II / d)

**SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PENGEMBANGAN EKONOMI DESA**

No	Kegiatan	Anggaran	Ket
1.	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Rp. 0	-

**Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pemberdayaan
Masyarakat dan Pengembangan
Ekonomi Desa**


Deddy Setyo Utomo, S.IP., M.Si
Penata Tk. I (III / d)
NIP. 19880806 200701 1 003

Kutai Kartanegara, 9 Februari 2026

**Pihak Pertama,
Pengadministrasi Perkantoran**


Jamriah
Pengatur Tk. I (II / d)
NIP. 19720208 200701 2 026



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **IIM RAMDHONI**

Jabatan : **PENGADMINISTRASI PERKANTORAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **DEDY SETYO UTOMO, S. IP. M. SI**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PENGEMBANGAN EKONOMI DESA.**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan Pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia

guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.

5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 9 Januari 2026

Pihak Kedua,
**Kepala Bidang Pemberdayaan
Masyarakat dan Pengembangan
Ekonomi Desa .**

DEDY SETYO UTOMO, S.IP, M.Si
Penata Tk. I (IH/d)
NIP. 19880806 200701 1 003

Pihak Pertama,
Pengadministrasi Perkantoran


IIM RAMDHONI
Penata Muda Tk I (III/b)
NIP. 197708272001121007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Terfasilitasinya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat	Laporan Dokumen Data	1
2.	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	1

3.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Lembaga Unit	1
4.	Terfasilitasinya Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	1
5.	Terwujudnya organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Tersedianya Inovasi SIEDESA dan Jumlah Dokumen Pelaksanaan GEMA pada Bidang	Laporan	12
6.	Terlaksananya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data	Jumlah Data pada Kertas Kerja BECIK, WALIDATA, PENATAUSAHAAN ARSIP dan Aplikasi SRI KANDI	Laporan dan Data	12
7.	Melaksanakan perintah atasan dalam hal Penilaian Berjenjang (E-KINERJA) Pelaksanaan Perjanjian Kinerja(PK) Indikator Kinerja Individu (IKI) dan Pengukuran Kinerja, melaksanakan pelaporan Harta Kekayaan LHKPN dan	Jumlah Laporan, Jumlah Dokumen	Laporan Dokumen Data	12

kepatuhan pelaporan Pajak, melaksanakan Gerakan Etam Mengaji OPD (GEMA) Zakat&Shodaqoh, nilai nilai ASN Ber-Akhlak, serta melaksanakan tugas dari atasan baik secara tertulis maupun lisan			
--	--	--	--

Kutai Kartanegara, 9 Januari 2026

**Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pemberdayaan
Masyarakat dan Pengembangan
Ekonomi Desa**

DEDY SETYO UTOMO, S.IP, M.Si
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19880806 200701 1 003

**Pihak Pertama,
Pengadministrasi Perkantoran**




IIM RAMDHONI
Penata Muda Tk I (III/b)
NIP. 197708272001121007

**SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PENGEMBANGAN EKONOMI DESA**

No	Kegiatan	Anggaran	Ket
1.	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 0	-
2.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 1.864.677.200,00	APBD
3.	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 11.314.797.000,00	APBD
4.	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Rp. 2.000.000.000,00	APBD

**Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pemberdayaan
Masyarakat dan Pengembangan
Ekonomi Desa**


DEDY SETYO UTOMO, S.IP, M.Si
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19880806 200701 1 003

Kutai Kartanegara, 9 Januari 2026

**Pihak Pertama,
Pengadministrasi Perkantoran**


IIM RAMDHONI
Penata Muda Tk I (III/b)
NIP. 197708272001121007



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **FITRIYANI**

Jabatan : **PENGADMINISTRASI PERKANTORAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **DEDDY SETYO UTOMO, S.IP., M.S**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PENGEMBANGAN EKONOMI DESA.**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan Pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.

5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 9 Februari 2026

**Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pemberdayaan
Masyarakat dan Pengembangan
Ekonomi Desa .**


Deddy Setyo Utomo, S.IP., M.Si
Penata TK, I (III/d)
NIP. 198808 06200701 1 003

**Pihak Pertama,
Pengadmnistrasi Perkantoran**


FITRIYANI
Penata Muda Tk. I (III/b)
NIP. 19731026 199303 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Teridentifikasi dan Terinventarisasinya Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Laporan Data/Dokumen	12 Bulan
2.	Terfasilitasinya Pemerintahan Desa dalam rangka Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan Data /Dokumen	12 Bulan
3.	Tingkat Kepatuhan terlaksananya Penilaian berjenjang (E Kinerja) pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa	Laporan Pelaksanaan Penilaian Berjenjang (E KINERJA) setiap bulan pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa pada Aplikasi Kinerja	Aplikasi	Laporan/ Data/ Dokumen
4.	Tingkat Kepatuhan terlaksananya Pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Individu (IKI) pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa	Laporan Pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Individu (IKI)	Laporan	3 Bulan
5.	Tingkat kepatuhan terlaksananya Pelaporan Harta Kekayaan ASN dan Kepatuhan Pelaporan Pajak	Laporan penginputan Pelaporan Harta Kekayaan ASN dan Kepatuhan Pelaporan Pajak pada Aplikasi DJP CORETAX	Aplikasi	Laporan

6.	Tingkat Kepatuhan pelaksanaan Nilai nilai ASN Ber-Akhlak dan Melaksanakan Tugas dari Atasan Baik secara tertulis Maupun Lisan.	Laporan pelaksanaan Nilai nilai ASN Ber-Akhlak dan Melaksanakan Tugas dari Atasan Baik secara tertulis Maupun Lisan.	Laporan/Dokumen/Data	12 Bulan
7.	Tersedianya Inovasi Pelayanan (SIEDESA) dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien	Jumlah Inovasi Perangkat	Aplikasi	Inovasi
8.	Tingkat Kepatuhan terlaksananya Gerakan Etam Mengaji (GEMA) pada Bidang	Kegiatan Gerakan Etam Mengaji (GEMA) pada Bidang PEMASBANGDES.	Kegiatan/ Data/ Dokumen	12 Bulan
9.	Tingkat Kepatuhan Terkelolanya Data yang Terintegrasi melalui Penerapan Satu Data Indonesia	Satu Data terkait Lembaga Adat Desa / Kelurahan, Masyarakat Hukum Adat dan Teknologi Tepat Guna pada Bidang PEMASBANGDES	Kegiatan/ Data/ Dokumen	12 Bulan
10.	Tingkat Kepatuhan terlaksananya pengelolaan Data (Korepondensi surat - surat) guna mendukung Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi dan Pengambilan Kebijakan berbasis Data	Pengelolaan Data Melalui surat -surat guna mendukung Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi dan Pengambilan Kebijakan berbasis Data pada Aplikasi SRIKANDI	Kegiatan/ Data/ Dokumen	12 Bulan

Kutai Kartanegara, 9 Februari 2026

**Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pemberdayaan
Masyarakat dan Pengembangan
Ekonomi Desa**

Deddy Setyo Utomo, S.IP., M.Si
Penata TK I (III/d)
NIP. 198808 06200701 1 003

**Pihak Pertama,
Pengadministrasi Perkantoran**



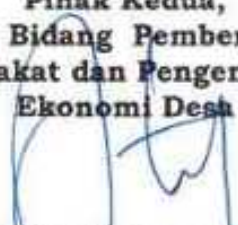
FITRIYANI
Penata Muda Tk. I (III/b)
NIP. 19731026 199303 2 002

SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN*	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Rp.	APBD
2	Fasilitasi Pemerintahan Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Rp.	APBD
JUMLAH ANGGARAN			

Kutai Kartanegara, 9 Februari 2026

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pemberdayaan
Masyarakat dan Pengembangan
Ekonomi Desa


Deddy Setyo Utomo, S.IP., M.Si
Penata TK I (III/d)
NIP. 198808 06200701 1 003

Pihak Pertama,
Pengadministrasi Perkantoran


FITRIYANI
Penata Muda Tk. I (III/b)
NIP. 19731026 199303 2 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eka Epida

Jabatan : PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : DEDDY SETYO UTOMO, S.IP. M. SI

**Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PENGEMBANGAN EKONOMI DESA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.

5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat,
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 09 Februari 2026

Pihak Kedua
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat
dan Pengembangan Ekonomi Desa


Deddy Setyo Utomo, S.IP. M. Si

PENATA TK. I (III/d)

NIP. 19880806 200701 1 003

Pihak Pertama
Pengadministrasi Perkantoran


Eka Epida

Peangatur TK.I (II/d)

NIP. 19791102 200604 2 011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kegiatan Lembaga Laporan DokumenData	5
2	Terfasilitasinya Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Laporan/Data/Dokumen	1
3	Terfasilitasinya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat	Laporan/Data/Dokumen	1
4	Terlaksanakannya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan/Data/Dokumen	12
5	Tingkat Kepatuhan Tersusunnya Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Jumlah Dokumen Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang tersusun	Dokumen	12
6	Tingkat Kepatuhan Tersusunnya Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Individu (IKI) dan Pengukuran Kinerja	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Individu (IKI) dan Pengukuran Kinerja yang tersusun	Dokumen	12
7	Tingkat Kepatuhan Terlaksananya Harta Kekayaan ASN dan Kepatuhan Pelaporan Pajak	Tingkat Kepatuhan Dokumen Pelaporan Pajak dalam Aplikasi CUARTEX Pajak	Laporan/Dokumen	1
8	Tingkat Kepatuhan Terlaksananya Inovasi Pelayanan (SIEDESA)	Jumlah Data yang di Input dalam Inovasi Pelayanan (SIEDESA)	Laporan/Data	2

		Kelembagaan		
9	Tersusunnya naskah dinas urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa melalui aplikasi Srikandi	Jumlah naskah dinas yang tersusun	Naskah	20
10	Tingkat Kepatuhan Terlaksanakannya penataan dokumen arsip aktif pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa	Jumlah dokumen arsip aktif yang pada Filing Cabinet yang tertata dan terkelola	Dokumen	100
11	Tingkat Kepatuhan Terinputnya data dokumen arsip urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa pada format sesuai ketentuan kearsipan	Jumlah data dokumen arsip yang terinput	Dokumen	2
12	Tingkat Kepatuhan Nilai-Nilai ASN Ber-Akhlak, serta melaksanakan tugas dari atasan baik secara tertulis Terlaksanakannya tugas sesuai arahan atasan baik tertulis dan maupun lisan	Persentase tugas dari atasan yang dilaksanakan sesuai arahan	Persen	100

Kutai Kartanegara, 09 Februari 2026

Pihak Kedua
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Dan Pengembangan Ekonomi Desa


DEDDY SETYO UTOMO, S.IP. M. Si

PENATA TK. I (III/d)
NIP. 19880806 200701 1 003

Pihak Pertama
Pengadministrasi Perkantoran



Eka Epida

Pengatur TK.I (II/d)
NIP. 19791102 200604 2 011

**SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN
EKONOMI DESA**

No	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. -	APBD
2	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 1.864.677.200,00	APBD
2	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Rp. 2.000.000.000,-	APBD

Kutai Kartanegara, 09 Februari 2026

Pihak Kedua
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Dan Pengembangan Ekonomi Desa


DEDDY SETYO UTOMO, S.P. M. Si

PENATA TK. I (III/d)

NIP. 19880806 200701 1 003

Pihak Pertama
Pengadministrasi Perkantoran



Eka Epida

Pengatur TK. I (II/d)

NIP. 19791102 200604 2 011



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NAZLIANA**

Jabatan : **PENGADMINISTRASI PERKANTORAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **DEDDY SETYO UTOMO, S.IP., M. SI**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PENGEMBANGAN EKONOMI DESA.**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan Pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia

guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.

5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 9 Februari 2026

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pemberdayaan
Masyarakat dan Pengembangan
Ekonomi Desa .


Deddy Setyo Utomo, S.IP, M.Si
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19880806 200701 1 003

Pihak Pertama,
Pengadministrasi Perkantoran


Nazliana
Penata Muda Tk. (III/b)
NIP. 19731004 199803 2 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam rangka Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam rangka Pendapatan Asli Desa	Dokumen	12 Bulan
2.	Terwujudnya organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Tersedianya Inovasi SIEDESA dan Jumlah Dokumen Pelaksanaan GEMA pada Bidang	Inovasi Laporan	Inovasi 12 Bulan
3.	Terlaksananya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data	Jumlah Data pada Kertas Kerja BECIK, WALIDATA, PENATA-USAHAN ARSIP dan Aplikasi SRI KANDI	Laporan dan Data	12 Bulan
4.	Melaksanakan perintah atasan dalam hal Penilaian Berjenjang (E-KINERJA) Pelaksanaan Perjanjian Kinerja(PK) Indikator Kinerja Individu (IKI) dan Pengukuran Kinerja, melaksanakan pelaporan Harta Kekayaan LHKPN dan kepatuhan pelaporan Pajak, melaksanakan Gerakan Etam Mengaji OPD (GEMA) Zakat&Shodaqoh, nilai nilai ASN Ber-Akhlak, serta melaksanakan tugas dari atasan baik secara tertulis maupun lisan	Jumlah Laporan Jumlah Dokumen Jumlah Data	Laporan Dokumen Data	12 Bulan

Kutai Kartanegara, 9 Februari 2026

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pemberdayaan
Masyarakat dan Pengembangan
Ekonomi Desa


Deddy Setyo Utomo, S.IP., M.Si
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19880806 200701 1 003

Pihak Pertama,
Pengadministrasi Perkantoran


Nazliana
Penata Muda Tk. (III/b)
NIP. 19731004 199803 2 007

**SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PENGEMBANGAN EKONOMI DESA**

No	Kegiatan	Anggaran	Kct
1.	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam rangka Pendapatan Asli Desa	Rp. 0	-

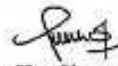
**Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pemberdayaan
Masyarakat dan Pengembangan
Ekonomi Desa**



**Deddy Setyo Utomo, S.IP., M.Si
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19880806 200701 1 003**

Kutai Kartanegara, 9 Februari 2026

**Pihak Pertama,
Pengadministrasi Perkantoran**



**Nazliana
Penata Muda Tk. (III/b)
NIP. 19731004 199803 2 007**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MUHAMMAD ALI AKBAR**
Jabatan : **PENGADMINISTRASI PERKANTORAN**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **DEDDY SETYO UTOMO, S.IP, M.Si**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PENGEMBANGAN EKONOMI DESA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.

4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak Kedua:

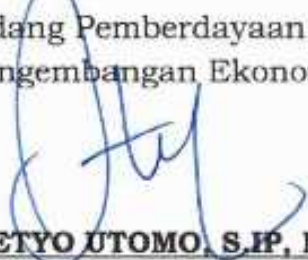
1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 9 Januari 2026

Pihak Kedua

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pengadministrasi Perkantoran
dan Pengembangan Ekonomi Desa

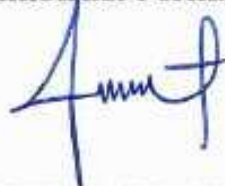


DEDDY SETYO UTOMO, S.IP, M.Si

PENATA TK. I (III/d)

NIP.19880806 200701 1 003

Pihak Pertama



MUHAMMAD ALI AKBAR

NIP. 19840525 200701 1014

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

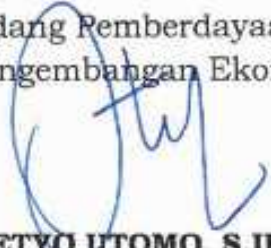
No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Teradministrasinya data RT, Posyandu, LPM dan Karang Taruna	Laporan	12
2	Melaksanakan Penilaian Berjenjang (E-KINERJA) Pelaksanaan Perjanjian Kinerja(PK) Indikator Kinerja Individu (IKI) dan Pengukuran Kinerja, melaksanakan pelaporan Harta Kekayaan LHKPN dan kepatuhan pelaporan Pajak, nilai nilai ASN Ber-Akhlak, serta melaksanakan tugas dari atasan baik secara tertulis maupun lisan	Jumlah Pelaksanaan Apel Rutin DPMD dan Apel gabungan	Laporan	12
3	Terlaksananya Nilai Kematangan Organisasi (Inovasi Pelayanan (SIEDESA) dan Gerakan Etam Mengaji (GEMA) Bidang PEMASBANGDES	Terlaksananya GEMA	Laporan	12
4	Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan (Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa/Kelurahan (LAD/K) dan Masyarakat Hukum Adat)	Jumlah Teradministrasinya Data Lembaga Adat Desa/Kelurahan LAD dan Hukum Adat	Laporan	12

5.	Terbuatnya PK, Iki dan Perubahan Tahunan	Jumlah PK, Iki Tahunan dan Perubahan	Laporan	2
6.	Terlaksananya E-Kinerja Tahunan dan Bulanan	Jumlah E-Kinerja Tahunan dan Bulanan	Laporan	12

Kutai Kartanegara, 9 Januari 2026

Pihak Kedua

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa



DEDDY SETYO UTOMO, S.IP, M.Si

PENATA TK. I (III/d)

NIP.19880806 200701 1 003

Pihak Pertama

Pengadministrasi Perkantoran



MUHAMMAD ALI AKBAR

NIP. 19840525 200701 1014



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ANI MARIATI**

Jabatan : **PENGADMINISTRASI PERKANTORAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **DEDDY SETYO UTOMO, S.IP., M.SI**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PENGEMBANGAN EKONOMI DESA.**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan Pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Teridentifikasinya Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil identifikasi dan inventarisasinya Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	1 Dokumen
2.	Terfasilitasinya Pemerintahan Desa dalam rangka Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	1 Laporan
3.	Terwujudnya organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Pelaksanaan GEMA pada Bidang	Dokumen/ Laporan	12 Laporan
4.	Tersedianya Kertas Kerja Manajemen Resiko dan Laporan Manajemen Resiko Sub. Kegiatan	Jumlah Dokumen Manajemen Resiko dan Laporan Manajemen Resiko	Kegiatan Dokumen	12 Bulan
5.	Terlaksananya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data	Jumlah Data pada PENATA-USAHAAN ARSIP dan Aplikasi SRI KANDI	Kegiatan Dokumen	12 Laporan/ Dokumen
6.	Melaksanakan perintah atasan dalam hal Penilaian Berjenjang (E-KINERJA) Pelaksanaan Perjanjian Kinerja(PK) Indikator Kinerja Individu (IKI) dan Pengukuran Kinerja, melaksanakan pelaporan Harta Kekayaan LHKPN dan kepatuhan pelaporan	Jumlah Laporan Jumlah Dokumen, Jumlah Data	Laporan / Dokumen / Data	1Laporan

guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.

5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 9 Februari 2026

**Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pemberdayaan
Masyarakat dan Pengembangan
Ekonomi Desa .**


Deddy Setyo Utomo, S.IP., M.Si
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19880806 200701 1 003

**Pihak Pertama,
Pengadministrasi Perkantoran**


Ani Mariati
Pengatur Tk. I (II/d)
NIP. 19781214 200902 2 003

Pajak, melaksanakan Gerakan Etam Mengaji OPD (GEMA) Zakat&Shodaqoh, nilai nilai ASN Ber-Akhlak, serta melaksanakan tugas dari atasan baik secara tertulis maupun lisan			
--	--	--	--

Kutai Kartanegara, 9 Febuari 2026

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa .


Deddy Setyo Utomo, S.IP., M.Si
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19880806 200701 1 003

Pihak Pertama,
Pengadministrasi Perkantoran

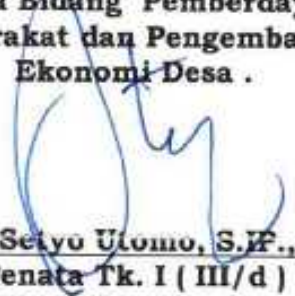

Ani Mariati
Pengatur Tk. I (II/d)
NIP. 19781214 200902 2 003

**SUB KEGLIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PENGEMBANGAN EKONOMI DESA**

No	Kegiatan	Anggaran	Ket
1.	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Rp. -	APBD
2.	Fasilitasi Pemerintahan Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Rp. -	APBD

Kutai Kartanegara, 9 Februari 2026

**Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pemberdayaan
Masyarakat dan Pengembangan
Ekonomi Desa .**


Deddy Setyo Utomo, S.I.P., M.Si
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19880806 200701 1 003

**Pihak Pertama,
Pengadministrasi Perkantoran**


Ani Mariati
Pengatur Tk. I (II/d)
NIP. 19781214 200902 2 003



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEQARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ERNANI, S. Sos**

Jabatan : **PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **DEDDY SETYO UTOMO, S.IP., M.SI**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PENGEMBANGAN EKONOMI DESA.**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategia (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan Pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia

guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.

5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 9 Februari 2026

**Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pemberdayaan
Masyarakat dan Pengembangan
Ekonomi Desa .**

**Deddy Setyo Utomo, S.IP., M.Si
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19880806 200701 1 003**

**Pihak Pertama,
Penata Kelola Sistem dan Teknologi
Informasi**

**ERNANI, S. Sos.
Penata Muda Tk. I (III/b)
NIP. 19830611 200902 2 003**


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Teridentifikasinya Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil identifikasi dan inventarisasinya Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	1
2.	Terfasilitasinya Pemerintahan Desa dalam rangka Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	1
3.	Terwujudnya organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Tersedianya Inovasi SIEDESA dan Jumlah Dokumen Pelaksanaan GEMA pada Bidang	Laporan	12
4.	Tersedianya Kertas Kerja Manajemen Resiko dan Laporan Manajemen Resiko Sub. Kegiatan	Jumlah Dokumen Manajemen Resiko dan Laporan Manajemen Resiko	Kegiatan	2
5.	Terlaksananya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data	Jumlah Data pada Kertas Kerja BECIK, WALIDATA, PENATA-USHAHAAN ARSIP dan Aplikasi SRI KANDI	Laporan dan Data	1
6.	Melaksanakan perintah atasan dalam hal Penilaian Berjenjang (E-KINERJA) Pelaksanaan Perjanjian Kinerja(PK) Indikator Kinerja Individu (IKI) dan Pengukuran Kinerja, melaksanakan pelaporan Harta Kekayaan LHKPN dan kepatuhan pelaporan Pajak, melaksanakan Gerakan Etam Mengaji OPD (GEMA)	Jumlah Laporan Jumlah Dokumen	Laporan Dokumen Data	1

	Zakat&Shodaqoh, nilai nilai ASN Ber-Akhlak, serta melaksanakan tugas dari atasan baik secara tertulis maupun lisan			
7	Terlaksananya Pelaporan (Input pada Aplikasi E-PANTAU) Pada Bidang	Jumlah Laporan yang di Input pada Aplikasi E Pantau	Kegiatan	2

Kutai Kartanegara, 9 Februari 2026

**Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pemberdayaan
Masyarakat dan Pengembangan
Ekonomi Desa .**


Deddy Setyo Utomo, S.IP., M.Si
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19880806 200701 1 003

**Pihak Pertama,
Penata Kelola Sistem dan Teknologi
Informasi**



ERNANI, S. Sos.
Penata Muda Tk. I (III/b)
NIP. 19830611 200902 2 003

**SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PENGEMBANGAN EKONOMI DESA**


No	Kegiatan	Anggaran	Ket
1.	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Rp. -	APBD
2.	Fasilitasi Pemerintahan Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Rp. -	APBD

Kutai Kartanegara, 9 Februari 2026

**Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pemberdayaan
Masyarakat dan Pengembangan
Ekonomi Desa .**


Deddy Setyo Utomo, S.I.P., M.Si
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19880806 200701 1 003

**Pihak Pertama,
Penata Kelola Sistem dan Teknologi
Informasi**


ERNANI, S. Sos.
Penata Muda Tk. I (III/b)
NIP. 19830611 200902 2 003